



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



LAPORAN KINERJA

Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

2019



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2019





Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2019 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPP Bahasa tahun 2019. BPP Bahasa pada tahun 2019 menetapkan enam Sasaran Program (SP) dan sembilan Indikator Kinerja Program (IKP). Secara umum BPP Bahasa telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang.

Permasalahan tersebut di antaranya (1) penetapan output 2019 agar sesuai dengan perubahan Renstra; (2) beberapa indikator yang belum mencapai 100%; (3) distribusi target belum terencana dengan baik.

Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan BPP Bahasa pada tahun 2019. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja BPP Bahasa pada tahun 2019.

Jakarta, Februari 2020
Plt. Kepala Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa,


Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.



gln.kemdikbud.go.id



labbineka.kemdikbud.go.id



spai.kemdikbud.go.id



bipa.kemdikbud.go.id



ukbi.kemdikbud.go.id



petabahasa.kemdikbud.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Gambaran Umum	11
B. Dasar Hukum	12
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	13
D. Isu Strategis/Permasalahan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	25
A. Capaian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	26
B. Realisasi Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ...	83
BAB IV PENUTUP	93
 LAMPIRAN	
Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2019	
Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2019	
Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2019	
Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2019 (Revisi)	
Pengukuran Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2019	
Surat Keputusan Petugas Pelaporan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2019	
Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2019	



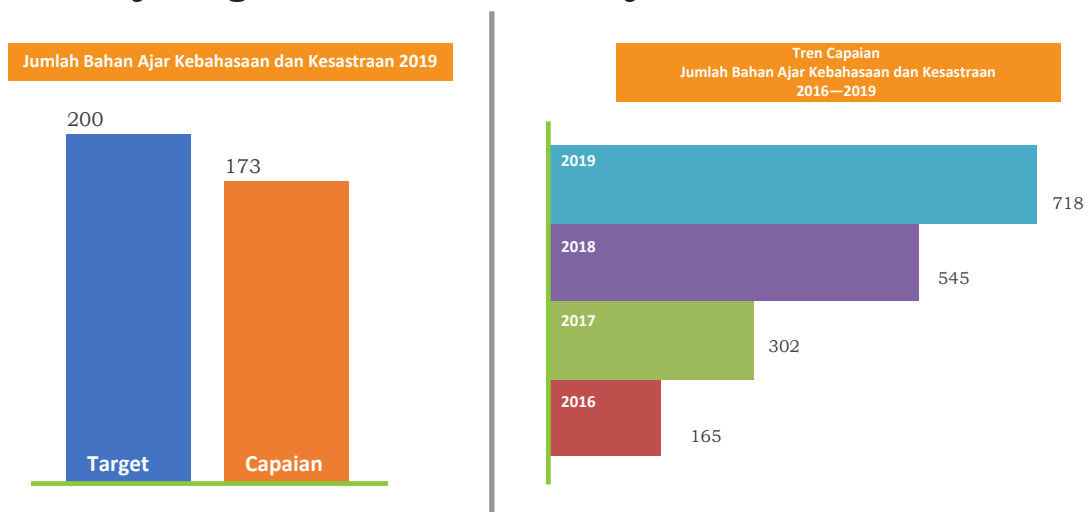
badanbahasa.kemdikbud.go.id



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) tahun 2019 menyajikan tingkat pencapaian enam sasaran program dengan sembilan indikator kinerja program sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, capaian kinerja BPP Bahasa adalah sebagai berikut.

Sasaran Program 1: Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca Indikator Kinerja Program 1: Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan



Hambatan dan permasalahan, antara lain:

- penyusunan buku belum memenuhi standar penilaian oleh Pusat Perbukuan, yaitu substansi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan;
- perencanaan penyusunan buku bacaan literasi belum sinkron dengan jadwal penilaian di Pusat Perbukuan sehingga aktivitas ini selesai pada akhir tahun;
- penyediaan buku bacaan literasi belum merata di seluruh Indonesia.

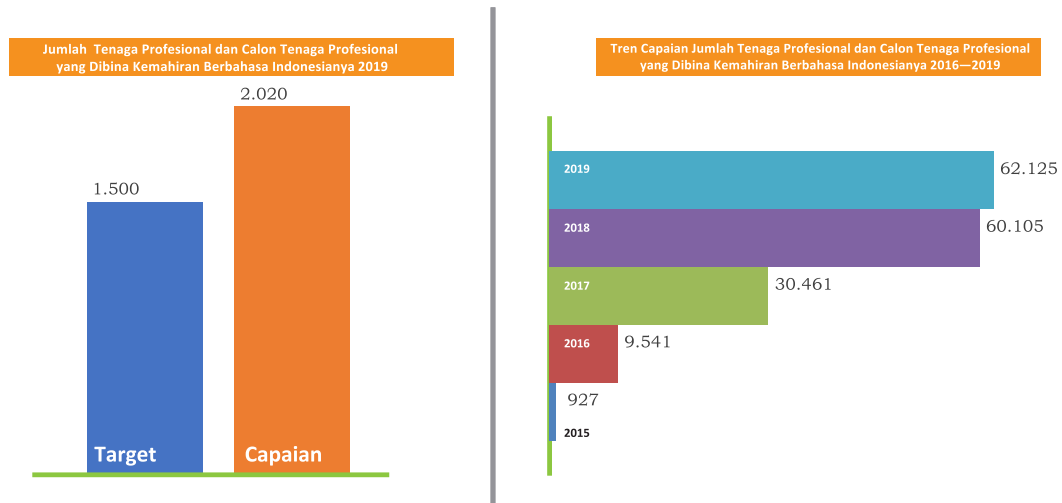
Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan itu antara lain sebagai berikut.

- Melakukan standardisasi buku literasi melalui penerapan pedoman GLN yang sudah dibuat dan beberapa pedoman literasi yang telah dibuat oleh Pusat Perbukuan.
- Menyesuaikan jadwal penilaian buku bacaan literasi sesuai dengan jadwal yang ada di Pusat Perbukuan.
- Memfokuskan pendistribusian buku bacaan ke wilayah 3T dengan sasaran SD, SMP, dan SMA, TBM, dan perpustakaan.



Sasaran Program 2: Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI

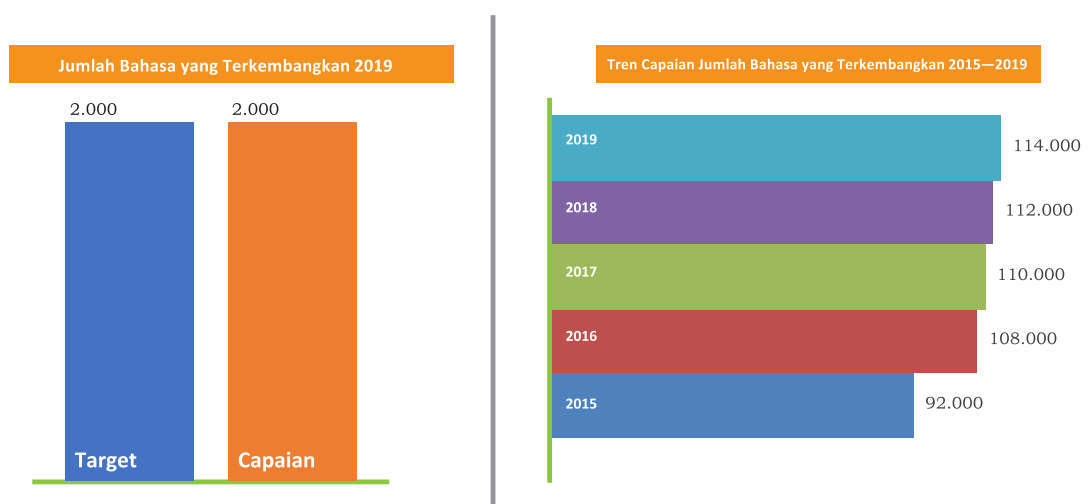
Indikator Kinerja Program 2: Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya



Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain kurangnya regulasi dan penyebarluasan informasi tentang pentingnya kemahiran berbahasa Indonesia pada setiap lapisan masyarakat. Beberapa langkah antisipasi yang diambil dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak tentang manfaat dan pentingnya Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

Sasaran Program 3: Meningkatnya Bahasa dan Sastra Berkembangkan dan Terlindungi

Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Bahasa yang Berkembangkan



Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target adalah sebagai berikut.

- Sumber daya manusia (SDM) yang masih membutuhkan pelatihan leksikografi



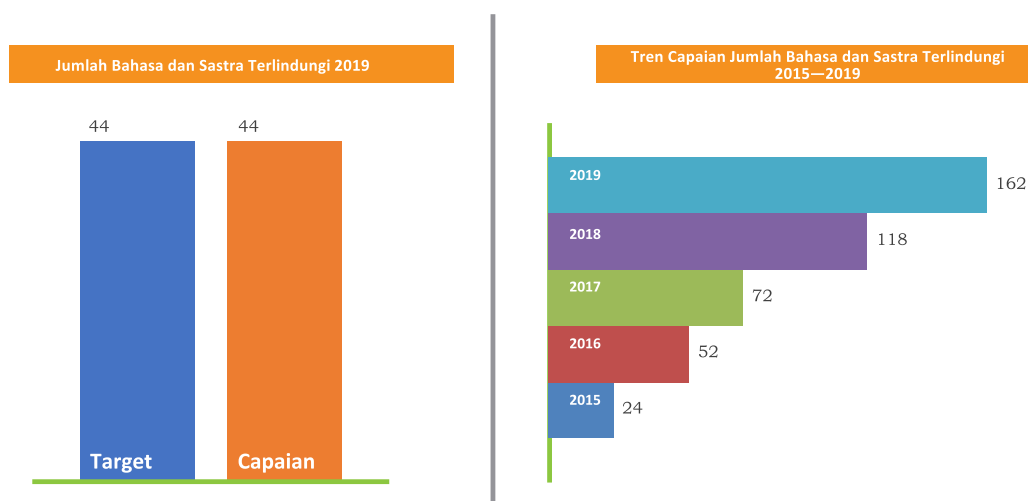
dan terminologi yang cukup, terutama SDM di Balai/Kantor Bahasa. Selain itu, jumlah SDM dari Balai/Kantor Bahasa yang minim mengakibatkan tim redaksi Balai/Kantor Bahasa berganti-ganti karena harus mengampu kegiatan lain yang cukup menyita waktu. Hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya kualitas usulan hasil inventarisasi kosakata yang diusulkan pada KBBI Daring oleh Balai/Kantor Bahasa.

- b. Sulitnya mencari pakar bidang ilmu/praktisi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan dan dapat mengikuti Sidang Komisi Istilah hingga selesai.
- c. Belum adanya SDM bidang teknologi, informatika, dan komunikasi (TIK) yang memiliki kemampuan mengolah pangkalan data, membuat aplikasi, membangun laman yang interaktif, dan menjaga keamanan data.

Adanya keterbatasan fasilitas pendukung dalam mendukung kegiatan pengembangan kosakata, seperti komputer, keterbatasan server, pencetak, pemindai, buku rujukan untuk pengayaan kosakata, dan sebagainya.

Untuk itu, BPP Bahasa melakukan koordinasi dan kolaborasi antara Balai/Kantor Bahasa dan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah (pemprov, pemkab/pemkot), perguruan tinggi, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat, tetap perlu digalakkan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan Balai/Kantor Bahasa dan perwakilan pemerintah daerah (Bappeda Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menangani program perlindungan bahasa dan sastra daerah. Pada tataran akademis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga perlu mendukung pembukaan program studi bahasa dan sastra daerah pada perguruan tinggi di daerah untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan pengajar bahasa dan sastra daerah.

Indikator Kinerja Program 4: Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi





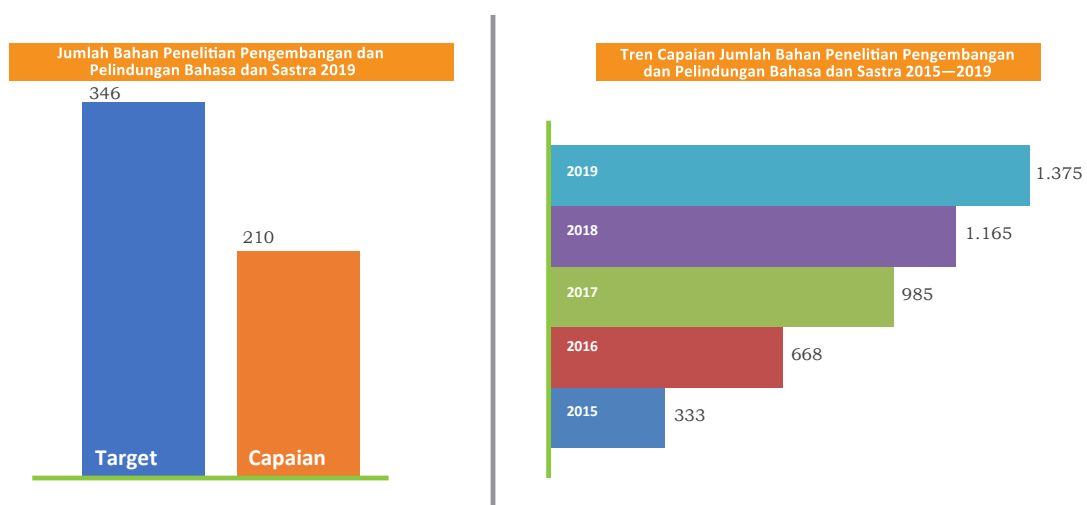
Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain adalah sebagai berikut.

- Koordinasi yang kurang lancar antara Pusat dengan UPT terkait kegiatan perlindungan bahasa dan sastra.
- Belum adanya kerja sama yang terjalin baik antara UPT dengan Pemda setempat dalam rangka perlindungan bahasa dan sastra daerah.
- Kurangnya kepedulian pemerintah/pegawai daerah terhadap pentingnya bahasa/sastra di daerah.
- Kurangnya minat kaum muda terhadap bahasa/sastra di daerahnya.
- Kurangnya kepercayaan tetua/maestro/pakar dalam menurunkan keahlian mereka kepada generasi muda.

Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dilakukan:

- koordinasi dan kolaborasi antara Balai/Kantor Bahasa dan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah (pemprov, pemkab/pemkot), perguruan tinggi, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat, tetap perlu digalakkan;
- pembentukan kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan Balai/Kantor Bahasa dan perwakilan pemerintah daerah (Bappeda Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menangani program perlindungan bahasa dan sastra daerah; dan
- mendukung pembukaan program studi bahasa dan sastra daerah pada perguruan tinggi di daerah untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan pengajar bahasa dan sastra daerah.

Indikator Kinerja Program 5: Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2018



Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

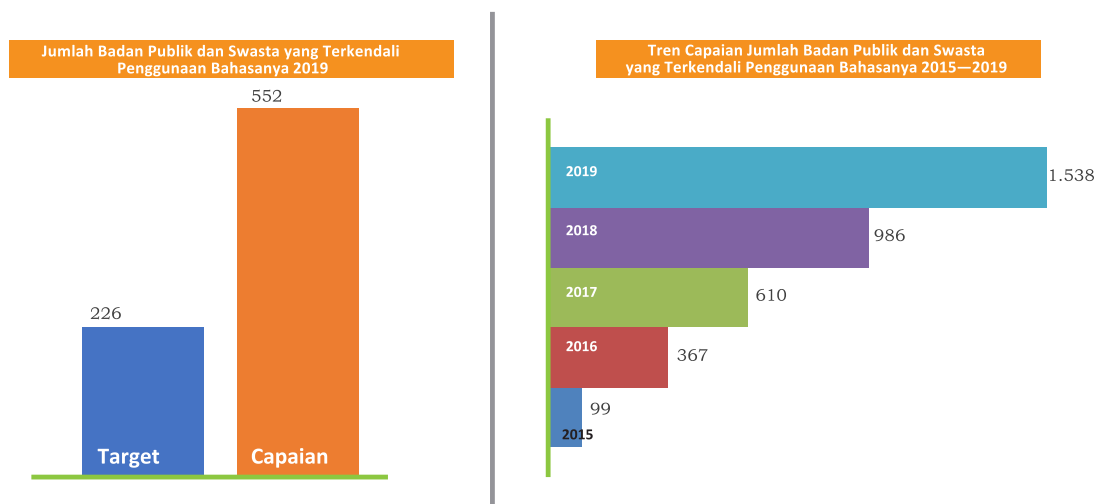
- kurangnya koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian kebahasaan dan kesastraan;
- konsultasi dengan narasumber kurang maksimal;
- waktu pelaksanaan penelitian yang kurang maksimal;
- waktu pelaksanaan penelitian ada yang tidak sesuai dengan jadwal semula karena adanya blokir anggaran terhadap beberapa tema penelitian.

Untuk itu, BPP Bahasa perlu melakukan beberapa hal terkait dengan hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2019 agar tidak terulang pada masa yang akan datang dengan melakukan:

- perlu koordinasi dengan berbagai pihak yang pemangku kepentingan dalam melakukan penelitian; dan
- penyusunan anggaran penelitian harus diperhitungkan secara presisi sehingga tidak ada anggaran yang terblokir pada tahun pelaksanaan sehingga pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Sasaran Program 4: Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Indikator Kinerja Program 6: Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya



Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut.

- Ketersebaran lembaga di Indonesia yang sangat luas memerlukan biaya dan energi untuk menjangkau dan melakukan program pengutamaan bahasa negara di berbagai lembaga.



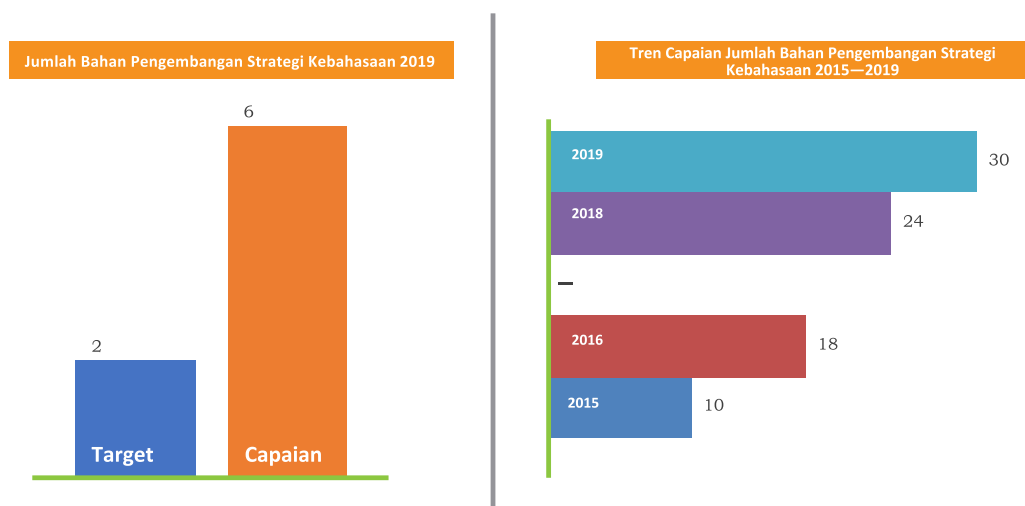
- b) Keterbatasan jumlah ahli bahasa di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- c) Perbedaan dukungan pemerintah daerah terhadap program pengutamaan bahasa negara di ruang publik.
- d) Adanya kendala teknis penyesuaian jadwal kegiatan dengan antara jadwal kegiatan dan kesediaan waktu insan media massa.

Beberapa langkah antisipasi yang diambil dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain

- a) memprioritaskan lembaga pengguna bahasa yang harus segera dikomunikasikan terkait penggunaan bahasa di ruang publiknya;
- b) meningkatkan pengetahuan dan wawasan ahli bahasa melalui program pendampingan;
- c) melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendukung program pengutamaan bahasa negara di ruang publik;
- d) menentukan jadwal kegiatan yang tepat dan memanfaatkan momen penting agar insan media massa dapat berperan aktif.

Sasaran Program 5: Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN

Indikator Kinerja Program 7: Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan



Hambatan dan permasalahan dalam pemenuhan IKP Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan, antara lain

- a. terbatasnya wawasan dan pengalaman sumber daya manusia terkait tugas diplomasi lunak yang diemban sehingga pedoman yang dihasilkan belum cukup mendalam menjawab kebutuhan lembaga, khususnya dalam menghasilkan

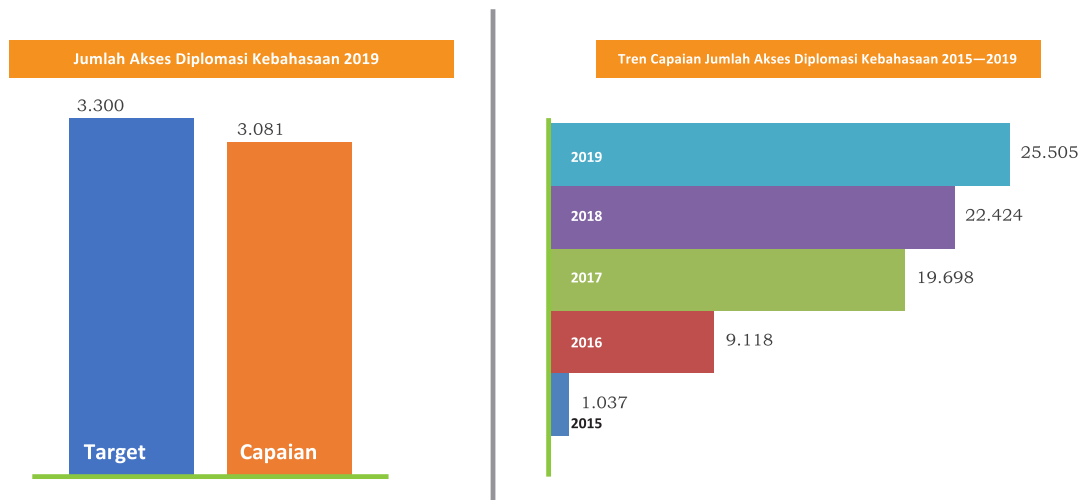


- cara/seni/upaya strategis terkait tugas diplomasi lunak melalui kebahasaan;
- b. terbatas referensi dan pustaka yang mendukung;
- c. luasnya kawasan sasaran sebagai populasi kajian pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan; dan
- d. terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mumpuni dan berpengalaman dalam penyusunan bahan diplomasi bahasa Indonesia untuk penutur asing.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan itu, di antaranya

- a. melakukan serangkaian kegiatan ilmiah, seperti studi pustaka mendalam sehingga hasil kajian dapat diturunkan dalam bentuk pedoman;
- b. membekali sumber daya manusia dengan peningkatan kemampuan metodologis agar hasil kajian relevan antara masalah, hipotesis, metode yang dipilih serta simpulan yang dihasilkan; dan
- c. peningkatan mutu kompetensi penulis bahan ajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing serta wawasan Ke-BIPA-an lainnya.

Indikator Kinerja Program 8: Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan.



Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKP Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan, antara lain, sebagai berikut.

- a. Kurang memadainya jumlah pengajar BIPA yang profesional jika dibandingkan dengan kebutuhan.
- b. Belum maksimalnya dukungan penginternasionalan bahasa Indonesia dari perwakilan pemerintah RI di beberapa negara dalam pengajaran bahasa Indonesia.
- c. Permasalahan klasik tentang penerbitan dokumen keberangkatan yang terlambat masih terjadi.

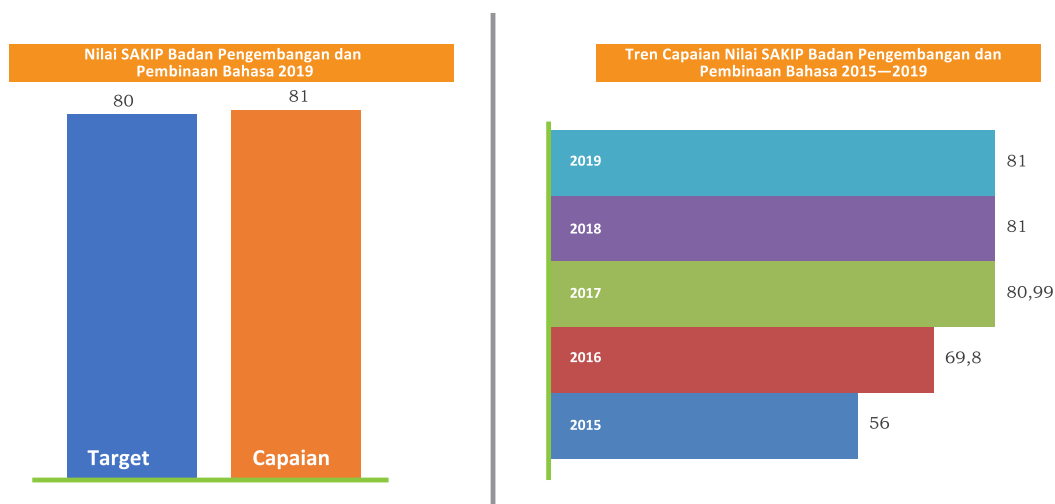


Adapun langkah-langkah antisipatif terhadap permasalahan yang ada agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain

- peningkatan jumlah dan mutu pengajar BIPA di dalam dan di luar negeri;
- pengembangan program dan/atau pusat pembelajaran BIPA di luar negeri;
- peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak secara kelembagaan ataupun individu di luar negeri;
- pengembangan jejaring dengan sumber daya yang potensial di luar negeri, seperti diaspora serta pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri; dan
- peningkatan penguatan dukungan kepada mitra dan sahabat Indonesia di luar negeri sebagai aset diplomasi lunak guna kepentingan Indonesia.

Sasaran Pogram 6: Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan

Indikator Kinerja Program 9: Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Hambatan dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut.

- Satker kurang memahami siklus dan alur perencanaan.
- Analisis satker dalam menentukan target dan kebutuhan anggaran tidak cermat.
- Koordinasi internal di masing-masing satker dalam hal pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tidak optimal.
- Satker belum optimal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.



- e. Koordinasi dan pengawasan petugas pengelola keuangan, petugas pelaporan, petugas SIMAK BMN dengan Kepala Satuan Kerja belum optimal sehingga masih terjadi ketidaklengkapan dalam penyampaian laporan keuangan.
- f. Laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan belum diinformasikan kepada analis kerugian negara BPP Bahasa sehingga menyebabkan penyelesaian berlarut-larut.
- g. Informasi yang disampaikan BPP Bahasa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas pelaporan keuangan satker.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan, yaitu sebagai berikut.

- a. Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan program dan anggaran kepada satuan kerja.
- b. Menyusun pedoman penyusunan program dan anggaran sebagai acuan satker dalam menyusun program dan anggaran.
- c. Melakukan peningkatan dan sosialisasi dan pendampingan SAKIP kepada petugas pelaporan satker.
- d. Meningkatkan komitmen pimpinan satuan kerja dan pembuat laporan keuangan.
- e. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pengelola keuangan secara berkala.
- f. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dengan pengelola keuangan satker.
- g. Merespon segera atas temuan dan ditindaklanjuti.



✓ sila dipindai



badanbahasa.kemdikbud.go.id



badanbahasa.kemdikbud.go.id



@BadanBahasa



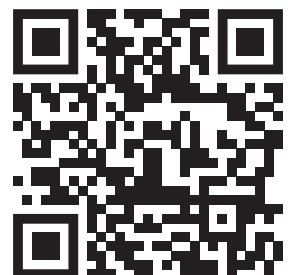
badanbahasakemdikbud



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa





BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) merupakan satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). BPP Bahasa merupakan organisasi Eselon I yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

BPP Bahasa
fokus untuk
menangani
persoalan
kebahasaan
dan kesastraan
di Indonesia

BPP Bahasa menjadi salah satu lembaga Kemendikbud tertua yang cikal-bakalnya sudah dirintis sebelum Indonesia merdeka. Sejak tahun 1930, BPP Bahasa fokus untuk menangani persoalan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Secara lengkap, perjalanan sejarah BPP Bahasa dapat dilihat melalui laman resmi BPP Bahasa: badanbahasa.kemdikbud.go.id.

Sejak 31 Desember 2015, BPP Bahasa dipimpin oleh Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jumlah SDM sebanyak 1277 orang. BPP Bahasa mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia.

BPP Bahasa menjalankan tugas dan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dalam PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, BPP Bahasa diberi amanah untuk melakukan (1) upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem



bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional; (2) pembinaan bahasa sebagai upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat; (3) pelindungan bahasa sebagai upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya; serta (4) peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019



12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Secara organisasi dan tata kelola, BPP Bahasa mengalami dua kali perubahan pada tahun 2019. Perubahan pertama dari Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan kedua dari Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan tersebut mengubah struktur organisasi BPP Bahasa. Pada Permendikbud Nomor 9 Tahun 2019, beberapa perubahan terjadi: (1) nomenklatur Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berubah menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; (2) penambahan Eselon II, yaitu Pusat Perbukuan sehingga BPP Bahasa memiliki lima Eselon II. Perubahan yang signifikan organisasi dan tata kerja terjadi pada perubahan kedua yang diatur dalam Permendikbud 45 Tahun 2019. Perubahan yang secara signifikan terdapat pada: (1) perampingan Eselon II BPP Bahasa semula lima menjadi tiga Eselon II (Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan dan Pusat Perbukuan dihapuskan); (2) perampingan struktur organisasi dengan meniadakan Eselon III dan IV.

Perubahan tersebut juga mengubah beberapa arah kebijakan utamanya terkait upaya penginternasionalan bahasa Indonesia seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2014 yang sejak tahun 2015 sudah dilaksanakan dengan berbagai upaya. Upaya penginternasionalan bahasa Indonesia yang dulu secara khusus menjadi tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, saat ini dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Sesuai dengan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada Pasal 242, BPP Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, BPP Bahasa menyelenggarakan

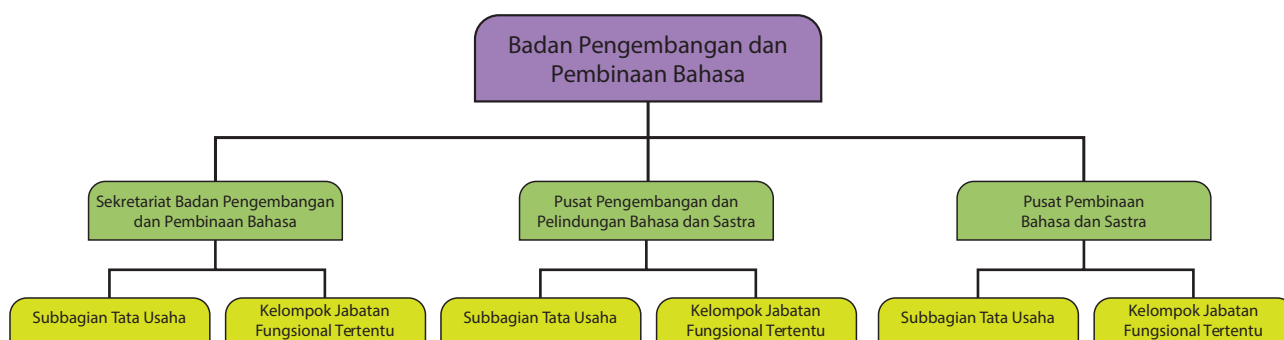
BPP Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra

fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia; (b) pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia; (c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia; (d) pelaksanaan

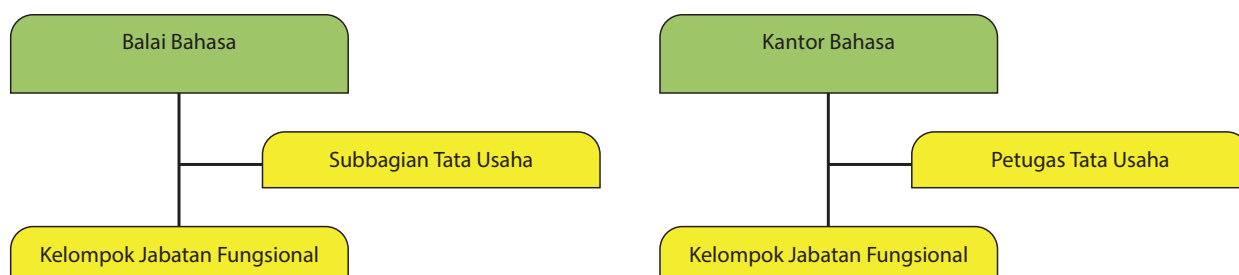
administrasi Badan; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA



UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI DAN KANTOR BAHASA



D. Isu Strategis/Permasalahan

Amanah UU 24 Tahun 2009 belum secara maksimal dapat dilaksanakan oleh BPP Bahasa. Persoalan kurang optimalnya koordinasi dengan unit utama lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih terjadi. Terkait dengan target tenaga pendidik yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal

Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) misalnya, BPP Bahasa tidak lagi diperbolehkan untuk menjadikan guru sebagai target kinerja. Sementara, BPP Bahasa sebagai salah satu unit utama yang turut bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di seluruh Indonesia berupaya terus melakukan peningkatan kemahiran berbahasa para pendidik. Dengan harapan, guru menjadi mahir penggunaan bahasa Indonesia dapat mendorong meningkatnya nilai UN bahasa Indonesia. Solusi yang ditawarkan dengan melakukan kerja sama terkait dengan tenaga pendidik belum dapat dilaksanakan oleh kedua unit utama karena kedua unit utama tidak memiliki sasaran strategis yang sama.

Guru menjadi mahir penggunaan bahasa Indonesia dapat mendorong meningkatnya nilai UN bahasa Indonesia.

Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian ialah persoalan terbatasnya anggaran perjalanan dinas untuk pelaksanaan penanganan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kepulauan. Hal tersebut menjadi penghambat pelaksanaan aktivitas yang membutuhkan perjalanan mengikat, misalnya pelaksanaan penyuluhan di wilayah kepulauan urung dilaksanakan sehingga pelaksanaannya diubah di ibukota provinsi. Persoalan tersebut berulang setiap tahun.

Selain itu, persoalan terkait perubahan Renstra yang termaktub dalam Permendikbud 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019, BPP Bahasa harus memetakan kembali capaian yang telah dilaksanakan sejak 2015—2018. Persoalan lain yang harus dihadapi oleh BPP Bahasa, *output* generik untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis (SS) “Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan BPP Bahasa” sulit diukur ketercapaiannya. Setiap indikator pada SS tersebut hanya menargetkan masing-masing satu layanan sehingga capaiannya sulit diukur.

Selain persoalan yang harus dituntaskan, BPP Bahasa juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan rendahnya serapan anggaran selama tahun anggaran (TA) 2015—2016 sedikit banyaknya berpengaruh terhadap kinerja Kemendikbud secara keseluruhan. Hal itu tentunya berdampak pada persepsi atas kinerja BPP Bahasa. Rendahnya penyerapan itu mendorong BPP Bahasa untuk terus memperbaiki diri untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran. Optimalisasi penyerapan berdampak positif sehingga pada tahun 2017 hingga tahun 2019, BPP Bahasa mampu menyerap anggaran 92,46%.



Enam Literasi dasar




Literasi Baca-Tulis
Literasi Numerasi
Literasi Sains

Literasi Finansial
Literasi Digital
Literasi Budaya dan Kewargaan

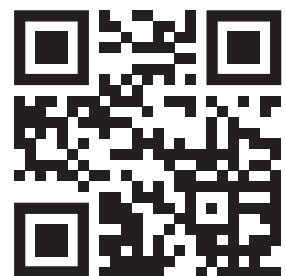
✓ sila dipindai

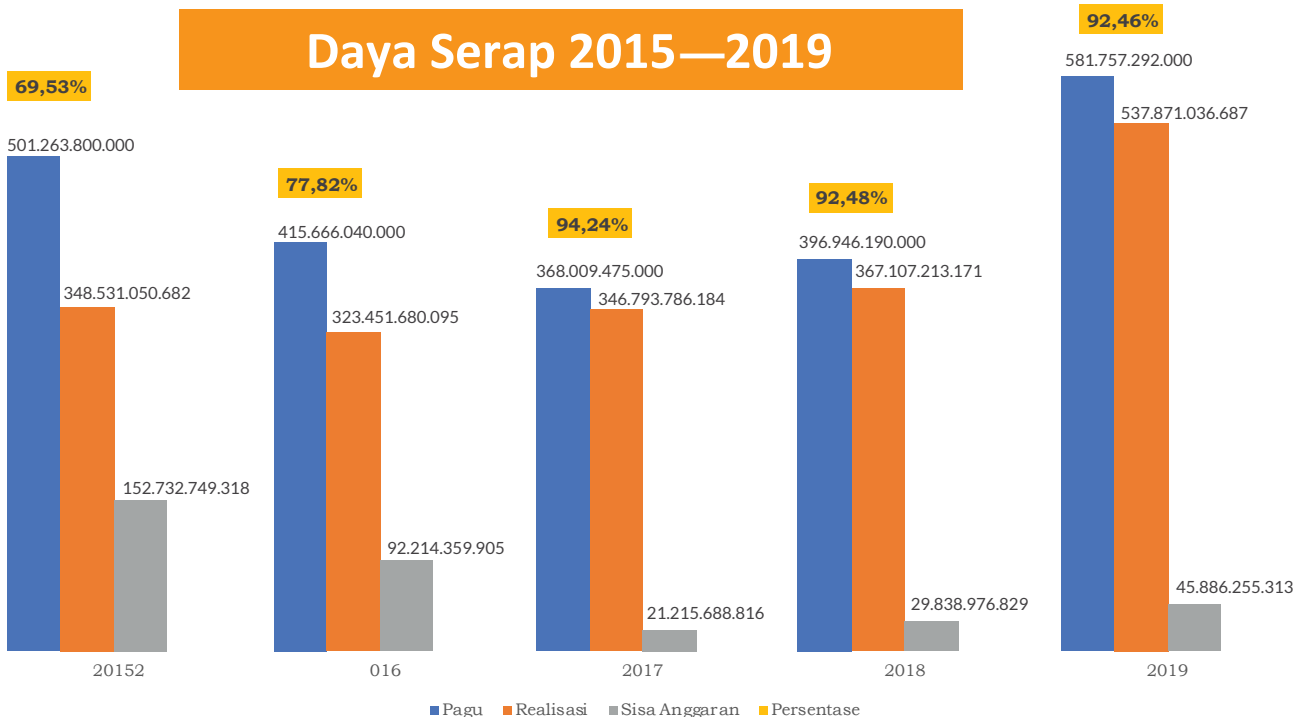


gln.kemdikbud.go.id

 badanbahasa.kemdikbud.go.id |  @BadanBahasa |  [badanbahasakemdikbud](https://www.instagram.com/badanbahasakemdikbud)

 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa |  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa





Tantangan berikutnya adalah penunjukan BPP Bahasa sebagai koordinator gerakan literasi di lingkungan Kemendikbud oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2017. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan Kepala BPP Bahasa untuk menjadi penggerak utama program literasi di lingkungan Kemendikbud, dengan BPP Bahasa menjadi koordinator utama. Kendati menjadi beban tambahan, instruksi tersebut merupakan tantangan baru bagi BPP Bahasa untuk mengemban kepercayaan dalam mendorong gerakan literasi yang lebih masif dan terorganisasi. Oleh karena itu, menjadi koordinator gerakan literasi yang kemudian diberi nama Gerakan Literasi Nasional, memberi tantangan baru bagi BPP Bahasa.

Tantangan lainnya adalah menggiatkan pencapaian prioritas program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, atau yang dalam nomenklatur perencanaan disebut Tujuh Program Prioritas. Tujuh Program Prioritas merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sebagai Pejabat Eselon I, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menerjemahkan rencana strategis (Renstra) BPP Bahasa 2015—2019 ke dalam tujuh fokus kegiatan. Ketujuh fokus tersebut adalah

1. BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing);
2. Kosakata Bahasa Daerah;
3. Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI);



4. Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Gerakan Literasi Nasional;
6. Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik;
7. Kamus dan Pengembangan Istilah.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, BPP Bahasa perlu merancang dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (rencana kerja pemerintah/RKP 2019) yang strategis dan sistematis dan rencana kerja (Renja 2019) dengan berdasarkan pada skala prioritas.

Dalam rancangan RKP 2019 dan Renja 2019, BPP Bahasa menyusun kerangka ini berlandaskan pada Renstra BPP Bahasa 2015—2019 (renstra awal berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015). Pada Januari 2019, *output* yang dihasilkan pada RKP 2019 harus disesuaikan dengan indikator baru yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018. Meskipun terdapat perubahan pada Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya, arah dan kebijakan strategis BPP Bahasa tidak ada perubahan. Arah dan kebijakan BPP Bahasa untuk memenuhi sasaran strategis pendidikan dan kebudayaan masih tetap sama seperti Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015, yakni

- a. meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing indonesia; dan
- b. meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

Sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diturunkan ke dalam Renstra BPP Bahasa, yakni

- a. meningkatnya jumlah judul buku pengayaan literasi baca;
- b. meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang mengikuti pengujian uji kompetensi bahasa Indonesia (UKBI);
- c. meningkatnya bahasa dan sastra berkembang dan terlindungi;
- d. meningkatnya pengendalian bahasa Indonesia di ruang publik;
- e. meningkatnya peran bahasa Indonesia melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan di tingkat ASEAN;
- f. menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan.

Permasalahan-permasalahan BPP Bahasa tahun 2019 dapat dirumuskan sebagai berikut:

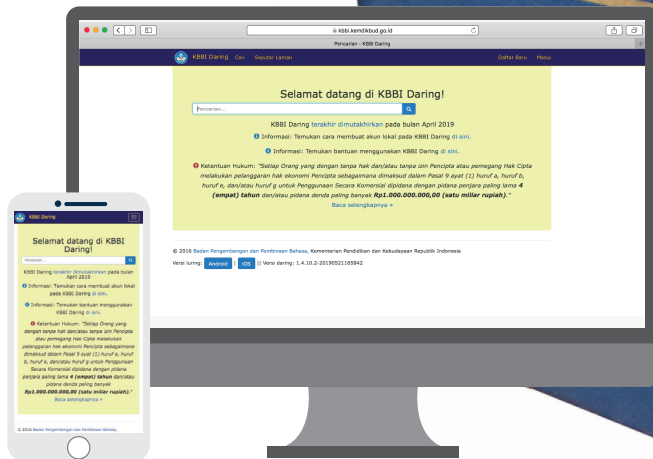
- a. masih rendahnya minat baca siswa;



- b. kurangnya ketersediaan bahan bacaan sebagai bahan pengayaan bahan ajar;
- c. minimnya upaya penjenamaan BPP Bahasa melalui produk-produk kebahasaan dan kesastraan;
- d. kurangnya jumlah kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terutama jika dibandingkan dengan kamus-kamus bahasa asing;
- e. rendahnya sumbangan bahasa daerah terhadap KBBI;
- f. rendahnya daya saing bahasa Indonesia terhadap bahasa asing;
- g. rendahnya sikap positif masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik;
- h. rendahnya perhatian masyarakat, khususnya pemerintah daerah, terhadap bahasa daerah dan sastra daerah yang semakin hari semakin terabaikan;
- i. kurangnya apresiasi masyarakat terhadap karya-karya sastra daerah, baik lisan maupun tulis;
- j. terbatasnya akses penutur asing terhadap bahasa Indonesia; dan
- k. kurangnya dokumentasi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia.

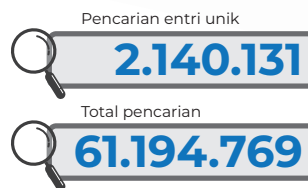
Pada tahun 2019, permasalahan-permasalahan tersebut masih menjadi fokus perhatian BPP Bahasa untuk ditangani secara rutin. Demi mencapai sasaran yang ditetapkan, diperlukan perencanaan program/kegiatan dan anggaran yang andal, pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran yang tertib dan disiplin, dan pemantauan serta pelaporan yang akuntabel. BPP Bahasa, yang memiliki 33 Satker baik pusat maupun daerah, berkewajiban menyusun program, kegiatan, dan penganggaran yang bertujuan untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu penanganan khusus.

Bukanlah persoalan mudah untuk menangani dan mengatasi berbagai permasalahan kebahasaan dan kesastraan di atas. Diperlukan sumber daya yang unggul dan mumpuni agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini memunculkan permasalahan berikutnya, yakni ketersediaan sumber daya manusia dan perangkat fasilitas pendukung. Secara struktural, UPT BPP Bahasa tersebar di 30 provinsi dengan komposisi jumlah SDM yang relatif kecil dan tidak seimbang antara satu UPT dengan UPT lainnya. Di samping itu, dukungan sarana dan prasarana juga masih sangat terbatas. Ini terlihat pada, misalnya 13 kantor bahasa yang masih belum memiliki gedung perkantoran. Dengan kata lain, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur/sarana dan prasarana tersebut menambah permasalahan tersendiri bagi BPP Bahasa dalam menjalankan tugas dan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Indonesia.



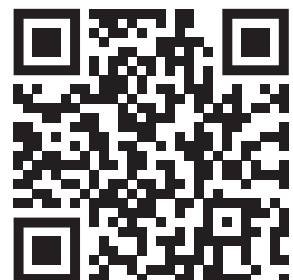
KBBI

Kamus Besar Bahasa Indonesia



Data per 28 Januari 2020

✓ silakan dipindai



kbbi.kemdikbud.go.id

badanbahasa.kemdikbud.go.id | [@BadanBahasa](https://twitter.com/BadanBahasa) | [badanbahsakemendikbud](https://www.instagram.com/badanbahsakemendikbud)

[f](#) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | [v](#) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



BAB II

PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015—2019:

Terwujudnya Insan Berkarakter dan Jati Diri Bangsa melalui Bahasa dan Sastra Indonesia.

Visi tersebut dapat dimaknai sebagai upaya BPP Bahasa dalam mendukung visi kementerian dalam membentuk insan pendidikan dan kebudayaan. Insan berkarakter dan berjati diri yang dimaksud dalam visi tersebut dimaknai sebagai insan yang memiliki karakter keindonesiaan dalam setiap bentuk kecerdasan yang diperoleh. Insan berkarakter keindonesiaan dalam kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosional dan sosialnya, kecerdasan intelektualnya, serta kecerdasan kinestetisnya. Sarana yang dikembangkan, dibina, dan dilindungi dalam mendukung visi kementerian adalah sarana bahasa dan sastra.

Terwujudnya Insan Berkarakter dan Jati Diri Bangsa melalui Bahasa dan Sastra Indonesia

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan misi, yakni

- a. meningkatkan mutu kebahasaan dan pemakaiannya;
- b. meningkatkan keterlibatan peran kebahasaan dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan;
- c. meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- d. meningkatkan peran aktif diplomasi dalam internasionalisasi kebahasaan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 telah ditetapkan tujuan strategis pembangunan pendidikan yang berkaitan dengan



Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Bahasa Indonesia serta Pemakaian Bahasa sebagai Sarana Pencerdasan Bangsa

penanganan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia termaktub dalam Tujuan 5 (T5), yaitu Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.

Tujuan strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah **Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Bahasa Indonesia serta Pemakaian Bahasa sebagai Sarana Pencerdasan Bangsa.**

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis tersebut diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya sebagai penghela iptek dan penguat daya saing Indonesia.
2. Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

Tujuan strategis dan sasaran strategis 2015—2019 dicapai dengan menggunakan strategi pencapaian sebagai berikut.

1. Penguatan regulasi dalam pengelolaan bahasa dan sastra.
2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan dengan fokus padaelibatan publik dan pemanfaatan media baru.
3. Peningkatan mutu berbahasa melalui inovasi pembelajaran bahasa pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
4. Penguatan jejaring dan kerja sama kebahasaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
5. Peningkatan promosi kebahasaan untuk peluasan wilayah pakai bahasa Indonesia di luar negeri.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2019. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2019.



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Program		Target	Anggaran	
					Semula	Menjadi
1	Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca	1	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	200 Bahan Ajar	16.905.343.000	20.807.476.000
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya	1.500 Orang	124.208.569.000	99.792.229.000
3	Meningkatnya Bahasa dan Sastra Terkembangkan dan Terlindungi	1	Jumlah Bahasa Terkembangkan	2.000 Kosakata	12.194.830.000	14.034.606.000
		2	Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	44 Bahasa dan Sastra	7.316.858.000	3.640.343.000
		3	Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	346 Naskah	22.758.869.000	16.467.658.000
4	Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1	Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	226 Lembaga	78.415.006.000	48.914.508.000
5	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN	1	Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	2 Naskah	9.016.568.000	3.607.228.000
		2	Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	3.300 Orang		21.006.490.000
6	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan	1	Nilai SAKIP Badan Pengembangandan Pembinaan Bahasa	80	298.641.391.000	353.423.754.000



UKBI

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia



UKBI adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa lisan dan tulis.

UKBI dapat mengukur kemahiran reseptif, produktif, dan pengetahuan dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia.

Materi UKBI berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah komunikasi dan laras bahasa. Materi itu bersumber dari wacana lisan sehari-hari di masyarakat serta wacana tulis di tempat umum, media massa, buku bacaan, dan sebagainya.

✓ sila dipindai



ukbi.kemdikbud.go.id

badanbahasa.kemdikbud.go.id | @BadanBahasa | badanbahasakemdikbud

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA



Tahun ini, Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) memasuki babak akhir periode 2015—2019. Target yang telah ditentukan dalam renstra akan disampaikan capaiannya per tahun beserta akumulasinya dalam BAB ini seiring dengan uraian capaian

BPB Bahasa berupaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, maupun penggunaan anggaran

tahun 2019. Pada Bab ini juga akan diuraikan langkah, strategi, dan hambatan dalam upaya merealisasikan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. BPB Bahasa berupaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, maupun penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban itu disampaikan secara konsisten setiap tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dapat dijadikan sebagai (1) bahan evaluasi kinerja lembaga; dan (2) bahan pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024. Berikut ini capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



A. Capaian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sesuai Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan enam sasaran program dan sembilan indikator kinerja program. Berikut informasi capaian kinerja BPP Bahasa pada 2019 serta tahapan capaian yang diperoleh selama lima tahun, 2015—2019.

Sasaran Program 1: Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca

BPP Bahasa
berupaya tetap
“mendekat”
ke dunia
pendidikan dan
ikut “mendorong”
majunya dunia
pendidikan

SP Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca serta IKP Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan merupakan hasil revisi atas SP Meningkatnya Skor PISA di Tahun 2019 sebesar 414. Terkait dengan hasil pengukuran *Programme for International Student Assessment (PISA)*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sudah melakukan berbagai upaya,

termasuk dengan bekerja sama dengan Puspendik. Selain itu, BPP Bahasa juga telah melakukan penyusunan soal-soal yang serupa dengan tes *PISA* dan melakukan uji coba ke beberapa sekolah. Revisi tersebut sangat disayangkan karena *PISA* sampai saat ini masih menjadi alat ukur atau indikator satu-satunya yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi membaca di Indonesia. Bappenas juga terus mendorong agar kemampuan literasi siswa, tidak hanya membaca, tetapi juga matematika dan sains, untuk terus ditingkatkan. Untuk itu, BPP Bahasa melakukan upaya lain agar dapat melakukan intervensi peningkatan kemampuan literasi membaca siswa, meskipun tidak secara langsung. Melalui SP Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca, BPP Bahasa berupaya tetap “mendekat” ke dunia pendidikan dan ikut “mendorong” majunya dunia pendidikan.

Tingkat ketercapaian SP tersebut salah satunya diukur melalui IKP Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan. Pencapaian IKP tersebut dilakukan melalui penyediaan buku bacaan literasi. Penyediaan buku bacaan literasi untuk menjalankan amanah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang mendorong pembiasaan 15 menit sebelum belajar dengan membaca buku-buku yang dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa. Bahan bacaan tersebut ditujukan untuk satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Selaras dengan itu, BPP Bahasa ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai koordinator Gerakan Literasi Nasional (GLN) sejak tahun 2016.



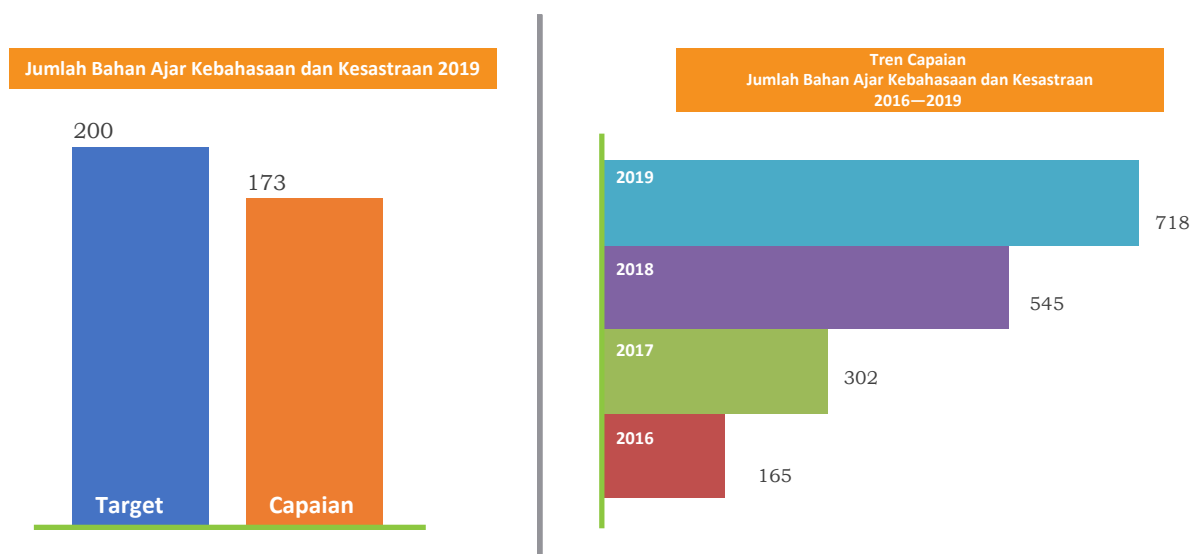
Indikator Kinerja Program 1: Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan

IKP Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan dicapai melalui penyusunan Bahan Bacaan Pengayaan Pelajaran Bahasa Indonesia. Tahapan capaian kinerja pada Tahun 2016—2019 dicapai dengan melakukan berbagai upaya, yaitu:

- sayembara dan atau penunjukan langsung penulis bahan bacaan literasi;
- pertemuan penulis sebagai wadah perbaikan naskah dengan juri dan hasil uji keterbacaan;
- uji keterbacaan ke beberapa daerah yang mewakili sasaran pembaca;
- penyuntingan dan pengatakan naskah;
- penilaian tahap awal oleh Pusat Perbukuan;
- perbaikan penulisan berdasarkan hasil penilaian Pusat Perbukuan;
- penyelarasan akhir melalui tahap penyuntingan dan pengatakan;
- penilaian tahap akhir oleh Pusat Perbukuan;
- pencetakan buku bacaan literasi;
- pengalihwahan buku bacaan literasi ke dalam bentuk animasi, dokudrama, dan buku digital; dan
- pendistribusian buku bacaan literasi.

Berikut ini capaian IKP Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan.

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
					Target	Realisasi	%		
1. Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	-	165	137	243	200	173	86,5%	600	718

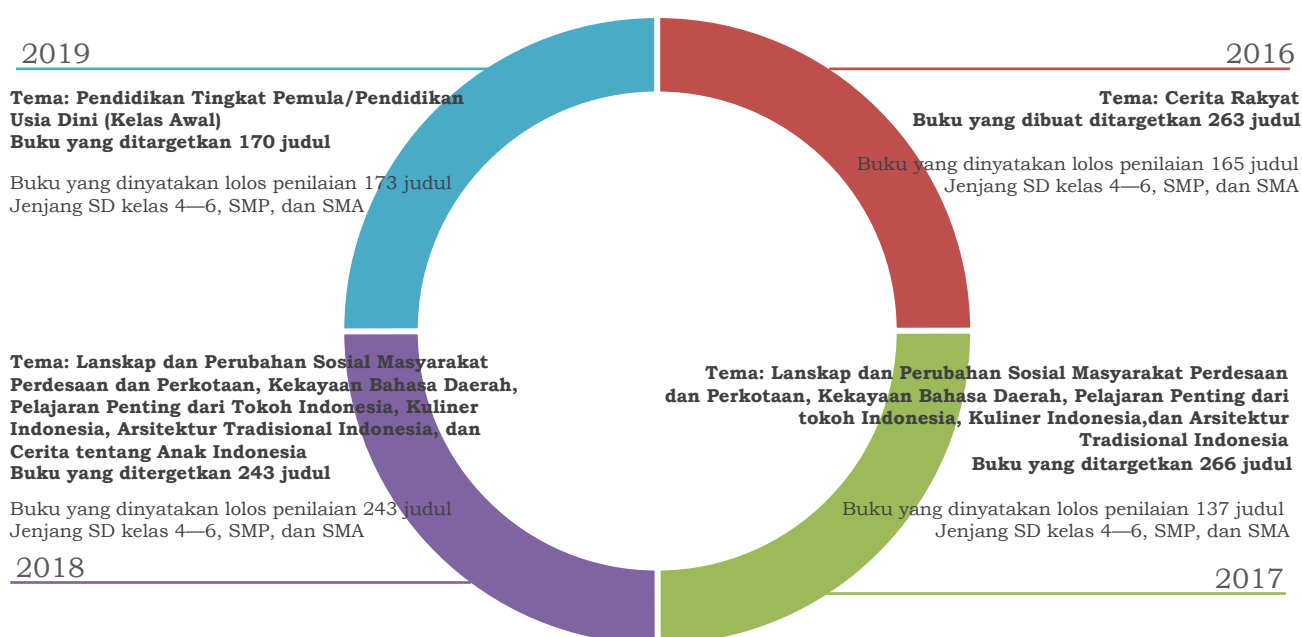


Capaian BPP Bahasa terkait dengan target capaian renstra tercapai dengan baik, dari 600 judul buku tercapai 718 judul buku yang lolos sebagai buku nonteks



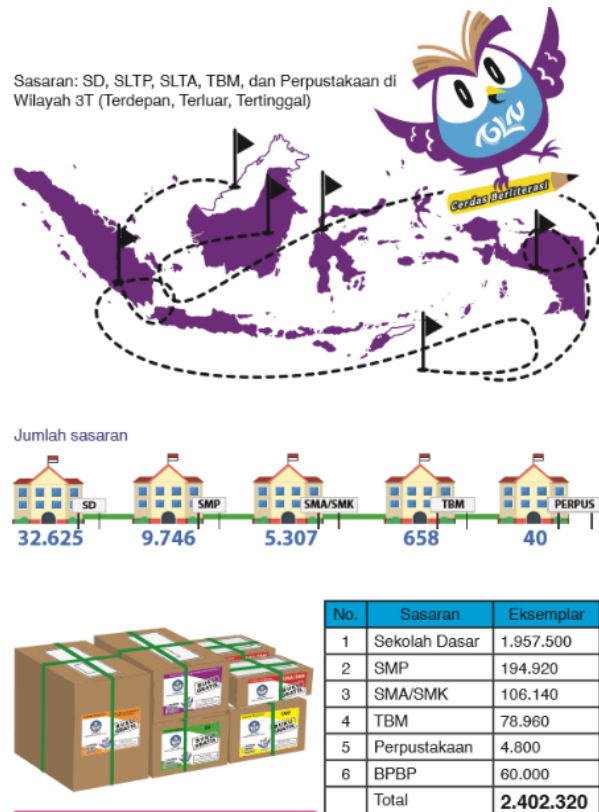
pelajaran bahasa dan sastra oleh Pusat Perbukuan (Pusbuk) sebagai lembaga penilai buku. Secara akumulatif capaian 2016—2019 telah target renstra sebesar 119,7% atau 718 dari 600 judul buku yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, capaian indikator ini belum tercapai, hanya 86,5% atau tercapai 173 dari 200 judul buku yang ditargetkan. Judul buku yang masuk ke penilaian Pusat Perbukuan sebanyak 218 judul buku. Capaian 173 judul buku itu diperoleh melalui seleksi penulis yang dilakukan oleh seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa. Target tahun 2019 telah melebihi target peta jalan penyediaan buku bacaan literasi yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 170 judul. Berikut ini peta jalan penyediaan buku bacaan literasi beserta jenjang pendidikan yang disasar pada 2016—2019.

Peta Jalan Penyediaan Buku Bacaan Literasi 2016—2019



Upaya BPP Bahasa ini memang belum secara signifikan dapat menyasar langsung meningkatnya literasi membaca siswa. Sejak menjadi koordinator Gerakan Literasi Nasional (GLN), BPP Bahasa berharap melalui GLN dapat memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan serta membudayakan literasi di Indonesia. Harapan lain, gerakan ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, mulai dari ranah keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat yang terintegrasi, tidak parsial, sendiri-sendiri, atau ditentukan oleh kelompok tertentu. Gerakan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi sangat penting untuk memastikan dampak positif dari gerakan peningkatan daya saing bangsa.





BPP Bahasa belum dapat melakukan seperti harapan yang telah disampaikan. Penyebaran atau distribusi buku yang dilakukan BPP Bahasa pun belum menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. BPP Bahasa hanya berfokus pada wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (wilayah 3T) untuk pengiriman hasil penyediaan bahan bacaan pengayaan literasi.

Pada tahun 2019 ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan pencetakan dan pengiriman 2.402.320 eksemplar buku dari 60 judul bahan bacaan literasi ke 2.258.560 sekolah di berbagai jenjang, 658 Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta 40 perpustakaan yang berada di wilayah 3T yang tersebar di 27 provinsi. Buku-buku literasi terbitan BPP Bahasa yang dicetak telah melalui tahap seleksi dan uji kelayakan buku oleh Pusat Perbukuan. Muatan pada buku literasi tersebut telah sesuai dengan standar serta mengandung konten yang mampu menumbuhkan budi pekerti siswa, seperti buku cerita anak atau dongeng lokal, buku biografi inspiratif tentang tokoh lokal atau anak bangsa yang berprestasi, dan buku sejarah yang menebalkan rasa cinta tanah air. 60 judul buku yang didistribusikan merupakan bacaan literasi nonteks pelajaran yang difokuskan untuk jenjang: (1) SD, termasuk kelas awal (30 judul); SMP (20 judul); dan SMA (10 judul). 60 judul buku yang terpilih untuk didistribusikan telah lulus Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Berikut ini judul buku dan penulisnya.



No.	Judul Buku	Penulis	No.	Judul Buku	Penulis
1	Beras Tabanan: Perjalanan dari Lumpur hingga Dapur	I Gusti Made Dwi Guna	31	Jejak Rasa dari Yogyakarta	Agustina Dwi Rahayu
2	Deli dan Teteruga Kampung Bahari	Imam Arifudin	32	Anak Guo	Desti Natalia
3	Obet Si Anak Bahari Petualangan Anak-Anak dari Kampung Biga Raja Ampat	Ikhsan Nugraha	33	Seruling Peninggalan Abah	Ridwan
4	Jangan Ambil Rumah Kami	Erminawati	34	Tokoh Indonesia yang Gemar Membaca Buku	Eri Sumarwan
5	Bung Sultan Raja Pejuang Republik Indonesia	Yayan Rika Harari	35	Randu	Tria Ayu K.
6	Belajar dari Makanan Tradisional Jawa	Dawud Achroni	36	Ramang Legenda Bola Indonesia	Fitrawan Umar
7	Kakek Bali Memasak	Ni Kadek Heny Sayukti	37	Cerita dari Lembah Baliem	Dzikri El Han
8	Pecel Rengkek Jombang	Kiki Ratnaning	38	Tokoh Seni Idolaku	Norratri
9	Perjuangan Cemplon	Fahrudin	39	Mengenal Arsitektur Tradisional Indonesia	Arifin Suryo Nugroho
10	Kue Kejujuran dan Cerita Cerita Kuliner Lainnya	Esti Asmalia	40	Mari Mengetahui Bahan Makanan Pokok Pengganti dari Nusantara	Redy Kuswanto
11	Terjebak di Negeri Jajan	Suyitman	41	Kawa Daun	Zulfitra
12	Cerpen dan Dongeng Minuman Nusantara	Suyitman	42	Asal Usul Tanjung Penyusuk Cerita Rakyat dari Bangka Belitung	Dwi Oktarina
13	Jajanan Tradisional Asli Indonesia	Paskalina Oktavianawati	43	Legenda Batu Babi dan Anjing Cerita Rakyat dari Kalimantan Tengah	Noor Hadi
14	Nyoman Nuarta Pematung Internasional yang Pantang Menyerah	I Gusti Made Dwi Guna	44	Lipi Poleng Tana Lot Cerita Rakyat dari Bali	I Nyoman Argawa
15	Si Saloi yang Cerdik Cerita Rakyat dari Kalimantan Barat	Syarifah Lubna	45	Legenda Condet Cerita Rakyat dari DKI	Azhar
16	Mengenal Rancang Bangun Rumah Adat di Indonesia	Faris Al Faisal	46	Legenda Naya Sentika Cerita Rakyat dari Jawa Tengah	Umi Farida
17	Luki dari Ujung Negeri	Imam Arifudin	47	Indrasakti Cerita Rakyat dari Sumatra Utara	Sahril
18	Lanskap Negeri Saman	Rismawati	48	Burung Kekekow dan Gadis Miskin Sulawesi Utara	Sri Diharti
19	Kuliner Yogyakarta Cerita di Balik Nikmatnya	Rifqa Army	49	Karang Melenguh Cerita Rakyat dari Sumatra Barat	Eva Krisna
20	Koki Kumis dan 5 Cerita Kuliner	Mustajab	50	Sapan Didiah Cerita Rakyat dari Sumatra Barat	Joni Syahputra
21	Permainan Tradisional Anak Nusantara	Rizky Yulita	51	Habis Galau Terbitlah Gemilang	Ratih Ayu Apsari
22	Pijar dan Wangi Jajanan Sehat	Laxmi Mustika Cakrawati, Fatyana Rachma Saputri, Ni Kadek Heny Sayukti	52	Perempuan Pengibar Sang Saka	Lilik Handoko
23	Rumah Adat Nusantara	Intania Poerwaningtyas dan Nindya K Suwanto	53	Mengenal Kecerdasan Ruang	Muhaimin
24	Kisah Dewi Samboja Cerita Rakyat dari Jawa Barat	Nia Kurnia	54	Putri Serindu Hati dan Perbimbang Cerita Rakyat dari Bengkulu	M. Yusuf
25	Sumur Keramat Jati Herang Cerita Rakyat dari Banten	Widowati Sumardi	55	Arsitektur Rumah Tradisional Aceh	Herman R. N.
26	Siriway Warry Cerita Rakyat dari Papua	Esther Embram	56	Kain Songket Mak Engket	Wylvera Windayana
27	Kisah Si Pego Cerita Rakyat dari Kalimantan Timur	Dwi Hariyanto	57	K.H. Mustofa Kamil Sang Pendekar dari Kota Intan	Budi Suhardiman
28	Si Dayang Rindu Cerita Rakyat dari Lampung	Dian Anggraini	58	Aku Ingin Sekolah Kisah Anak Suku Sakai	Fatmawati Adnan
29	Vuyul Punsu Negugun Cerita Rakyat dari Sulawesi Tengah	Siti Rahmah	59	Bakti Muda untuk Negara	Agustin Anggriani
30	Pangeran Purbaya dan Rakasasa Jin Sepanjang Cerita Rakyat dari DIY	Herry Mardiyanto	60	Jejak Penjaga Zaman Cerita Para Tokoh dalam Berbagai Peristiwa dalam Mengalahkan Kegagalan	Yulianti Kaspul

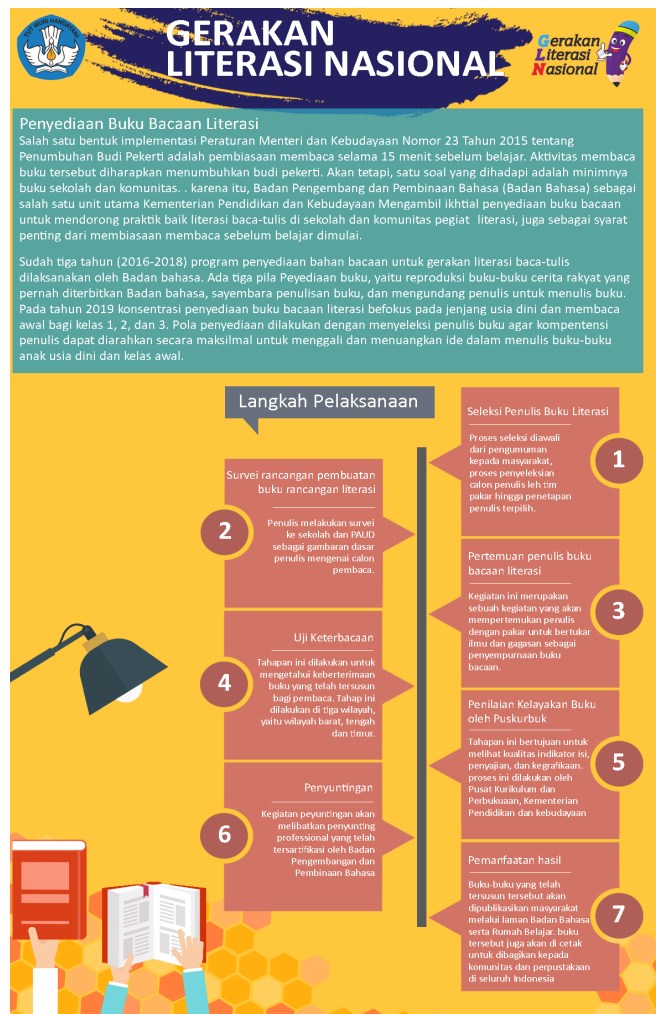


Secara jumlah dan mutu buku bacaan literasi, pada tahun 2019, BPP Bahasa berupaya untuk berinovasi dalam pencapaiannya, yaitu dengan memperkaya tema-tema bacaan untuk jenjang pendidikan usia dini dan kelas awal.

Perkembangan tema buku bacaan literasi dari 2016 sampai dengan 2019 berawal dari hanya menggali kekayaan daerah melalui cerita rakyat berkembang menjadi tema-tema lanskap dan perubahan sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan, kekayaan bahasa daerah, pelajaran penting dari tokoh Indonesia, kuliner Indonesia, dan arsitektur tradisional Indonesia, serta tema cerita tentang anak Indonesia.

Berikut ini adalah testimoni penerima manfaat dari beberapa rangkaian penyediaan bahan bacaan literasi.

1. *“Khusus untuk mengikuti seleksi GLN, ya naskah mesti beda. Artinya ada kekhasan dari tulisan kita. Konten cerita yang kita angkat harus unik dan sebisa mungkin memuat unsur semangat literasi. Rancangan naskah saya yang diterima (Belajar Bisa di Mana Saja) bercerita tentang anak-anak jalanan yang membuat sekolah pohon di pantai tanah beru, Bulukumba”, ungkap Andi Makkaraja (Sumber: WarnaSulsel.com, dikutip dari laman <https://warnasulsel.com/4-penulis-asal-sulsel-terpilih-jadi-penulis-bahan-bacaan-literasi-baca-tulis-kemendikbud-2019/> pada tanggal 21 Mei 2017)*
2. *Tak kurang dari 6 orang kader FLP terpilih mengikuti Pertemuan Penulis Bahan Bacaan Literasi Baca-Tulis tahap II di Jakarta, pada 17—19 Oktober 2018. Di antaranya terdapat kader dari FLP Cabang Medan, Staf Divisi Advokasi BPP FLP Wylvera Windayana, Lita dari FLP Cabang Malang, Kepala Divisi Karya BPP FLP S Gegge Mappangewa, Tika dari FLP Cabang Malang, dan Staf Divisi Karya BPP FLP Fitrawan Umar. Keenam penulis FLP itu menjadi bagian dari total 129 penulis yang memenangkan anugerah sayembara penulisan bahan bacaan. Dalam acara itu, turut hadir pegiat literasi kenamaan tingkat nasional, Gol A Gong, yang juga anggota Dewan Penasihat FLP. (Sumber: Admin Forum Lingkar Pena, dikutip dari laman FLP di <https://flp.or.id/kader-flp-terpilih-mengikuti-pertemuan-penulis-bahan-bacaan-literasi/>, pada tanggal 19 Oktober 2018)*





Meskipun penyediaan bahan bacaan literasi dapat tercapai dengan baik, beberapa kendala juga ditemui dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2015—2016, IKP Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan belum menjadi target yang ditetapkan pada Renstra (Permendikbud 22 Tahun 2015). Setelah Permendikbud 12 Tahun 2018 terbit, BPP Bahasa baru menargetkan pada IKP Jumlah .

Hambatan dan permasalahan, antara lain:

- penyusunan buku belum memenuhi standar penilaian oleh Pusat Perbukuan, yaitu substansi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan;
- perencanaan penyusunan buku bacaan literasi belum sinkron dengan jadwal penilaian di Pusat Perbukuan sehingga aktivitas ini selesai pada akhir tahun;
- penyediaan buku bacaan literasi belum merata di seluruh Indonesia.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan itu antara lain sebagai berikut.

- Melakukan standardisasi buku literasi melalui penerapan pedoman GLN yang sudah dibuat dan beberapa pedoman literasi yang telah dibuat oleh Pusat Perbukuan.
- Menyesuaikan jadwal penilaian buku bacaan literasi sesuai dengan jadwal yang ada di Pusat Perbukuan.
- Memfokuskan pendistribusian buku bacaan ke wilayah 3T dengan sasaran SD, SMP, dan SMA, TBM, dan perpustakaan.



Pertemuan Penulis Bahan Bacaan Literasi Baca-Tulis

Sasaran Program 2: Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

SP Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) serta IKP Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya merupakan hasil revisi renstra agar BPP Bahasa tidak

menyasar target terkait dengan pendidik yang menjadi tugas dan fungsi unit utama lain. Oleh karena itu, BPP Bahasa mengubah dua IKP Jumlah Pendidik yang Memiliki Predikat Kemahiran UKBI Unggul dan Jumlah Pendidik Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra yang semula dijadikan indikator dalam mencapai SP Meningkatnya Skor PISA di Tahun 2019 sebesar 414.

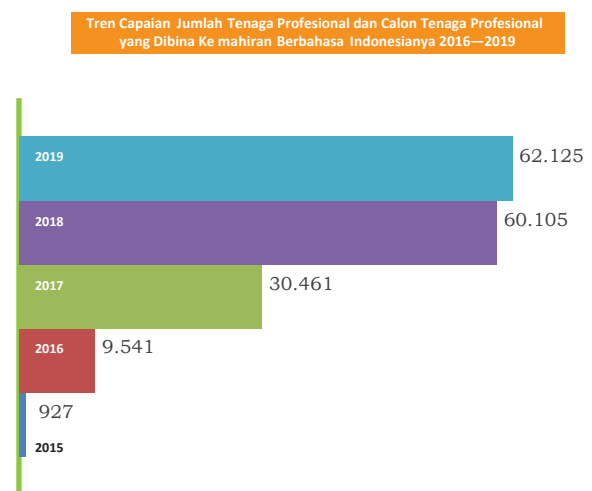
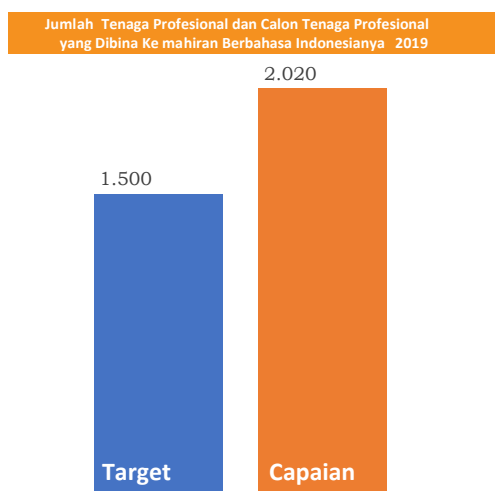
Indikator Kinerja Program 2: Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesiannya

SP Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI dicapai melalui kegiatan Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Guna mencapai SP tersebut, BPP Bahasa berupaya terus meningkatkan pelayanan UKBI melalui strategi sebagai berikut.

- Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional.
- Penjajakan pendirian Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI) dan Sosialisasi UKBI di luar negeri.
- Penguatan jejaring kemitraan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
- Pemutakhiran sistem UKBI daring sebagai penunjang pelaksanaan pengujian UKBI di luar negeri.

Berikut ini capaian IKP Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesiannya.

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
					Target	Realisasi	%		
2. Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesiannya	927	8.614	20.920	29.644	1.500	2.020	134,7%	41.434	62.125





Capaian IKP Tumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya lebih dari 100% dari target yang ditetapkan. Target tersebut merupakan dampak besarnya minat masyarakat terkait dengan kegiatan pembinaan kemahiran berbahasa Indonesia. Kegiatan tersebut serempak dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui dua aktivitas: aktivitas Layanan Sosialisasi dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Permintaan Lembaga. Aktivitas pelayanan UKBI terdiri atas dua pelayanan: sosialisasi tes UKBI dan pengujian. Layanan sosialisasi UKBI dibiayai oleh APBN. Sasaran calon peuji dan peuji terdiri atas calon tenaga profesional dan tenaga professional. Rangkaian layanan sosialisasi tes UKBI dimulai dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kemahiran berbahasa dan diakhiri dengan tes UKBI. Layanan sosialisasi juga bertujuan untuk mengenalkan, memetakan kemahiran, dan mengembangkan soal UKBI. Sementara itu, aktivitas pelayanan pengujian UKBI dilakukan dengan mekanisme PNPB sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2016 tentang Penetapan Tarif PNPB di Lingkungan Kemendikbud.

Meskipun terlihat tidak berimbang antara target dan capaian, pada kenyataannya capaian tersebut lebih banyak diperoleh dari segi kuantitas saja. Perubahan Renstra BPP Bahasa dan Kemendikbud pada pertengahan tahun 2018 ikut serta mengubah target pada indikator ini: yang semula fokus pada pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul menjadi tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang dibina kemahiran berbahasa Indonesianya. Perlu diketahui, untuk memperoleh pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul sangatlah tidak mudah. Seorang pendidik harus lulus dengan skor 525—674 (predikat unggul) sehingga memerlukan banyak target agar tercapai target yang ditetapkan 1.500 orang per tahunnya.

Berbeda dengan target pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul, untuk membina tenaga profesional dan calon tenaga profesional kemahiran berbahasa Indonesianya sangatlah mudah. BPP Bahasa hanya membutuhkan sejumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang akan dibina kemahiran berbahasa Indonesianya. Dengan kata lain, BPP Bahasa hanya membutuhkan kuantitas peserta daripada kualitas peserta yang harus berpredikat mahir.

Upaya sosialisasi yang dilakukan BPP Bahasa berdampak pada meningkatnya minat berbagai lembaga untuk melakukan kemitraan. Beberapa lembaga yang sudah melakukan kemitraan dengan BPP Bahasa antara lain: sekolah, universitas, bank, dan lembaga layanan bahasa. Selain kemitraan dengan



berbagai lembaga, BPP Bahasa juga melaksanakan penjurusan pendirian tempat uji kemahiran yang dilakukan di luar negeri. Untuk penjurusan pendirian TUK luar negara dilakukan di dua negara, yakni Thailand dan Prancis. Hasil pendirian TUK di luar negeri akan berpengaruh terhadap peningkatan kemahiran berbahasa bagi calon tenaga profesional dan tenaga profesional di luar negeri. UKBI bagi warga negara asing khususnya bagi tenaga profesional sangat penting guna menunjang kelancaran pekerjaan mereka dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja antaralain kurangnya regulasi dan penyebaran informasi

No.	Predikat	Nilai
1	Istimewa	725—800
2	Sangat Unggul	641—724
3	Unggul	578—640
4	Madya	482—577
5	Semenjana	405—481
6	Marginal	326—404

tentang pentingnya kemahiran berbahasa Indonesia pada setiap lapisan masyarakat. Beberapa langkah antisipasi yang diambil dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak tentang manfaat dan pentingnya Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

Sasaran Program 3: Meningkatnya Bahasa dan Sastra Terkembangkan dan Terlindungi

Bahasa Indonesia, sebagaimana bahasa modern lainnya, terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu, teknologi, dan seni. Perkembangan bahasa Indonesia dapat dilihat dari perkembangan tata bahasa, ejaan, dan leksikon atau kosakatanya. Seiring upaya pengembangan bahasa Indonesia tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga melakukan upaya untuk melindungi bahasa dan sastra di daerah. Upaya pengembangan bahasa dan sastra merupakan upaya memodernkan bahasa melalui pemerikayaan kosakata, pemantapan dan

UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kondisi tersebut menjadikan bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Dalam pergaulan internasional, Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup tinggi mengingat negara Indonesia merupakan destinasi investasi, wisata, dan industri. Posisi tawar tersebut berimplikasi pada penggunaan bahasa Indonesia oleh penutur asing, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

Untuk menyelaraskan bahasa Indonesia agar sejajar dengan bahasa-bahasa besar di dunia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing.

Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan fungsi TUKBI akan selalu dipantau dan dievaluasi oleh Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Secara berkala, Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa akan melakukan pemantauan terhadap kinerja TUKBI, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemantauan pelaksanaan UKBI dapat dilakukan melalui laman Sistem Pengelolaan Data dan Pelaporan Hasil Pengujian UKBI

Hasil pemantauan terhadap kinerja TUKBI dijadikan sebagai laporan untuk bahan evaluasi terhadap TUKBI. Hasil pemantauan tersebut dianalisis oleh Pusat Pembinaan, kemudian diberikan rekomendasi dan pertimbangan.



Tes UKBI di Australia

pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sementara itu, pelindungan bahasa dan sastra merupakan upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Upaya meningkatkan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan oleh BPP Bahasa melalui tiga indikator kinerja pelaksanaan program. Berikut ini uraian tiga indikator kinerja yang mendukung tercapainya Sasaran Program Meningkatnya Bahasa dan Sastra Terkembangkan dan Terlindungi, yaitu:

1. Jumlah Bahasa Terkembangkan;
2. Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi; dan
3. Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Bahasa Terkembangkan



Tes UKBI bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional

IKP Jumlah Bahasa Terkembangkan dicapai melalui penyusunan Kosakata Bahasa Indonesia. Tahapan capaian kinerja pada Tahun 2016—2019 dicapai dengan melakukan berbagai upaya, yaitu Inventarisasi Kosakata dan Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Inventarisasi kosakata merupakan kegiatan pengumpulan, pemilihan, dan pemaknaan kosakata bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing yang telah dipadankan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dalam KBBI. Selain inventarisasi kosakata, BPP Bahasa juga menerima usulan kosakata dari masyarakat melalui cara urun daya (*crowdsourcing*).

Proses urun daya dilakukan dalam rangka mempercepat pengembangan kosakata dan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam menentukan dan mengusulkan kosakata yang dinilai perlu masuk ke KBBI. Masyarakat dapat mengusulkan kosakata untuk masuk ke KBBI Daring dengan menjadi pengguna terdaftar sekaligus mengusulkan revisi jika ada hal yang perlu disempurnakan. Pengguna terdaftar dalam KBBI Daring hingga bulan November 2019 telah berjumlah 44.180 pendaftar dan akan terus bertambah. Dengan cara urun daya ini, masyarakat dapat mengusulkan kosakata dari daerah asalnya untuk masuk ke dalam KBBI. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam proses perlindungan bahasa daerah karena kosakata dari bahasa daerah itu dapat terdokumentasikan dalam KBBI. Alur proses urun daya usulan kosakata dari masyarakat dapat digambarkan pada gambar berikut.

Upaya pengembangan bahasa dan sastra merupakan upaya memodernkan bahasa melalui pemerdayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional



Hasil inventarisasi dan urun daya tersebut disunting dan diverifikasi dalam kegiatan Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia dilakukan pada bulan April dan Oktober melalui aplikasi KBBI Daring. Hasil pemutakhiran tersebut disosialisasi dalam Lokakarya KBBI yang dilakukan setelah pemutakhiran. Dalam pelaksanaan Lokakarya KBBI, narasumber sebelumnya akan diberi bahan berupa entri baru KBBI. Entri baru KBBI tersebut dibahas oleh narasumber dan didiskusikan dengan para peserta lokakarya. Peserta lokakarya berasal dari sekolah, perguruan tinggi, media massa, penerbit, instansi pemerintah, dan masyarakat umum.



Pelaksanaan Lokakarya I KBBI 2019

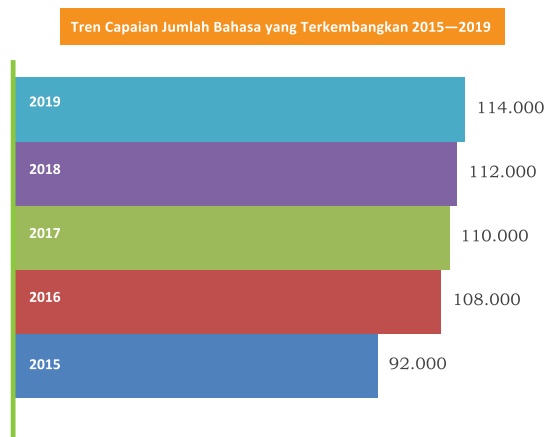
Berbagai kegiatan tersebut menghasilkan KBBI dalam tiga media, yaitu KBBI cetak, KBBI Daring, dan KBBI Luring.



KBBI dalam Berbagai Versi

Berikut ini capaian IKP Jumlah Bahasa Berkembangkan.

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
					Target	Realisasi	%		
3. Jumlah Bahasa yang Berkembangkan	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0%	114.000	114.000



IKP Jumlah Bahasa Terkembangkan dapat tercapai dengan baik melalui dukungan kegiatan Inventarisasi kosakata dan Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inventarisasi Kosakata pada tahun 2019 telah dilakukan di beberapa daerah, seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara dengan berfokus pada inventarisasi kosakata maritim. Melalui kegiatan ini, para pekamus Balai/Kantor Bahasa mendapat pengarah dan bimbingan tentang cara pengusulan yang baik. Selain itu, pembahasan terhadap entri yang telah diusulkan ke KBBI Daring juga dilakukan.

KBBI Daring diluncurkan pada tahun 2016. Sebagai bahan rujukan, KBBI digunakan oleh akademisi, seperti guru, siswa, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang membutuhkan referensi kosakata, baik dalam penyusunan makalah, referensi pengerjaan soal ujian, peningkatan pemahaman wacana, dan sebagainya. KBBI juga kerap dimanfaatkan berbagai unsur masyarakat, seperti peneliti, penggiat bahasa, jurnalis, pemelajar BIPA, dan sebagainya. Jumlah kunjungan masyarakat dalam KBBI Daring hingga November 2019 tercatat sebanyak 54.996.492. Adapun rata-rata kunjungan per hari adalah 49.811 kali.

Selain mengembangkan KBBI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga mengembangkan KBBI Luring dalam bentuk iOS dan Android pada tahun 2016. Kamus luring tersebut dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kamus dan mempermudah kegiatan pembelajaran. Masyarakat juga dapat secara aktif memberikan penilaian dan saran terhadap pengembangan substansi dan platform KBBI yang berguna bagi pengembangan fitur dan konten kamus tersebut.

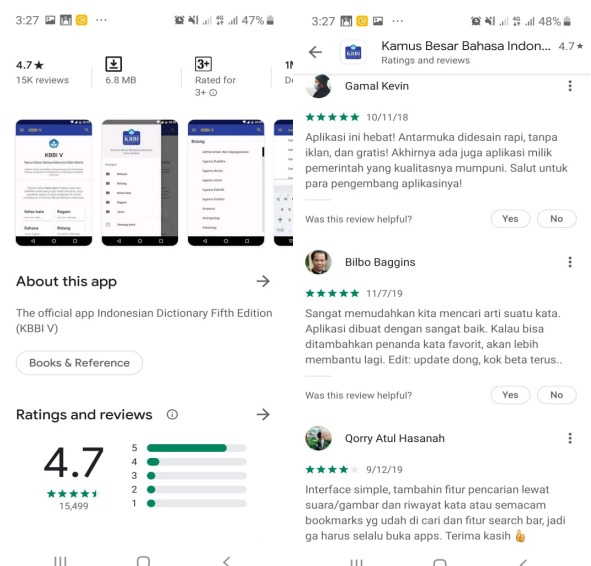
Untuk menjamin ketersediaan rujukan kebahasaan bagi semua kalangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa juga telah melakukan usaha diversifikasi produk sesuai dengan sasaran pengguna yang khusus melalui pembuatan KBBI Braille dan KBBI Disnetra. KBBI Braille adalah KBBI Edisi V yang menggunakan huruf Braille dan spesifikasi lain yang

Pencarian

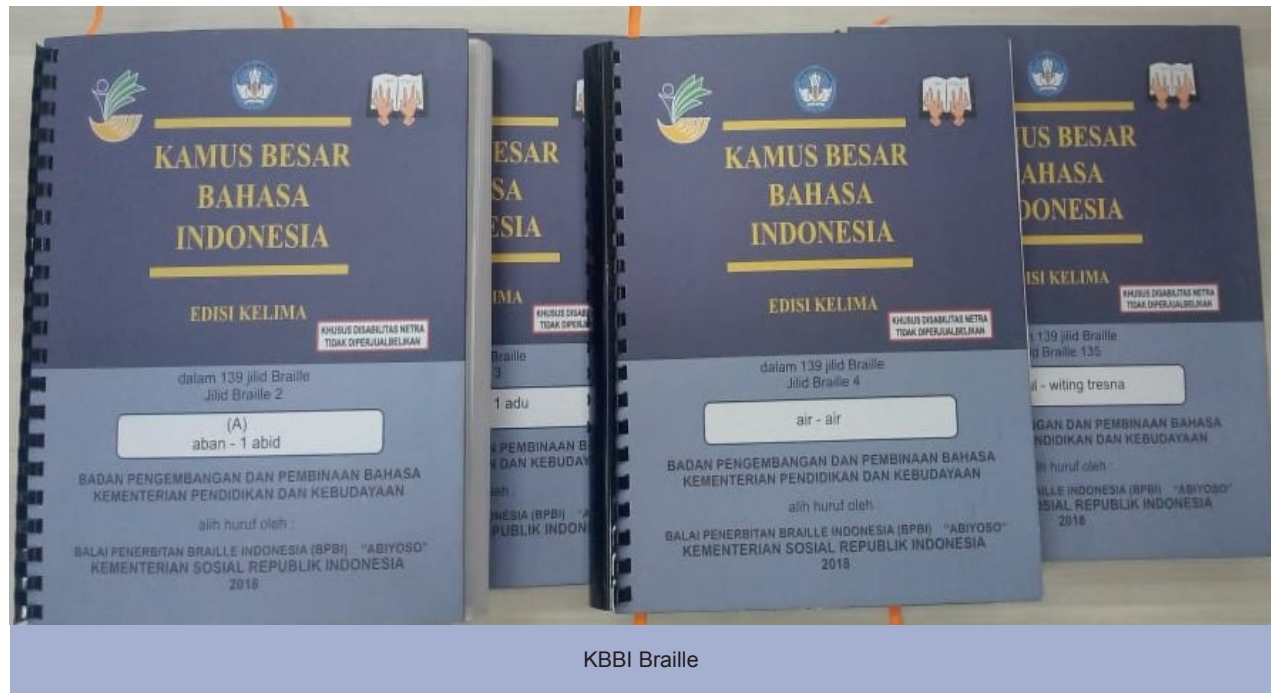
Entri Unik: 1.984.825
 Total: 54.996.492
 /Hari | Jam | Menit: 49.811,90 | 2.075,50 | 34,59
 /Akses Unik: 29,15

Waktu

Diluncurkan Sejak: 28-Oct-2016 15.30.00
 Waktu Peladen (Server): 06-Nov-2019 17.30.01
 Waktu Aktif: 1104 Hari 2 Jam 0 Menit 1 Detik



sesuai dengan kebutuhan tunanetra. Pencetakan KBBI Braille tersebut dilakukan oleh Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) "Abiyoso", Kementerian Sosial Republik Indonesia.



KBBI Braille

Proses alih wahana KBBI V Cetak menjadi KBBI Braille dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas netra sebagai pengguna kamus. Para penyandang disabilitas netra tersebut terlibat dalam penyuntingan untuk menghindari kesalahan penulisan, keterbacaan, dan sebagainya. Setelah semua proses selesai, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyerahkan salinan lunak KBBI Braille kepada Kementerian Sosial untuk dimanfaatkan. Selain itu, KBBI Braille juga didistribusikan ke Perpustakaan Nasional untuk mempermudah rekan

tunanetra mendapatkan akses informasi kamus. Pengembangan KBBI Braille ini dilakukan demi mewujudkan keadilan dan kesamarataan informasi untuk semua kalangan masyarakat yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



Produk diversifikasi lain yang dibuat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah KBBI Disnetra. KBBI Disnetra adalah KBBI Luring versi desktop yang khusus dibuat untuk penyandang disabilitas netra dengan memperhatikan segi kepraktisan fitur pencarian, suara,

dan pencahayaan layar bagi penderita daya lihat rendah (*low vision*).

Selain itu, kegiatan lain yang turut mendukung pengembangan bahasa adalah Sidang Komisi Istilah. Sidang yang menghadirkan pakar bidang ilmu tersebut bekerja untuk mencatat berbagai istilah bidang keilmuan yang dibagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidangnya. Para pakar tersebut dibantu oleh ahli bahasa untuk memastikan ketepatan bahasa yang digunakan. Pada tahun 2019, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah mengumpulkan 4.919 istilah.



Pelaksanaan Sidang Komisi Istilah II 2019

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target adalah sebagai berikut.

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang masih membutuhkan pelatihan leksikografi dan terminologi yang cukup, terutama SDM di Balai/Kantor Bahasa. Selain itu, jumlah SDM dari Balai/Kantor Bahasa yang minim mengakibatkan tim redaksi Balai/Kantor Bahasa berganti-ganti karena harus mengampu kegiatan lain yang cukup menyita waktu. Hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya kualitas usulan hasil inventarisasi kosakata yang diusulkan pada KBBI Daring oleh Balai/Kantor Bahasa.
- b. Sulitnya mencari pakar bidang ilmu/praktisi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan dan dapat mengikuti Sidang Komisi Istilah hingga selesai.
- c. Belum adanya SDM bidang teknologi, informatika, dan komunikasi (TIK) yang memiliki kemampuan mengolah pangkalan data, membuat aplikasi, membangun laman yang interaktif, dan menjaga keamanan data.

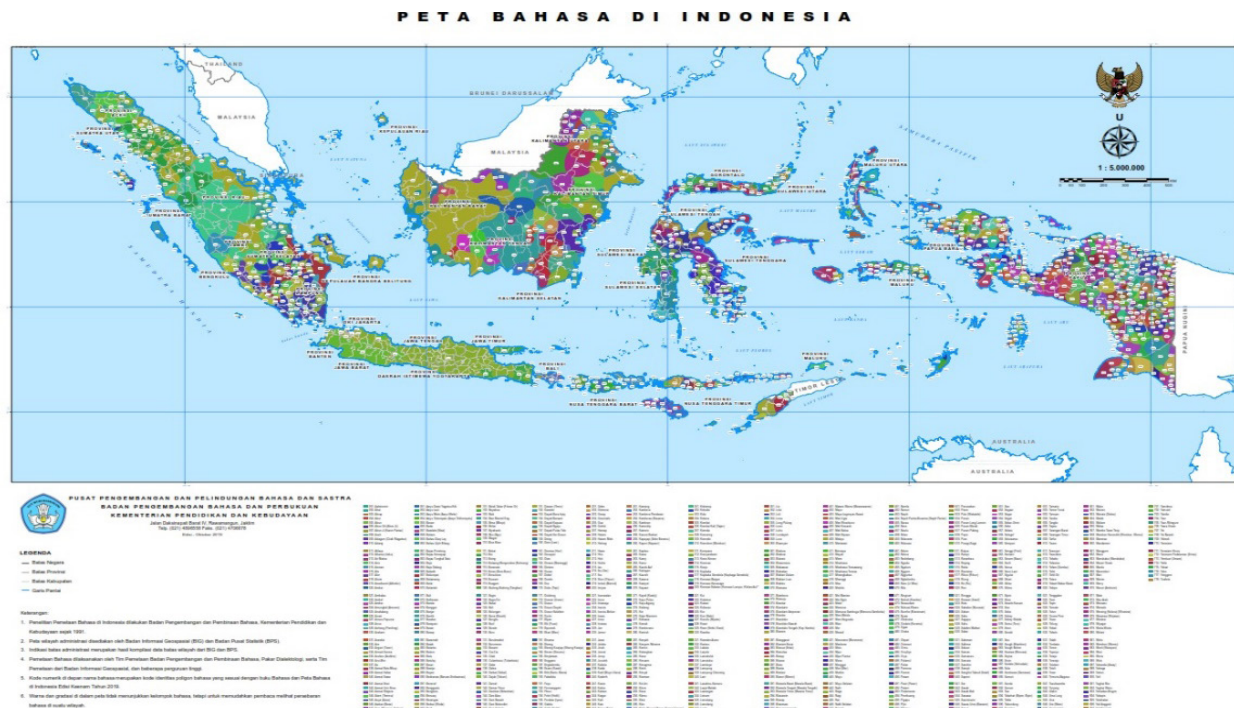
Adanya keterbatasan fasilitas pendukung dalam mendukung kegiatan pengembangan kosakata, seperti komputer, keterbatasan server, pencetak, pemindai, buku rujukan untuk pengayaan kosakata, dan sebagainya.

Indikator Kinerja Program #4 Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi

Untuk mencapai sasaran target IKP Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai lima program unggulan untuk mewujudkan pelindungan itu, yakni (1) pemetaan, (2) kajian vitalitas,

(3) konservasi, (4) revitalisasi, dan (5) registrasi bahasa dan sastra. Program tersebut dilatarbelakangi fakta adanya keanekaragaman bahasa/sastra yang ada di Indonesia sebagai cerminan keanekaragaman etnis dan budaya masyarakat Indonesia.

Dalam rangka melindungi bahasa daerah tersebut, hingga tahun 2019 BPP Bahasa telah menginventarisasi dan mendeskripsikan sebanyak 718 bahasa daerah.



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga telah melakukan kajian vitalitas bahasa untuk menentukan upaya-upaya pengembangan dan perlindungan bahasa daerah. Hasil kajian vitalitas ini juga digunakan sebagai bahan untuk menjelajahi berbagai kemungkinan fungsi bahasa (ranah penggunaan), akuisisi (transmisi lintas generasi), kebijakan pemerintah mengenai penetapan status dan korpus bahasa, serta bahan untuk melakukan langkah pendidikan multilingual berbasis bahasa negara (bahasa Indonesia) dan bahasa daerah setempat. Dari 718 bahasa yang sudah dipetakan, baru 74 bahasa yang dikaji vitalitasnya. Hal ini berarti bahasa daerah yang terpetakan vitalitas bahasanya baru sekitar 10% dari jumlah bahasa yang sudah terpetakan (berdasarkan kajian vitalitas bahasa pada 2011—2018). Hasilnya, 11 bahasa dikategorikan punah, 4 bahasa kritis, 19 bahasa terancam punah, 2 bahasa mengalami kemunduran, 19 bahasa dalam kondisi rentan (stabil, tetapi terancam punah), dan 19 bahasa berstatus aman.

Dalam konteks perlindungan bahasa daerah ini, BPP Bahasa juga telah melakukan konservasi dan revitalisasi bahasa sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa agar tetap dipergunakan oleh masyarakat penuturnya. Di dalamnya ada upaya pencegahan atau perbaikan aspek bahasa yang rusak untuk menjamin kelangsungan bahasa itu sendiri. Upaya pencegahan dan perbaikan

dapat dilakukan melalui pendokumentasian dan pengembangan bahasa tersebut, misalnya penyusunan kamus, sistem aksara atau sistem ortografis, dan bahan pengajaran multilingual. Dengan demikian, generasi berikutnya masih dapat menikmati hasilnya, bahkan bisa dilihat dokumennya oleh generasi yang mungkin tidak bisa lagi berbicara dalam bahasa tersebut.

Untuk peningkatan daya hidup atau vitalitas bahasa, pemerintah juga melakukan upaya pemelajaran bahasa daerah terhadap penutur bahasa yang bersangkutan, baik secara klasikal (secara bersama-sama di dalam kelas atau kelompok) maupun pemodelan pada suatu komunitas penutur bahasa. Untuk mendukung upaya ini dilakukan penyediaan dokumentasi referensi kebahasaan, seperti tata bahasa dan kamus, dan penyusunan bahan ajar muatan lokal untuk pemelajaran bahasa.

Informasi hasil pemetaan dan perlindungan bahasa dapat dilihat melalui laman berikut ini.



Beberapa kegiatan revitalisasi bahasa/sastra yang dilakukan pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Revitalisasi Sastra Lisan Dideng dilakukan di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro-bungo, Provinsi Jambi dengan terget peserta siswa SD, SMP, dan SMA. Hasil dari kegiatan ini adalah:
 - 1) sastra lisan Dideng di dalam masyarakat dihidupkan lagi sebagai suatu kekayaan budaya dan
 - 2) Camat Rantau Pandan merencanakan sanggar resmi Dideng yang berpayung hukum sebagai wadah peseni Dideng dan generasi muda.
2. Revitalisasi Sastra Lisan Dolo-dolo yang dilaksanakan di Pulau Adonara, Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan target peserta siswa SD dan anak usia remaja. Beberapa hasil/manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata menjadi lebih memperhatikan sastra



lisan Dolo-Dolo untuk dikembangkan dalam sektor wisata;

- 2) sastra lisan Dolo-Dolo akan menjadi materi dalam muatan lokal di sekolah;
- 3) komunitas sastra lisan Dolo-Dolo akan diperbanyak;
- 4) bangkitnya semangat generasi muda, bahkan generasi tua untuk mengingat kembali sastra lisan dolo-dolo; dan
- 5) eksistensi suku Lamaholot semakin tinggi.

3. Revitalisasi Bahasa Saleman di Desa Saleman, Seram Utara, Maluku, dengan peserta Siswa SD, SMP, dan SMK Desa Saleman yang menghasilkan manfaat berupa:

- 1) adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pelestarian bahasa Saleman;
- 2) masyarakat Saleman bangga dengan bahasa dan adat yang dimilikinya; dan
- 3) mengurangi friksi antara pemerintah desa dengan masyarakat adat.

4. Revitalisasi Bahasa Adang di Desa Alaang, Alor Barat Laut, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur dengan peserta anak-anak. Hasil dari kegiatan ini berupa:

- 1) adanya kesepakatan antara kepala sekolah, para pengajar, dengan pelaksana UPT Pendidikan untuk menerapkan sehari berbahasa Adang setiap hari Sabtu di sekolah dan
- 2) bahasa Adang akan dijadikan muatan lokal di sekolah.

5. Revitalisasi Bahasa Benggaulu di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dengan peserta anak-anak dan remaja. Hasil yang diperoleh:

- 1) Camat Karossa akan memerintahkan Kepala Desa Benggaulu untuk terus meminta pelatih revitalisasi bahasa Benggaulu mengajarkan bahasa Benggaulu kepada anak-anak agar bisa dipentaskan dalam acara peringatan HUT RI, HUT Provinsi Sulawesi Barat, atau HUT Kabupaten Mamuju yang diselenggarakan di Desa Benggaulu atau Kecamatan Karossa dan
- 2) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah akan mengusulkan kepada Bupati Mamuju Tengah untuk lebih memperhatikan bahasa daerah di wilayah Mamuju Tengah.

6. Revitalisasi Bahasa Tobati di Kampung Tobati, Provinsi Papua dengan target



peserta anak-anak dan remaja. Manfaat/hasil yang diperoleh dari kegiatan ini:

- 1) Kegiatan revitalisasi bahasa Tobati dapat mengubah pola pikir masyarakat dengan meningkatnya kepedulian belajar bahasa Tobati;
- 2) Adanya eksplorasi sejarah dan kosakata bahasa Tobati sehingga anak-anak yang

Pentas Revitalisasi Bahasa Tobati di Provinsi

awalnya belum mengetahui menjadi mengetahui dan lebih mengenal hal-hal yang khas dari budayanya;

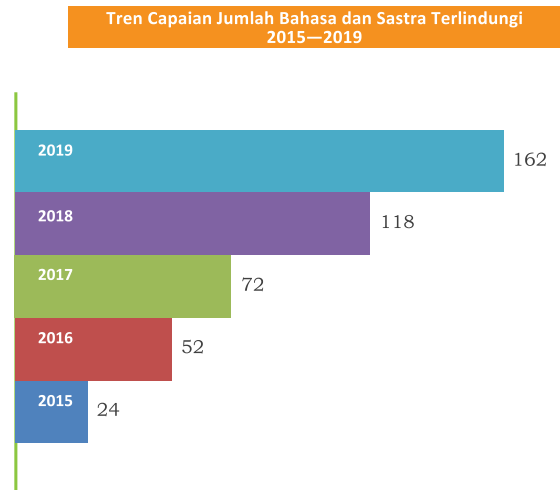
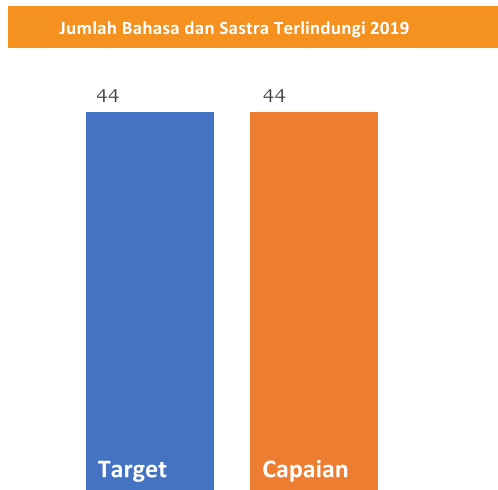
- 3) Memberikan model pembelajaran bahasa Tobati kepada guru apabila pelajaran muatan lokal bahasa daerah diadakan ke depannya di SDN Inpres Tobati;
 - 4) Adanya nota komitmen dari pemangku kepentingan terhadap perlindungan bahasa Tobati seperti Wakil Wali Kota Jayapura, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, dan Kepala SDN Inpres Tobati.
7. Revitalisasi Sastra Lisan Besangen di Desa Batu Mas, Kecamatan Nanga tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan target peserta anak-anak dan remaja. Kebermanfaatan dari kegiatan ini adalah:
- 1) Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata menjadi lebih memperhatikan sastra lisan besangen untuk dikembangkan dalam sektor wisata;
 - 2) komunitas sastra lisan besangen akan diperbanyak;
 - 3) bangkitnya semangat generasi muda, bahkan generasi tua untuk mengingat kembali sastra lisan besangen;
 - 4) Camat Nanga Tayap bekerja sama dengan Kepala Desa Batu Mas dan Dewan Adat Desa berkomitmen mengajarkan sastra lisan tersebut kepada generasi muda agar sastra lisan tersebut bisa ditampilkan dalam acara-acara seperti acara adat, perayaan keagamaan, dan acara kebudayaan baik itu tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
 - 5) Camat Nanga Tayap mengusulkan kepada Bupati Ketapang agar sastra lisan besangen dimasukkan dalam agenda acara kebudayaan tingkat kabupaten yang rutin diadakan setiap tahun di Kabupaten Ketapang.

Berkaitan dengan kegiatan konservasi, perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan serta alokasi anggaran dalam upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah antara Balai/Kantor Bahasa dan pemerintah daerah sehingga tidak terjadi saling mengandalkan atau bahkan duplikasi alokasi anggaran. Selain itu, sosialisasi program perlindungan bahasa dan sastra daerah yang telah dan akan dilakukan oleh BPP Bahasa kepada para pemangku kepentingan di daerah tetap harus digalakkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, koordinasi dan kolaborasi antara Balai/Kantor Bahasa dan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah (pemprov, pemkab/pemkot), perguruan tinggi, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat, tetap perlu digalakkan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan Balai/Kantor Bahasa dan perwakilan pemerintah daerah (Bappeda Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menangani program perlindungan bahasa dan sastra daerah.

Pada tataran akademis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga perlu mendukung pembukaan program studi bahasa dan sastra daerah pada perguruan tinggi di daerah untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan pengajar bahasa dan sastra daerah. Berikut ini capaian IKP Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi.

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
					Target	Realisasi	%		
4. Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	24	28	20	46	44	44	100%	122	162



Ketercapaian IKP “Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi” didukung aktivitas sebagai berikut.

- Program Akselerasi Pemetaan Bahasa
- Kajian Vitalitas Bahasa
- Kajian Vitalitas Sastra
- Penyusunan Sistem Kebahasaan
- Konservasi Sastra Cetak
- Konservasi Manuskrip
- Monitoring pelaksanaan konservasi bahasa dan sastra di daerah
- Survei dan koordinasi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra
- Pementasan dan festival revitalisasi bahasa dan sastra
- Registrasi hasil pengonservasian dan perevitalisasian bahasa dan sastra.

PENYUSUNAN JUKNIS
KONSERVASI
DAN REVITALISASI

PENGUATAN KOORDINASI
INTERN PENGONSERVASIAN
DAN PEREITALISASIAN

ORIENTASI DAN
STANDARDISASI KONSERVASI
DAN REVITALISASI

PELAKSANAAN
KONSERVASI DAN
REVITALISASI

PEMANTAUAN
DAN EVALUASI

KONSINYASI FINALISASI
LAPORAN KONSERVASI
BAHASA DAN SASTRA

REGISTRASI HASIL
PELINDUNGAN BAHASA DAN
SASTRA

REKAPITULASI DAN
ANALISIS HASIL
KONSERVASI DAN
REVITALISASI BAHASA DAN
SASTRA

SEMILOKA
PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain adalah sebagai berikut.

- Koordinasi yang kurang lancar antara Pusat dengan UPT terkait kegiatan pelindungan bahasa dan sastra.
- Belum adanya kerja sama yang terjalin baik antara UPT dengan Pemda setempat dalam rangka pelindungan bahasa dan sastra daerah.
- Kurangnya kepedulian pemerintah/pegawai daerah terhadap pentingnya bahasa/sastra di daerah.
- Kurangnya minat kaum muda terhadap bahasa/sastra di daerahnya.
- Kurangnya kepercayaan tetua/maestro/pakar dalam menurunkan keahlian mereka kepada generasi muda.

Indikator Kinerja Program 5: Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Setiap bahasa memiliki struktur yang khas, baik dari fonologi, morfologi, sintaksis, maupun semantik. Hal yang sama juga dimiliki sastra daerah yang genrenya sangat beragam. Sastra ini hidup dalam tradisi lisan yang hidup dalam berbagai upacara adat dan upacara ritual. Bahasa dan sastra daerah ini banyak yang mengalami kepunahan karena sebagian besar hidup dalam tradisi tulis dan belum banyak yang memiliki sistem tulis.

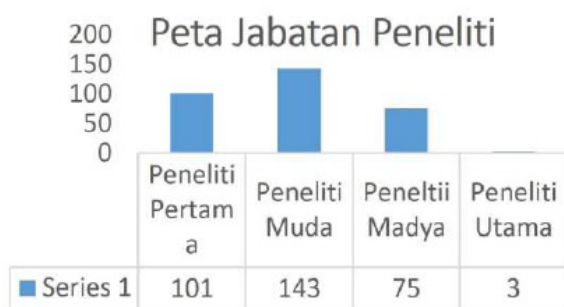
Pada kenyataannya, ada juga bahasa dan sastra yang terekam dalam tulisan, baik tulisan tangan maupun cetak. Bahasa dan sastra yang mempunyai sistem tulis ini cenderung aman. Namun, sastra dalam bentuk tulisan tangan atau manuskrip ini diklasifikasi sebagai sastra hampir punah karena bahan alas tulisnya dibuat dari bahan yang tidak lestari, seperti daun lontar dan kulit kayu. Dengan iklim yang

cenderung lembab dan banyaknya serangga membuat alas tulis ini mudah rusak. Dengan rusaknya manuskrip ini berarti bangsa Indonesia kehilangan dokumen sejarah, bahasa, pengetahuan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Kekayaan bahasa dan sastra yang berlimpah yang tersebar di wilayah Indonesia yang sangat luas ini harus dikembangkan dan dilindungi. Salah satunya, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, yakni penelitian murni kebahasaan dan kesastraan deskriptif dalam bentuk kajian murni kebahasaan dan kesastraan. Di samping itu, dilakukan juga kajian vitalitas atau daya hidup bahasa dan sastra serta pemetaan vitalitasnya. BPP Bahasa memiliki potensi sumber daya peneliti yang cukup untuk melakukan penelitian kebahasaan dan kesastraan dengan komposisi peneliti sebagai berikut.

KOMPOSISI PENELITI DI BADAN BAHASA

BERDASARKAN PETA JABATAN DAN BIDANG KEPAKARAN



Jumlah peneliti di Lingkungan Badan Bahasa adalah 322 peneliti

- 1) Peneliti Pertama 101 peneliti (31,4%)
- 2) Peneliti Muda 143 peneliti (44,4%)
- 3) Peneliti Madya 75 peneliti (23,3%)
- 4) Peneliti Utama 3 peneliti (0,9%)



Bidang kepakaran disusun berdasarkan Perka LIPI, ada 10 kepakaran yang dapat diampu oleh peneliti Badan Bahasa,

- 1) Sastra dan Interdisipliner, 95 peneliti (29,5%)
- 2) Tradisi Lisan, 12 peneliti (3,7%)
- 3) Sastra Murni, 11 peneliti (3,4%)
- 4) Filologi, 9 peneliti (2,8%)
- 5) Sastra Terapan, 9 peneliti (2,8%)
- 6) Sastra dan Politik Identitas, 0 peneliti (0%)
- 7) Semiotika, 2 peneliti (0,6%)
- 8) Linguistik Interdisipliner, 92 peneliti (28,6%)
- 9) Linguistik Teoritis, 37 peneliti (11,5%)
- 10) Linguistik Terapan, 55 peneliti (17,1%)

Beberapa topik penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, antara lain adalah:

- 1) penguasaan kosakata bahasa Indonesia oleh siswa;
- 2) sikap bahasa generasi muda terhadap bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing;
- 3) kelayakan karya sastra sebagai bacaan siswa;
- 4) rintisan kebangsaan dalam manuskrip nusantara;
- 5) penelitian sejarah sastra Indonesia tahun 1950-an;
- 6) konstruksi kebangsaan dalam cerita lisan jejak Majapahit; dan
- 7) kajian pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan tersebut diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

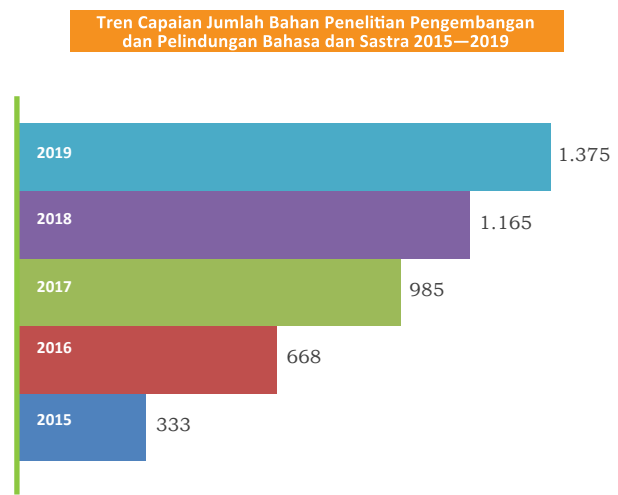
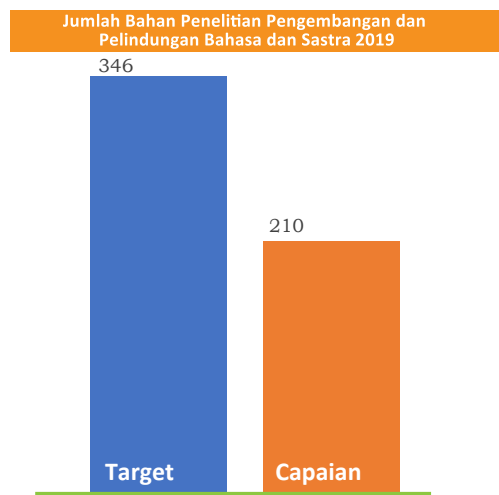
- Menjadi bahan rekomendasi kepada pihak pengampu kebijakan terkait kurikulum dan perbukuan perihal bahan bacaan yang layak bagi siswa.
- Pengutan nasionalisme di wilayah perbatasan/terluar yang akan tergambar dari sikap bahasa masyarakat terhadap bahasa Indonesia.
- Bahasa dan sastra dapat dijadikan sebagai sarana rekonsiliasi bangsa.
- Bangsa yang besar senantiasa menghargai dan mengamalkan ajaran leluhur, terlihat di rintisan kebangsaan dalam cerita lisan dan sastra tulis masa silam dan sejarah sastra.
- Standar penguasaan kosakata siswa setiap jenjang menjadi ukuran pengembangan SDM.



Gambar Pengambilan data lapangan penelitian “Rintisaan Kebangsaan dalam Manuskrip Nusantara di Jawa Timur”

Jumlah penelitian pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra yang dilaksanakan oleh BPP Bahasa berhasil mencapai 174 naskah, dari target kinerja yang ditetapkan sejumlah 346 naskah. Berikut ini capaian IKP Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
					Target	Realisasi	%		
5. Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	333	335	317	180	346	210	60,7%	1.722	1.375



Ketidaktercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor berikut:

- prosedur operasional standar penelitian belum berjalan dengan baik,
- sulit terpenuhinya target hasil kerja minimal peneliti,
- penyusunan dan realisasi jadwal penelitian belum berjalan dengan baik, dan
- adanya tuntutan untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.

Berikut ini tahapan penelitian:

- penyusunan desain penelitian,
- penyusunan instrumen penelitian,
- pengambilan data lapangan penelitian,
- analisis data penelitian,
- penyusunan laporan penelitian, dan
- seminar hasil penelitian.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

- kurangnya koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian kebahasaan dan kesastraan;
- konsultasi dengan narasumber kurang maksimal;
- waktu pelaksanaan penelitian yang kurang maksimal;
- waktu pelaksanaan penelitian ada yang tidak sesuai dengan jadwal semula karena adanya blokir anggaran terhadap beberapa tema penelitian.

Untuk itu, BPP Bahasa perlu melakukan beberapa hal terkait dengan hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2019 agar tidak terulang dengan melakukan:

- perlu koordinasi dengan berbagai pihak yang pemangku kepentingan dalam melakukan penelitian;
- penyusunan anggaran penelitian harus diperhitungkan secara presisi sehingga tidak ada anggaran yang terblokir pada tahun pelaksanaan sehingga pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

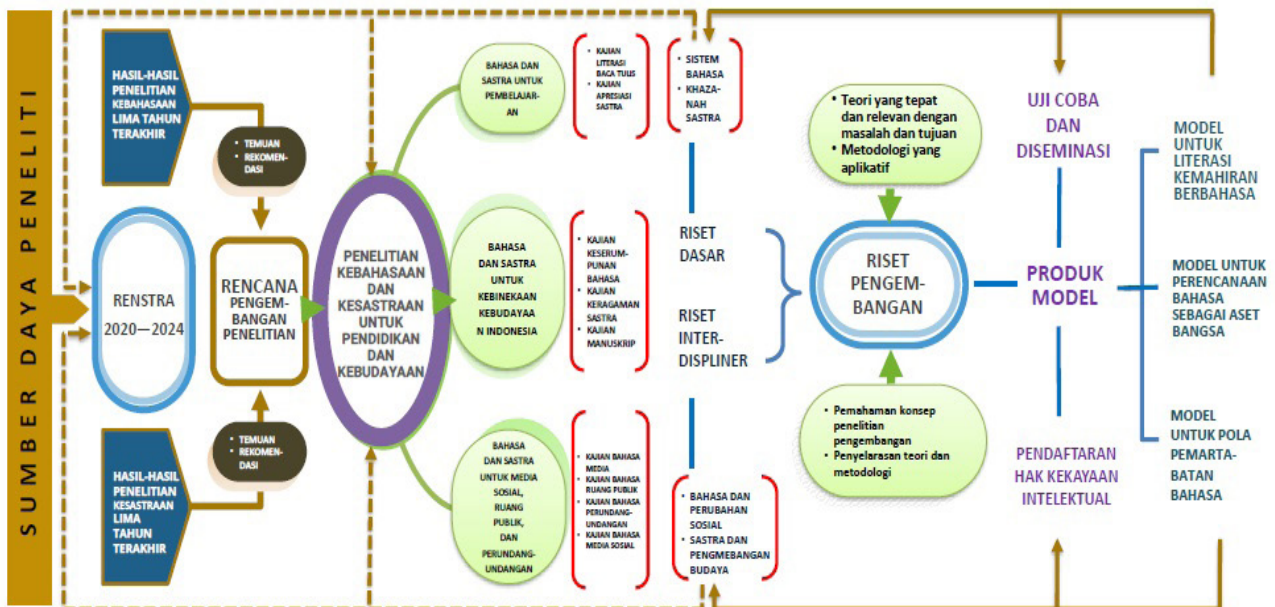
Penelitian kebahasaan dan kesastraan sangat penting untuk terus dilaksanakan dalam proses pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Untuk itu, BPP Bahasa telah menyiapkan desain induk penelitian bahasa dan sastra sebagai berikut.



DESAIN INDUK

RENCANA PENGEMBANGAN PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA

"Mengatasi Keterputusan/Keparsialan, Menjaga Keberlanjutan, Memastikan Kemanfaatan"



Sasaran Program 4: Meningkatkan Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Pencapaian SP “Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik” ini dilakukan dengan melakukan upaya peningkatan kualitas penggunaan bahasa di ruang publik pada lembaga di badan publik dan swasta. Badan publik meliputi lembaga pemerintah, sekolah negeri, BUMN, dan BUMD. Lembaga swasta meliputi lembaga berbadan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, penerbitan, penyiaran, dan hukum. Indikator ini menyasar pada penggunaan bahasa pada objek yang digunakan oleh lembaga di badan publik dan swasta. Kualitas penggunaan



bahasa di ruang publik ini tidak luput dari peran serta dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

SP ini dicapai dalam rangka bentuk pembinaan bahasa di masyarakat, khususnya pembinaan di ruang publiknya. Sasaran ini dimunculkan sebagai dampak kualitas penggunaan bahasa ruang publik di Indonesia semakin menurun. Penggunaan bahasa di ruang publik tersebut tidak terlepas dari pemilik pengguna bahasa itu, yaitu lembaga pengguna bahasa, oleh karena itu, sasaran ini langsung kepada lembaga pengguna bahasa.

Indikator Kinerja Program 6: Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya

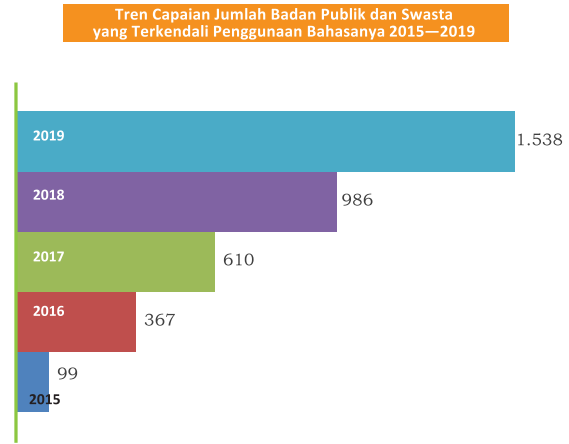
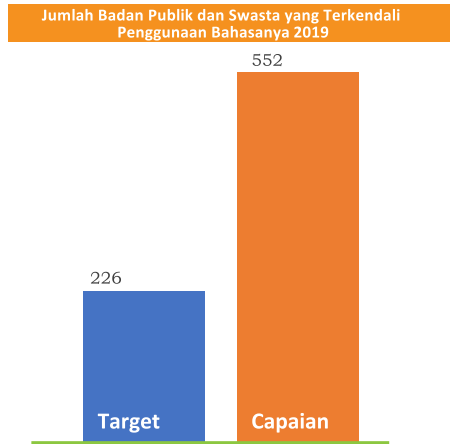
IKP Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya dicapai dengan melakukan berbagai aktivitas. Pelaksanaan aktivitas terkait dengan pencapaian IKP tersebut dilakukan di seluruh Indonesia. Strategi pencapaian IKP yang dilakukan melalui, antar lain:

1. Verifikasi dan Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara pada Ruang Publik di DKI Jakarta;
2. Verifikasi dan Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara pada Ruang Publik di Daerah;
3. Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara bagi Kepala Daerah dalam rangka Penghargaan Adibahasa;
4. Aksi Pengutamaan Bahasa Negara pada Lembaga Pendidikan di DKI Jakarta;
5. Aksi Pengutamaan Bahasa Negara pada Lembaga Pendidikan melalui Lomba Wajah Bahasa Sekolah Tingkat Nasional;
6. Lokakarya Penegakan Hukum Pengutamaan Bahasa Negara;
7. Audiensi Pengutamaan Bahasa Negara dengan Pemangku Kepentingan (Lembaga/Badan Publik);
8. Sosialisasi Kebijakan Kebahasaan dalam rangka Pemasyarakatan Bahasa bagi Lembaga/Instansi;
9. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) dan Pemangku Kepentingan;
10. Layanan Bantuan Teknis Keterampilan Kebahasaan dan Kesastraan;
11. Layanan Bantuan Teknis Tenaga Ahli Bahasa dan Saksi Ahli Bahasa.
12. Safari Bahasa Media Massa; dan
13. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia bagi Insan Media Massa.

Berikut ini capaian IKP Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya.



Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
					Target	Realisasi	%		
6. Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	99	268	243	376	226	552	244,2%	1.130	1.538



IKP Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya dapat tercapai dengan baik. Capaian ini dapat ditindaklanjuti untuk sebaran lembaga yang lebih luas pada tahun berikutnya. Lembaga yang penggunaan bahasa di ruang publik juga dapat dijadikan contoh lembaga dan perlu diberikan penghargaan atas capaian tersebut. Sebagai contoh pada tahun 2019 BPP Bahasa telah menetapkan lima sekolah terbaik penggunaan bahasa di ruang publiknya dan berhak menerima penghargaan Wajah Bahasa Sekolah 2019. Taman Mini Indonesia Indah juga dijadikan sebagai kawasan yang lembaga pengguna bahasa di ruang publiknya dapat dicontoh oleh wilayah lain atau lembaga lain. Menteri Pendidikan Prof. Dr. Muhadjir Effendi telah menetapkan kawasan ini sebagai kawasan percontohan praktik baik penggunaan bahasa di ruang publik.

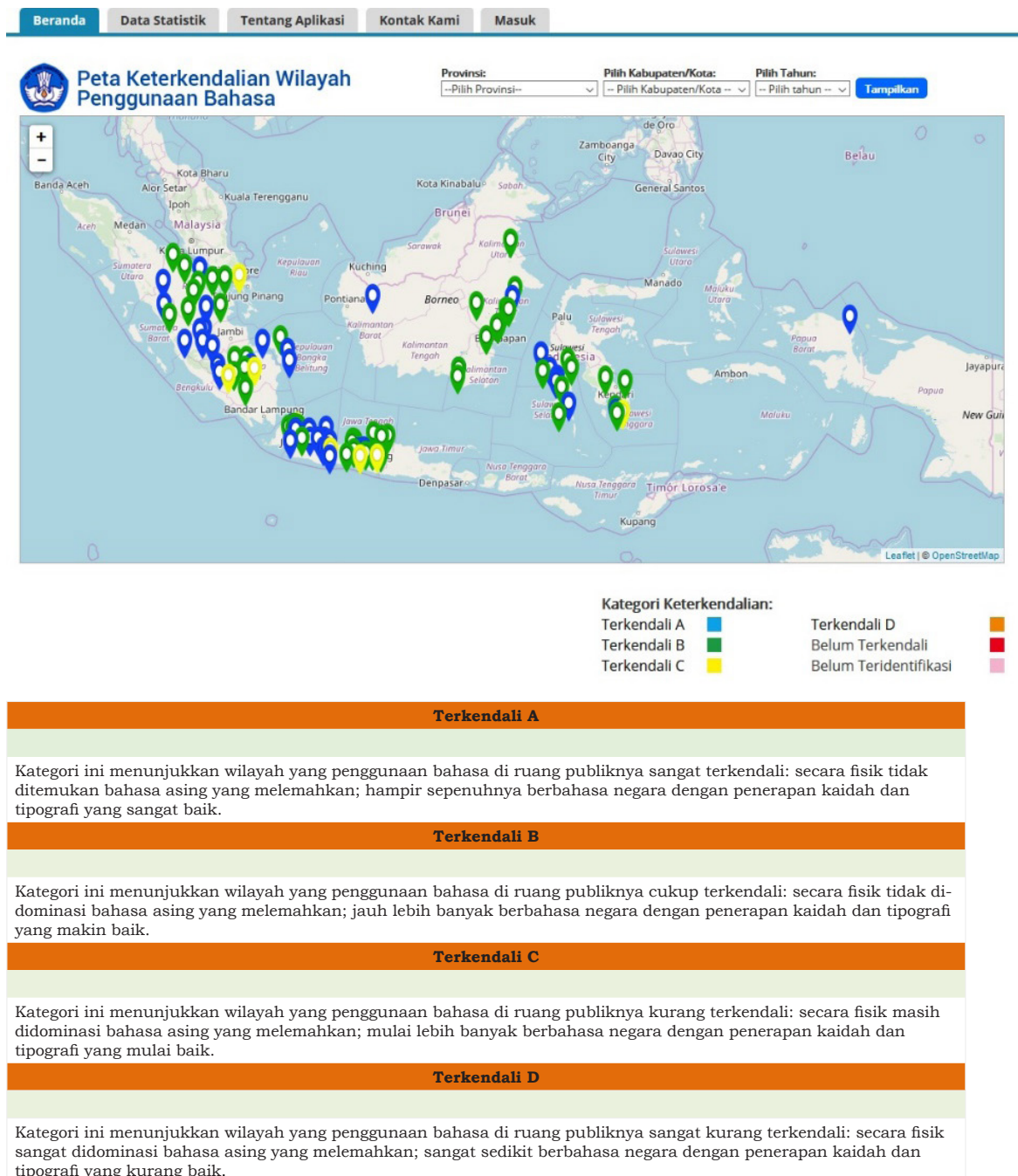
Capaian 244% itu diperoleh melalui gencarnya gerakan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Gerakan itu secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Besarnya atensi badan publik dan swasta yang begitu besar berdampak meningkatnya capaian kinerja pada IKP ini.





Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut.

- Ketersebaran lembaga di Indonesia yang sangat luas memerlukan biaya dan energi untuk menjangkau dan melakukan program pengutamaan bahasa negara di berbagai lembaga.
- Keterbatasan jumlah ahli bahasa di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- Perbedaan dukungan pemerintah daerah terhadap program pengutamaan bahasa negara di ruang publik.
- Adanya kendala teknis penyesuaian jadwal kegiatan dengan antara jadwal kegiatan dan kesediaan waktu insan media massa.



Beberapa langkah antisipasi yang diambil dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain

- a) Memprioritaskan lembaga pengguna bahasa yang harus segera dikomunikasikan terkait penggunaan bahasa di ruang publiknya.
- b) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan ahli bahasa melalui program pendampingan;
- c) Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendukung program pegutamaan bahasa negara di ruang publik;
- d) Menentukan jadwal kegiatan yang tepat dan memanfaatkan momen penting agar insan media massa dapat berperan aktif.

Sasaran Program 5: Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN

Meningkatnya peran bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional pada Indonesia Emas 2045 merupakan harapan besar masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia diperjuangkan sejajar dengan bahasa yang telah mendunia lainnya. Hal ini adalah suatu keniscayaan, mengingat bahasa Indonesia telah memiliki jumlah penutur terbesar ke lima setelah bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Hindi. Harapan besar itu dimulai dengan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di tingkat regional ASEAN. Pada rentang lima tahun Renstra 2015—2019 bahasa Indonesia telah diposisikan sebagai bahasa kedua sejajar dengan bahasa Inggris di sejumlah negara ASEAN, seperti di Vietnam dan Kamboja. Selain itu, bahasa Indonesia yang berdampingan dengan bahasa Melayu telah digunakan oleh sejumlah penduduk di Malaysia, Brunai Darussalam, Singapura, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini menandakan kiprah perkembangan bahasa Indonesia yang kian membesar secara bertahap dan berkelanjutan.

Tidak hanya dari jumlah penutur yang besar, kiprah bahasa Indonesia yang membesar ini dapat juga terlihat dari hasil kajian yang dilakukan BPP Bahasa (2019) mengenai respons negara-negara penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) di wilayah ASEAN, yakni Thailand, Filipina, Vietnam yang terdampak oleh penginternasionalan bahasa Indonesia. Hasil kajian menyebutkan adanya upaya universitas untuk membuka program studi bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi lisan dan terbatas. Selain itu, hasil kajian menunjukkan adanya peran penting bahasa Indonesia bagi pemelajar BIPA.

Meningkatnya peran bahasa Indonesia melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan di tingkat ASEAN ini dapat terukur melalui meningkatnya jumlah bahan pengembangan strategi kebahasaan dan jumlah akses diplomasi kebahasaan. IKP Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan meliputi pedoman diplomasi kebahasaan dan kesastraan, kajian pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, jumlah bahan ajar BIPA, jumlah bahan ajar bahasa asing strategis. Adapun meningkatnya jumlah akses diplomasi kebahasaan dapat

diwujudkan melalui meningkatnya jumlah perseorangan, kelompok, ataupun lembaga yang berpotensi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia di mancanegara.

Indikator Kinerja Program 7: Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan

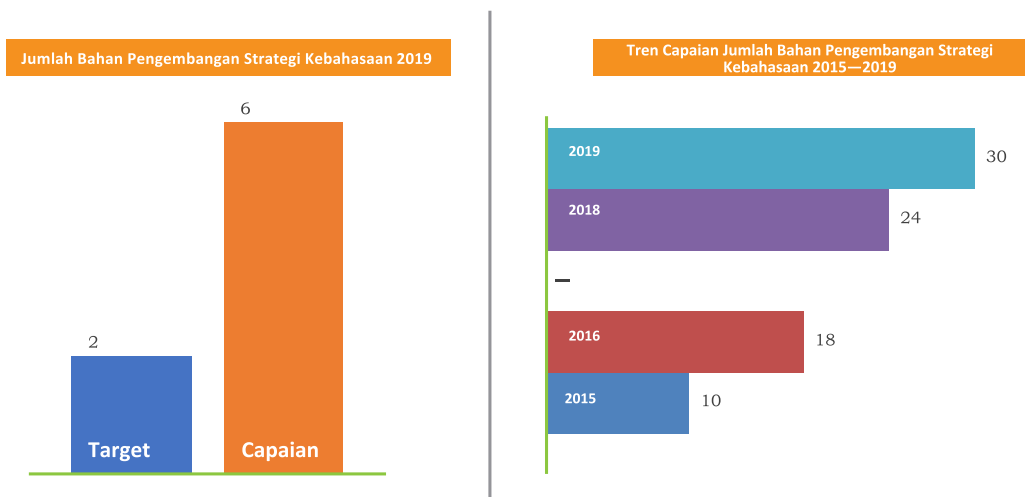
Bahan Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan adalah bahan yang digunakan sebagai upaya memodernkan beragam gagasan kebahasaan, serta kecakapan memanfaatkan ilmu, sumber daya, dan strategi kebahasaan untuk kepentingan domestik dan diplomasi lunak (*soft diplomacy*) Indonesia di tingkat internasional.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka memenuhi capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Jumlah Bahan Pengembangan Strategi dilakukan, antara lain melalui

1. Penyusunan Pedoman Diplomasi Kebahasaan;
2. Penyusunan Kajian Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan;
3. Penyusunan Bahan Ajar BIPA;
4. Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Asing Bertujuan Strategis.

Terkait pemenuhan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan sejumlah 30 naskah pada akhir masa renstra, pada tahun 2019 BPP Bahasa mencapai 6 naskah dari 2 naskah yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Upaya ini dilakukan karena pada 2017 IKP Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan tidak dilaksanakan sehingga secara akumulasi capaian IKP ini harus dituntaskan pada 2019. Besarnya realisasi mencapai 300% pada IKP Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan. Berikut ini sandingan target dan realisasi IKP Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan.

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
					Target	Realisasi	%		
7. Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	10	8	-	6	2	6	300%	30	30



Pada tabel dan grafik di atas naskah yang dilaporkan untuk mewakili seluruh bahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan adalah target dan capaian pada naskah bahan Pedoman Diplomasi Kebahasaan. Capaian renstra pada bahan pedoman ini mengalami peningkatan progresif. Namun, perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2017 tidak ada pedoman yang diterbitkan, hal tersebut terkait dengan kebijakan pimpinan terhadap penelaahan dan reviu pedoman pada tahun sebelumnya yang perlu dilakukan tanpa membuat pedoman yang baru di tahun 2019.

Target Renstra pada IKP Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan adalah 30 naskah. Pada 2019 ini telah dihasilkan 6 naskah, yaitu:

- a. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program Pengiriman Tenaga Pengajar BIPA;
- b. Pedoman Tes Evaluasi Belajar BIPA;
- c. Pedoman Fasilitas Lembaga Penyelenggara BIPA;
- d. Pedoman Pengayaan Bahan Koleksi Video Lab. Kebinekaan Bahasa dan Sastra;
- e. Pedoman Bengkel Forensik kebahasaan;
- f. Pedoman Pengembangan Laboratorium Forensik Kebahasaan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, selain pedoman diplomasi kebahasaan, masih terdapat sejumlah naskah yang juga mendukung capaian jumlah bahan pengembangan strategi kebahasaan ini. Pertama, naskah kajian pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. Pada 2019 dihasilkan sebanyak 24 naskah kajian. Hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan kebijakan lembaga, bahkan bahan rekomendasi nasional. Berikut ini judul kajian yang didasarkan atas kebutuhan lembaga sebagai bahan kebijakan, antara lain:

- 1) Analisis Bukti Kebahasaan Kasus Perundungan Siber
- 2) *Cyberbullying* di Media Sosial pada Pelajar Indonesia
- 3) Analisis Linguistik Forensik Ujaran Provokasi Pelajar Penyebab Tawuran
- 4) Kesantunan Berbahasa Remaja di Media Sosial Youtube
- 5) Kesantunan Berbahasa Remaja di Media Sosial Instagram
- 6) Kesantunan Berbahasa Remaja di Media Sosial Twitter
- 7) Kesantunan Berbahasa Remaja di Media Sosial Facebook
- 8) Strategi Akomodasi Guru-Siswa dan Siswa-Guru dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMAN 68, Jakarta
- 9) Strategi Akomodasi Guru-Siswa dan Siswa-Guru dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMAN Perguruan Rakyat 1, Jakarta
- 10) Strategi Akomodasi Guru-Siswa dan Siswa-Guru dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMNU MH. Thamrin, Jakarta
- 11) Strategi Akomodasi Guru-Siswa dan Siswa-Guru dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMAN 41, Jakarta
- 12) Dampak Pengiriman Guru BIPA terhadap Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Timor Leste

- 13) Dampak Pengiriman Guru BIPA terhadap Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Vietnam
- 14) Dampak Pengiriman Guru BIPA terhadap Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Thailand
- 15) Dampak Pengiriman Guru BIPA terhadap Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Filipina
- 16) Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Tenaga Pengajar BIPA Wilayah ASEAN 2 Masa Tugas 2015--2018
- 17) Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Tenaga Pengajar BIPA Wilayah ASEAN 1 Masa Tugas 2015--2018
- 18) Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Tenaga Pengajar BIPA Wilayah Amerop Masa Tugas 2015--2018
- 19) Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas Tenaga Pengajar BIPA Wilayah Aspasaf Masa Tugas 2015--2018
- 20) Cerita Rakyat sebagai Pendukung Pembelajaran BIPA di Wilayah Asean: Filipina
- 21) Cerita Rakyat sebagai Pendukung Pembelajaran BIPA di Wilayah Asean: Thailand
- 22) Cerita Rakyat sebagai Pendukung Pembelajaran BIPA di Wilayah Asean: Vietnam
- 23) Cerita Rakyat sebagai Pendukung Pembelajaran BIPA di Wilayah Asean: Malaysia
- 24) Bahasa Mentawai, Kerinci, Komering, dan Enggano dalam Bahasa Indonesia Ditinjau dari Tingkat Kekerabatan Linguistik Bandingan Historis

Naskah kedua adalah jumlah bahan ajar BIPA. Bahan ajar BIPA 2019 sebanyak 29 naskah. Bahan ajar BIPA yang dikembangkan merupakan bahan ajar acuan dan pendukung untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia para pemelajar BIPA. Bahan ajar tersebut merupakan fasilitasi yang diberikan BPP Bahasa kepada penyelenggara, pengajar, dan juga pemelajar BIPA dalam rangka penyebaran bahasa negara dan pengenalan nilai-nilai keindonesiaan. Pada tahun 2015 hingga 2017, bahan ajar BIPA dikembangkan dengan mengacu pada *Common European Frame Work* (CEFR) yang terdiri atas enam level, yaitu level A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Namun, sejak keluarnya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), pengembangan bahan ajar BIPA mengacu pada SKL tersebut. Oleh karena itu, munculah bahan ajar kemahiran yang terdiri atas 7 level, yaitu level BIPA 1—BIPA 7 dan bahan pengayaan membaca yang mengacu pada kompetensi dalam SKL.

Pada 2019 telah dihasilkan beberap jenis bahan ajar yang berbeda, antara lain bahan ajar BIPA untuk umum, bahan ajar BIPA untuk pelajar, bahan ajar kemahiran BIPA berkonteks Jakarta, bahan ajar pengayaan pembelajaran BIPA bermuatan lokal Jakarta dan bermuatan nasional (Indonesia).

1) Bahan ajar BIPA untuk umum. Materi bahan ajar acuan dengan judul *Sahabatku Indonesia* ini ditujukan bagi (pemelajar) umum. Bahan ini merupakan

seri bahan diplomasi kebahasaan yang memuat materi penggunaan bahasa Indonesia ragam umum yang dikembangkan dalam tujuh tingkat dan disajikan dalam tujuh jilid buku dari BIPA 1 hingga BIPA 7. Selain dapat digunakan oleh pengajar untuk mengajar, bahan ini juga dapat dipakai oleh pemelajar untuk belajar mandiri.



- 2) **Bahan ajar BIPA untuk pelajar.** Materi bahan ajar acuan dengan judul *Sahabatku Indonesia untuk Pelajar* ini ditujukan bagi pelajar tingkat dasar dan menengah. Bahan ini memuat penggunaan bahasa Indonesia ragam umum yang dikembangkan dalam tujuh tingkat dan disajikan dalam tujuh jilid buku dari BIPA 1 hingga BIPA 7. Selain dapat digunakan oleh pengajar untuk mengajar, bahan ini dapat pula dipakai oleh pemelajar untuk belajar mandiri.



- 3) **Bahan ajar BIPA berkonteks lokal Jakarta.** Materi bahan ajar acuan dengan judul *Sahabatku Indonesia: Berbahasa Indonesia di Jakarta* ini ditujukan bagi pemelajar umum tingkat BIPA 1. Bahan ini memuat materi penggunaan bahasa Indonesia ragam umum oleh masyarakat lokal di wilayah Jakarta dengan diwarnai unsur budaya lokal Jakarta. Bahan ini selanjutnya akan dijadikan model untuk pengembangan bahan ajar BIPA berkonteks lokal daerah di seluruh Indonesia. Selain dapat digunakan oleh pengajar untuk mengajar, bahan ini juga dapat dipakai oleh pemelajar untuk belajar mandiri.

- 4) **Bahan pendukung pembelajaran BIPA (pengayaan kemahiran membaca bermuatan nasional dan lokal).** Materi bahan pendukung pembelajaran BIPA ini ditujukan bagi pemelajar umum untuk tingkat tertentu. Bahan ini memuat materi pengayaan kemahiran membaca dengan teks-teks yang memuat unsur-unsur peradaban tingkat lokal Jakarta sebanyak 7 judul dan tingkat nasional sebanyak 7 judul buku. Bahan ini selanjutnya juga akan dijadikan model untuk pengembangan bahan pengayaan kemahiran membaca dengan muatan lokal daerah di seluruh Indonesia serta muatan nasional tentang keindonesiaan. Judul utama bahan ini adalah *Sahabatku Indonesia Membaca Jakarta* dan *Sahabatku Indonesia Membaca Indonesia* dengan subjudul topik tertentu yang berkaitan dengan keunikan lokal yang ada di Jakarta dan kekhasan nasional Indonesia.



Selain bahan ajar tersebut, dikembangkan pula bahan pendukung lainnya sebagai hasil kerja sama antara PPSDK dan Stasiun Luar Negeri, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Bahan pendukung tersebut berupa bahan siaran dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam delapan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Arab, Belanda, Italia, Mandarin, dan Jepang. Selanjutnya, LPP RRI menyiarkan bahan siaran itu ke seluruh dunia yang dikemas dalam program “Mari Berbahasa Indonesia”. *Mari Berbahasa Indonesia: Antologi Bahan Siaran BIPA Berbahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda, Mandarin,*

Jepang, dan Arab disusun pada 2018, sedangkan pada 2019 menghasilkan satu naskah induk siaran BIPA untuk luar negeri berbahasa Indonesia.



Bahan pendukung pengajaran BIPA berikutnya adalah bahan tes Ke-BIPA-an. Bahan tes ke-BIPA-an terdiri atas tes evaluasi belajar (TEB) BIPA dan tes penempatan. TEB BIPA ini ditujukan sebagai instrumen penilaian hasil belajar tiap-tiap level pembelajaran BIPA, sedangkan tes penempatan digunakan mengetahui kompetensi pemelajar BIPA sehingga dapat dipetakan level pemelajar sesuai dengan kemahiran yang telah dimiliki.

Tes Evaluasi Belajar BIPA dan Tes Penempatan Pemelajar BIPA Capaian

2016: 7 baterai
2018: 8 baterai
2019: 8 baterai



Naskah selanjutnya adalah bahan ajar bahasa asing bertujuan strategis. Bahan ajar bahasa asing strategis merupakan bahan yang berfungsi sebagai bahan diplomasi kebahasaan yang disiapkan untuk mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui penyebaran bahasa negara. Dengan berbekal penguasaan bahasa asing sasaran, pihak-pihak yang melaksanakan tugas dapat difasilitasi peningkatan mutu bahasa asingnya sehingga diharapkan dapat mendukung tujuan politik/kepentingan Indonesia di mancanegara. Bahan tersebut berisi seperangkat pengetahuan berbahasa asing yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi dalam proses pembelajaran bahasa asing sebagai bahasa kedua.



bahan yang terakhir adalah bahan terjemahan. Penerjemahan naskah pada 2019 ini dilakukan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Penerjemahan ke dalam bahasa Inggris ini bertujuan agar bahan referensi Indonesia beserta bahan literasinya dapat dikenal lebih luas di mancanegara. Adapun naskah terjemahan tersebut berupa 1 terjemahan referensi induk, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, penerjemahan naskah berupa hasil kegiatan sastrawan berkarya sebanyak 6 naskah, dan buku pendidikan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sebanyak 3 naskah. Naskah lainnya berupa naskah bahan bacaan literasi sebanyak 103 naskah. Total naskah yang diterjemahkan sebanyak 113 naskah.

Hambatan dan permasalahan dalam pemenuhan IKP Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan, antara lain

- a. terbatasnya wawasan dan pengalaman sumber daya manusia terkait tugas diplomasi lunak yang diemban sehingga pedoman yang dihasilkan belum cukup mendalam menjawab kebutuhan lembaga, khususnya dalam menghasilkan cara/seni/upaya strategis terkait tugas diplomasi lunak melalui kebahasaan;
- b. terbatas referensi dan pustaka yang mendukung;
- c. luasnya kawasan sasaran sebagai populasi kajian pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan;
- d. terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mumpuni dan berpengalaman dalam penyusunan bahan diplomasi bahasa Indonesia untuk penutur asing.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan itu, diantaranya

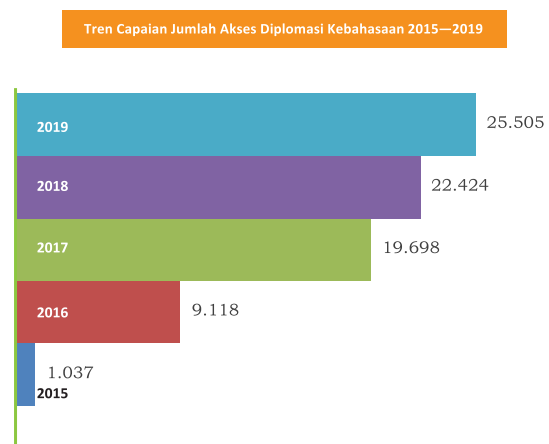
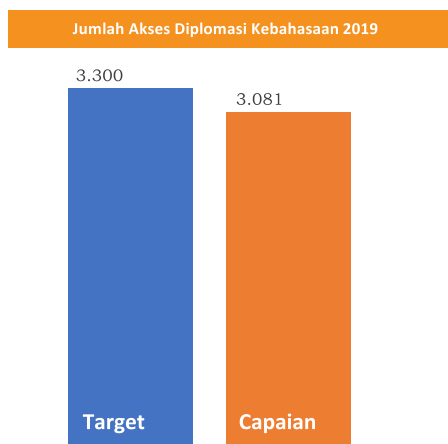
- a. melakukan serangkaian kegiatan ilmiah, seperti studi pustaka mendalam sehingga hasil kajian dapat diturunkan dalam bentuk pedoman;
- b. membekali sumber daya manusia dengan peningkatan kemampuan metodologis agar hasil kajian relevan antara masalah, hipotesis, metode yang dipilih serta simpulan yang dihasilkan;

- c. peningkatan mutu kompetensi penulis bahan ajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing serta wawasan Ke-BIPA-an lainnya.

Capaian Indikator Kinerja Program 8: Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan

Jumlah akses diplomasi kebahasaan merupakan kecakapan memanfaatkan ilmu, sumber daya, dan strategi kebahasaan untuk mengembangkan dan membina hubungan baik antarbangsa. Wujud nyata dari akses diplomasi ini adalah adanya keberadaan pihak-pihak yang dapat diberdayakan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, seperti mitra kepentingan, sahabat, diaspora, lembaga mitra kerja sama, serta lembaga terfasilitasi oleh program-program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oleh karena itu, wujud akses diplomasi kebahasaan pada IKP ini dapat berupa warga negara yang belajar dengan fasilitasi PPSDK, lembaga dan negara mitra yang terfasilitasi, maupun perseorangan yang mendapat bantuan dari program kemitraan dan kerja sama yang diusung.

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
					Target	Realisasi	%		
8. Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	1.037	8.081	10.580	2.726	3.300	3.081	93,4%	16.500	25.505



Capaian jumlah akses diplomasi kebahasaan didukung melalui tiga aktivitas, antara lain

1. jumlah penutur asing yang menjadi pemelajar bahasa Indonesia,
2. jumlah institusi penyelenggara BIPA,
3. jumlah bahan kebijakan teknis strategi dan diplomasi kebahasaan.

Jumlah Penutur Asing yang Menjadi Pemelajar Bahasa Indonesia

Penutur Asing yang menjadi pemelajar bahasa Indonesia sepanjang kurun waktu tahun 2015—2019 mencapai 25.505 orang pemelajar. Capaian ini dihasilkan dari 205 penugasan Pengajar BIPA lembaga/institusi penyelenggara BIPA yang tersebar di Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam, di tahun 2015—2019.



Persebaran penutur Bahasa Indonesia di negara ASEAN terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Negara	3 Negara (Singapura, Thailand, Vietnam)	7 Negara (Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam)	7 Negara (Filipina, Kamboja, Laos, , Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam)	6 Negara (Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam)	7 Negara (Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, , Thailand, Malaysia, Vietnam)
Jumlah Penugasan	8 Penugasan	46 Penugasan	67 Penugasan	52 Penugasan	39 Penugasan
Jumlah Pemelajar	1.037 orang	8.081 orang	10.580 orang	2.726 orang	3081 orang

Seiring dengan bertambahnya jumlah pengajar yang dikirim ke luar negeri hingga tahun 2019, jumlah pemelajar BIPA di wilayah ASEAN juga bertambah. Rerata kemampuan berbahasa Indonesia pemelajar BIPA ini berada pada tingkat level BIPA 1 hingga BIPA 2. Skor ini setara dengan tingkat pemelajar pada tingkat pemula atau setara dengan pemeringkat terbatas dan marginal dengan tolok ukur Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Pada kompetensi level BIPA 1 ini pemelajar mampu menggunakan konteks pengenalan diri dan pemenuhan kebutuhan konkret sehari-hari dan rutin dengan cara sederhana untuk berkomunikasi dengan mitra tutur. Sementara itu, pada level BIPA 2 pemelajar mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana, mendeskripsikan lingkungan sekitar, dan mengomunikasikan kebutuhan sehari-hari dan rutin.

Selama 5 tahun terakhir, tercatat perkembangan yang terus beranjak naik. Jumlah pemelajar BIPA berjumlah 1.037 orang pada 2015, 2016 sebanyak 8.081 orang, 2017 sebanyak 10.580 orang, dan 2018 sebanyak 3081orang. Sejak tahun 2015—2019, capaian jumlah pemelajar BIPA yang telah dilakukan oleh BPP Bahasa telah mencapai 25.505 orang. Jumlah ini telah melebihi target capaian yang telah ditetapkan.

Fasilitasi Lembaga Penyelenggara BIPA

Meningkatkan Peran Bahasa Indonesia di ASEAN dapat dilakukan melalui fasilitasi kepada lembaga penyelenggara BIPA, baik di dalam maupun luar negeri. Fasilitasi lembaga di dalam negeri, di antaranya melalui penguatan jejaring program kemitraan BIPA di beberapa balai dan kantor bahasa mengundang mitra kepentingan dari universitas/ perguruan tinggi. Fasilitasi lainnya berupa dukungan terhadap berbagai pertemuan keilmiahan yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi, seperti Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA (APPBIPA), serta lembaga terkait lainnya.



Fasilitasi lainnya berupa bimbingan teknis (bimtek) bagi para pengajar BIPA di dalam negeri. Adapun, pelaksanaan bimtek di luar negeri pada 2019 terlaksana di beberapa negara, antara lain Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Papua Nugini, Tiongkok, Timor Leste, Singapura, Thailand, Filipina, Mesir, dan Arab Saudi. Bimtek ke-BIPA-an bagi pengajar bahasa Indonesia di satuan pendidikan kerja sama (SPK), pengajar BIPA program Darmasiswa, calon kepala dan guru Sekolah Indonesia Luar Negeri, dan calon atase pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, BPP Bahasa juga bekerja sama dengan Yayasan American Indonesia Exchange Foundation (AMINEF) dalam program Fulbright--BPP Bahasa Foreign Language Teaching Assistant dan universitas-universitas di dalam dan luar negeri guna mengembangkan program BIPA.

Selain hal itu, BPP Bahasa melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak melalui wadah *joint working group* yang difasilitasi oleh Biro BPKLN, Kemendikbud dan wadah kerja sama bilateral oleh Kementerian Luar Negeri yang menghasilkan kerja sama dengan lembaga-lembaga di berbagai negara. Koordinasi juga dilakukan dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di 17 negara dalam rangka penyebaran fungsi bahasa negara. Negara akreditasi Atase Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Inggris, Jerman, Arab Saudi, Mesir, India, Papua Nugini, Australia.

Lembaga yang telah bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan menghasilkan naskah kerja sama yang ditandatangani para pihak sebagai turunan dari *Memorandum of Understanding (MoU)* antara pemerintah Indonesia, khususnya Kemendikbud, dan pemerintah negara sahabat, yaitu:

1. Lembaga di Luar Negeri
 - a. Huntingtower (Australia)
 - b. Sacred heart Girls College (Australia)
 - c. Mount Erin College (Australia)
 - d. FLTA Fulbright AMINEF (Amerika Serikat)
 - e. Maejo University (Thailand)
2. Dalam Negeri:
 - a. UIN Malik Maulana Ibrahim, Malang
 - b. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 - c. Universitas Mummadiyah Sumatra Utara
 - d. IAIN Surakarta
 - e. Universitas Ahmad Dahlan

Fasilitasi lainnya adalah penyelenggaraan kegiatan kompetitif seperti lomba pidato dan bercerita beserta apresiasi bagi para pemenang yang penyelenggaraannya merupakan hasil kerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN), Direktorat Warisan Diplomasi Budaya, dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi tentang fasilitas yang dan produk yang dihasilkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, disosialisasikan melalui laman bipa.kemdikbud.go.id dan labbineka.kemdikbud.go.id. Dalam laman BIPA Daring dimuat berbagai informasi dan produk yang berkaitan dengan ke-BIPA-an. Di samping laboratorium BIPA, tersedia juga layanan laboratorium laman labbineka beragam informasi dan produk yang berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah di Indonesia



Lomba Berbahasa Indonesia bagi Penutur Asing

Jumlah Bahan Kebijakan Teknis Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Sebagai lembaga kebahasaan pada unit utama Eselon I, BPP Bahasa harus juga menjalankan fungsi penyusunan dokumen kebijakan strategis, yakni menyusun bahan kebijakan teknis. Bahan kebijakan teknis disusun sesuai dengan arah kebijakan nasional. Kajian-kajian dilakukan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi lembaga guna menghasilkan rekomendasi untuk arah kebijakan program.

Adapun naskah Bahan Kebijakan Teknis yang disusun yaitu:

1. Bahan Kebijakan Teknis tentang Cyberbullying di media sosial pada pelajar Indonesia
2. Bahan Kebijakan Teknis tentang Pengembangan Pengkajian Forensik Kebahasaan
3. Bahan Kebijakan Teknis tentang Penggunaan Pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional dalam kajian penerjemahan

4. Bahan Kebijakan Teknis tentang Pembekalan wawasan komunikasi antar budaya sebagai dasar pembelajaran bagi tenaga pengajar BIPA
5. Bahan Kebijakan Teknis tentang Dampak pengiriman pengajar BIPA dalam internasionalisasi bahasa Indonesia
6. Bahan Kebijakan Teknis tentang Kesantunan berbahasa di media sosial
7. Bahan Kebijakan Teknis tentang Evaluasi kualitas laporan pelaksanaan tugas tenaga pengajar BIPA wilayah ASEAN 1, ASEAN 2, AMEROP, dan ASPASAF masa tugas 2015—2018
8. Bahan Kebijakan Teknis tentang Pemanfaatan Cerita Rakyat Indonesia sebagai Bahan Pendukung pembelajaran BIPA di ASEAN
9. Bahan Kebijakan Teknis tentang Strategi Akomodasi Komunikasi guru—siswa dan siswa—guru dalam proses pembelajaran di kelas
10. Bahan Kebijakan Teknis tentang Pengembangan kajian kebinekaan bahasa
11. Bahan Kebijakan Teknis Pendukung Literasi Nasional

Ketercapaian IKP Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut.

- a. Pengiriman tenaga pengajar BIPA atas kerja sama dengan berbagai pihak.
- b. Penyusunan bahan ajar BIPA dan bahan tes BIPA cetak dan daring.
- c. Bimbingan teknis bagi pengajar BIPA.
- d. Bimbingan teknis pengajaran BIPA (TOT) di luar negeri.
- e. Pemaksimalan peran teknologi informasi dalam pengembangan portal aplikasi BIPA Daring.
- f. Program apresiatif bagi penutur asing di luar negeri
- g. Pengkajian tentang dampak pengiriman baik

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKP Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan, antara lain, sebagai berikut.

- a. Kurang memadainya jumlah pengajar BIPA yang profesional jika dibandingkan dengan kebutuhan.
- b. Belum maksimalnya dukungan penginternasionalan bahasa Indonesia dari perwakilan pemerintah RI di beberapa negara dalam pengajaran bahasa Indonesia.
- c. Permasalahan klasik tentang penerbitan dokumen keberangkatan yang terlambat masih terjadi.

Adapun langkah-langkah antisipatif terhadap permasalahan yang ada agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain

- a. peningkatan jumlah dan mutu pengajar BIPA di dalam dan di luar negeri;
- b. pengembangan program dan/atau pusat pembelajaran BIPA di luar negeri;

- c. peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak secara kelembagaan ataupun individu di luar negeri,
- d. pengembangan jejaring dengan sumber daya yang potensial di luar negeri, seperti diaspora serta pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri.
- e. peningkatan penguatan dukungan kepada mitra dan sahabat Indonesia di luar negeri sebagai aset diplomasi lunak guna kepentingan Indonesia.

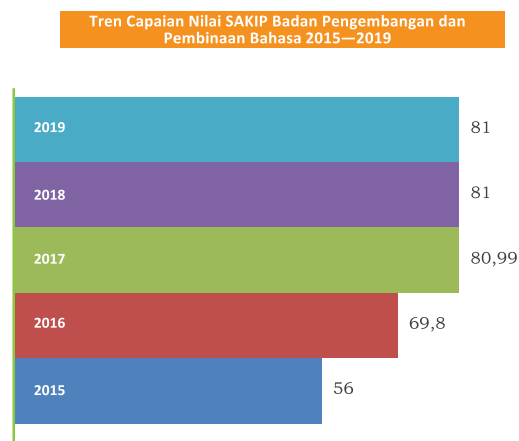
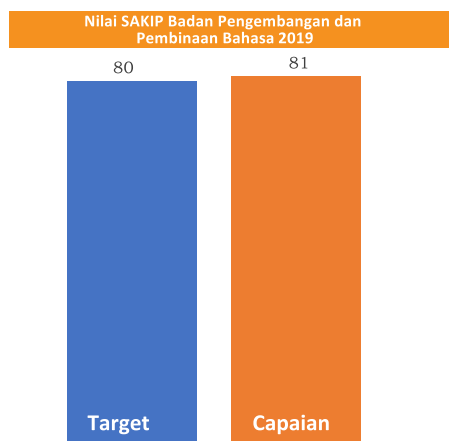
Sasaran Program 6: Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan

Pengukuran kinerja BPP Bahasa disusun untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan pada awal tahun. Upaya ini dilakukan agar perencanaan program, kegiatan, dan anggaran berjalan dengan baik. Pengukuran ini dilakukan juga sebagai bagian dari pemantauan dan pengendalian. Pengukuran tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BPP Bahasa melakukan klarifikasi atas hasil dan manfaat program dan kegiatan yang dicapai dalam rangka mewujudkan organisasi yang akuntabel. Hasil pengukuran kinerja tersebut juga digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja lembaga sebagai bentuk implementasi dan tanggung jawab menjalankan tugas fungsi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kepada masyarakat pada akhir tahun anggaran. Utamanya, upaya tersebut diharapkan berimplementasi pada capaian nilai SAKIP.

Indikator Kinerja Program 9: Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Capaian IKP Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	Capaian Renstra
					Target	Realisasi	%		
9. Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	56	69,8	80,99	81	80	81	101,3%	80	81



Upaya BPP Bahasa dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja terus dilakukan. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan peningkatan nilai skor SAKIP BPP Bahasa semakin meningkat. Pada tahun 2015, BPP Bahasa memperoleh skor 56. Pada tahun 2016, BPP Bahasa memperoleh skor 69,8. Pada tahun 2017, BPP Bahasa memperoleh skor 80,99. Pada tahun 2018, BPP Bahasa memperoleh skor 81. Pada tahun 2019, BPP Bahasa berharap dapat mempertahankan skor SAKIP senilai 81 atau lebih dari perolehan tahun 2018.

Dalam mewujudkan Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ada beberapa hal yang dilakukan. Berikut ini beberapa aktivitas layanan yang dilakukan oleh BPP Bahasa dalam meningkatkan nilai SAKIP.

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
2. Layanan Internal (*Overhead*)
3. Layanan Perkantoran

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I

Kegiatan manajemen merupakan proses perencanaan, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran anggaran secara efektif dan efisien. Dukungan aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kerja Sama.
2. Peningkatan Layanan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
3. Peningkatan Layanan Kepegawaian dan Tata Laksana.
4. Peningkatan Layanan Umum dan Publikasi.

1. Peningkatan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kerja Sama

Perencanaan adalah sejumlah aktivitas kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan rencana tersebut, dibutuhkan dukungan anggaran agar suatu rencana kegiatan dapat berjalan sesuai target. Penganggaran mempunyai peranan penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Komponen kegiatan yang dilaksanakan pada layanan perencanaan dan penganggaran BPP Bahasa tahun 2019, yaitu sebagai berikut.



Tim Perencanaan Badan Pengembangan Bahasa dalam Kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2020

a. **Penyusunan Rencana Program dan Anggaran**

Komponen kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran pada tahun 2019 menghasilkan keluaran lima dokumen kinerja dari beberapa aktivitas yang dilaksanakan. Kelima dokumen kinerja tersebut adalah, sebagai berikut.

- 1) Rapat Kerja Badan Pengembangan Bahasa I dan II
- 2) Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2020
- 3) Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2020
- 4) Finalisasi Draf Renstra Tahun 2020—2024
- 5) Penyempurnaan Draf Renstra Tahun 2020—2024

b. **Pemantauan Pelaksanaan Program dan Anggaran**



Diskusi Kelompok dalam Kegiatan Penyusunan LAKIP Satker
di Lingkungan Badan Bahasa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian/ lembaga harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam menjalankan tugas fungsinya, BPP Bahasa dalam melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan, juga mengacu pada peraturan tersebut. Selain itu, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, BPP Bahasa juga mengacu pada peraturan lainnya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2016.

Komponen kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Program dan Anggaran pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh BPP Bahasa menghasilkan keluaran empat dokumen kinerja dari beberapa aktivitas yang dilaksanakan, keempat dokumen kinerja tersebut adalah, sebagai berikut.

- 1) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- 3) Penyusunan Laporan dan Bahan Rekomendasi.
- 4) Evaluasi Penyusunan Bahan Renstra.

Empat dokumen yang ditargetkan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti.

c. Peningkatan Layanan Kerja Sama Kebahasaan dan Kesastraan



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Fakultas Liberal Arts Universitas Maejo, Thailand di Kantor PPSDK, Sentul, Bogor dan Pelaksanaan Kegiatan Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia (MABBIM)

Dalam menjalankan tugas pelayanan kerja sama kebahasaan dan kesastraan, BPP Badan terus berupaya dalam meningkatkan profesional pelayanan kepada masyarakat, yaitu salah satunya dengan melakukan kerja sama kebahasaan dan kesastraan. Pelayanan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan baik di dalam negeri maupun dilaksanakan dengan lembaga-lembaga kebahasaan di luar negeri. Hal tersebut untuk mewujudkan visi dan misi BPP Bahasa dalam melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Kegiatan yang dilakukan oleh BPP Badan pada tahun 2019 dalam upaya mendukung tercapainya target indikator dukungan manajemen eselon I, yaitu melakukan peningkatan layanan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan target yaitu sebanyak empat dokumen. Ke empat dokumen yang ditargetkan adalah dokumen Konsolidasi Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri, Honor KBN (Komite Buku Nasional), MABBIM (Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia) dan dokumen Mastera (Majelis Sastra Asia Tenggara).



Sampai akhir masa anggaran, 4 dokumen yang ditargetkan dapat terealisasi dengan baik. Namun, pada teknis pelaksanaan rintisan kerja sama, hampir di setiap satker mengalami kendala dan hambatan. Beberapa kendala hasil dari pemantauan kerja sama di 30 Balai/Kantor, yaitu sebagai berikut.

- 1) Satker melakukan kerja sama tanpa payung hukum yang jelas.
- 2) Kurangnya koordinasi antara satker pusat dan daerah dalam melakukan kerja sama.
- 3) Penandatanganan perjanjian kerja sama tanpa implementasi.
- 4) Kurang memperhatikan kesetaraan pihak-pihak yang akan menandatangani perjanjian kerja sama.
- 5) Satker kurang memahami maksud dan tujuan dari kerja sama sehingga tidak memenuhi unsur aman secara politis, yuridis, teknis, dan keamanan.

Langkah antisipasi yang dilakukan agar permasalahan dan hambatan tersebut dapat diatasi, adalah sebagai berikut.

- 1) BPP Bahasa perlu membuat pedoman penyusunan naskah kerja sama kebahasaan dan kesastraan.
- 2) BPP Bahasa perlu melakukan asistensi/sosialisasi kepada satker tentang penyusunan kerja sama kebahasaan dan kesastraan agar pemahaman satker terkait penyusunan naskah kerja sama meningkat.
- 3) Perlu meningkatkan koordinasi antara BPP Bahasa dengan satker dalam hal menyusun perjanjian kerja sama.

Peningkatan layanan perencanaan, penganggaran, dan kerja sama dilakukan melalui berbagai upaya. Berikut ini upaya yang BPP Bahasa lakukan.

- 1) Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran di Lingkungan BPP Bahasa.
- 2) Melakukan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran dengan Mitra Kerja BPP Bahasa.
- 3) Melakukan Penyusunan Bahan Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di lingkungan BPP Bahasa.
- 5) Melakukan Evaluasi Rencana Strategis 2015—2019 BPP Bahasa.
- 6) Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja satker.

2. Peningkatan Layanan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

a. Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

BPP Bahasa terus berupaya melakukan perubahan dalam mengelola keuangan negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk mendukung hal itu, beberapa komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPP Bahasa di tahun 2019, yaitu Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi, Pengujian, dan Pengesahan Dokumen Keuangan. Dua komponen kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti. Empat dokumen yang dihasilkan dari komponen kegiatan pengelolaan perbendaharaan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pendampingan Pengelolaan Keuangan di UPT.
- 2) Sinkronisasi Data SAIBA BPP Bahasa .
- 3) Laporan Keuangan Unaudited.
- 4) Laporan Keuangan BPP Bahasa

Selain itu, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, BPP Bahasa juga melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan. Diharapkan tindak lanjut yang dilakukan dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan sehingga kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat diperbaiki dengan baik.

b. Pengelolaan BMN yang Efektif, Efisien, Optimal dan Akuntabel

Dinamika pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terus berkembang. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan kerja keras serta saling bersinergi. Untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel harus dilakukan dengan terus-menerus berkesinambungan dan sinergi positif. Hal ini yang harus dilakukan BPP Bahasa sebagai pengguna barang. Selain itu, BPP Bahasa juga dituntut untuk mengelola BMN secara efektif, optimal, dan akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut, BPP Bahasa pada tahun 2019 melaksanakan delapan jenis komponen kegiatan dengan lima dokumen kinerja yang dihasilkan. Delapan komponen kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sinkronisasi BMN dengan UPT (dua dokumen).
- 2) Pengelolaan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Negara (BMN).
- 3) Inventarisasi Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) (satu dokumen).
- 4) Sinkronisasi SIMAK Barang Milik Negara (BMN) Semester I, Pra Semester, dan Tahunan (dua dokumen).
- 5) Sinkronisasi SIMAK Baran Milik Negara (BMN) Eselon I Triwulan I.
- 6) Layanan Pengadaan.
- 7) Pencetakan/Pengadaan Balnko, Formulir, dan Bahan Cetak Lainnnya.
- 8) Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN).



3. Peningkatan Layanan Kepegawaian dan Tata Laksana

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu instansi. Fungsi pokok manajemen sumber daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi perlu memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan baik kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi secara profesional perlu dilaksanakan dengan optimal, sehingga tujuan menjadikan manajemen kepegawaian yang andal dan profesional dapat terwujud. Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut, BPP Bahasa di tahun 2019, melaksanakan dua komponen kegiatan yaitu Layanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kompetensi Pegawai.

a. Layanan Kepegawaian yang Andal dan Profesional

Pada komponen Layanan Administrasi Kepegawaian, empat komponen aktivitas yang ditargetkan, yaitu Angka Kredit, Sumpah Jabatan, Penerimaan CPNS, dan Disiplin dan Pembinaan Pegawai. Keempat aktivitas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga persentase ketercapaian sebesar 100%. Untuk komponen kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai terdapat dua belas aktivitas yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pelatihan Bahasa Inggris
- 2) Pelatihan Masa Persiapan Pensiun
- 3) Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Pelatihan Jurnal Elektronik (*Open Journal System*)
- 5) Pelatihan Penyusunan Proposal Ilmiah
- 6) Diklat Teknis Pemberkasan
- 7) Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan
- 8) Peningkatan Kompetensi Pengelola Perpustakaan
- 9) Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepegawaian Bagi Pejabat di Lingkungan BPP Bahasa
- 10) Peningkatan Kompetensi Penerjemah
- 11) Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Individu Lanjutan

Dari dua belas aktivitas tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga persentase ketercapaiannya sebesar 100%.

a. Layanan Hukum dan Tata Laksana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Subbagian Hukum dan Tata Laksana terus berupaya mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPP Bahasa. Reformasi birokrasi bertujuan untuk melakukan perubahan, yaitu perubahan cara berpikir, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tata laksana, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas layanan publik.



Pada tahun 2019, dalam mendukung tujuan reformasi birokrasi tersebut, dihasilkan empat dokumen konsep rancangan peraturan yang dihasilkan, yaitu (a) Rancangan Permendikbud tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah; (b) Rancangan Permendikbud tentang Pedoman Umum Pembetulan Istilah; (c) Rancangan Permendikbud tentang Data Pokok Kebahasaan; dan (d) Rancangan Permendikbud tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPP Bahasa. Dari empat konsep rancangan peraturan tersebut, hanya satu yang selesai disusun di tahun 2019, yaitu Rancangan Permendikbud tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPP Bahasa.

Adapun yang menjadi hambatan tidak tercapainya target disebabkan hal sebagai berikut.

- 1) Kurangnya SDM dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
- 2) Proses penyusunan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu yang cukup lama.
- 3) Penyusunan dan pembahasan peraturan baru harus melibatkan Kementerian Hukum dan HAM.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja dapat tercapai, adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kompetensi SDM dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan
- 2) Koordinasi yang aktif antara BPP Bahasa dengan Kementerian Hukum dan HAM.

4. Peningkatan Layanan Umum dan Publikasi

Dalam mewujudkan pencapaian target indikator Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, BPP Bahasa berupaya melakukan peningkatan kualitas layanan umum dan layanan publikasi di Lingkungan BPP Bahasa. Peningkatan kualitas layanan umum dan publikasi bertujuan untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada pengguna,



Publikasi Produk Badan Pengembangan Bahasa pada Acara Pekan Perpustakaan Kemendikbud

baik pegawai di lingkungan Badan BPP Bahasa ataupun masyarakat umum. Enam aktivitas pokok pada Layanan Umum dan Publikasi di Sekretariat BPP Bahasa yaitu Pelayanan Kerumahtanggaan, Pelayanan Keprotokolan, Pelayanan Tata Persuratan, Pengelolaan Perpustakaan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi di Lingkungan Badan, dan Layanan Hubungan Masyarakat.



a. Komponen Kegiatan Layanan Kerumahtanggaan

Komponen Pelayanan Kerumahtanggaan di laksanakan oleh Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, yaitu mempunyai enam subkomponen di antaranya Pengelolaan Layanan Kerumah Tanggaan, Layanan Poliklinik, Koordinasi Bagian Umum, Simulasi Penanganan Bencana, Konservasi Energi dan Layanan Keamanan. Target enam subkomponen dapat dilaksanakan dengan baik dengan realisasi 100%.

b. Komponen Kegiatan Layanan Keprotokolan

Komponen Pelayanan Keprotokolan dilaksanakan melalui 8 subkomponen yang dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Layanan ini berupa layanan penyediaan konsumsi rapat-rapat dinas, Pelaksanaan Sumpah Pegawai/Pejabat, Konsumsi Layanan Tamu, Penyelenggaraan Peringatan Hardiknas, Peringatan Bulan Bahasa, Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Peringatan Hari Korpri, Gebyar Bulan Bahasa dan penugasan pegawai pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud melalui lomba-lomba serta lawatan olah raga antar unit eselon I.

c. Komponen Kegiatan Layanan Tata Persuratan

Komponen Layanan Tata Persuratan dilaksanakan melalui 7 SubKomponen. Dalam pencapaian kinerja, aktivitas yang dilakukan yaitu melalui kegiatan Penyinkronan Persuratan dan Kearsipan yang berkelanjutan. Sub-subkomponen kegiatan yang dilaksanakan, yaitu Pengelolaan Persuratan, Koordinasi Tata Persuratan, Kearsipan, dan Perpustakaan, Penyusunan Laporan Persuratan Catur Wulan, Peningkatan Layanan Persuratan, Inventarisasi Penyusunan Arsip, Penilaian Arsip dan Penataan Arsip. Seluruh sub komponen kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja 100%.

d. Komponen Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan

Kegiatan layanan perpustakaan merupakan layanan yang langsung dapat dirasakan bukan hanya oleh pegawai di lingkungan BPP Bahasa , tetapi juga oleh masyarakat umum. Sekretariat BPP Bahasa terus berupaya untuk meningkatkan layanan perpustakaan baik dari peningkatan sarana dan prasarana, maupun SDM pengelola perpustakaan itu sendiri. Dari tahun ke tahun, jumlah pengunjung perpustakaan BPP Bahasa selalu meningkat. Pada tahun 2019, 160.814 orang yang berkunjung ke perpustakaan BPP Bahasa yang terdiri atas 2.710 orang berkunjung langsung ke perpustakaan BPP Bahasa , dan 158.104 orang secara daring.

e. Komponen Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi di Lingkungan Badan

Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja suatu instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membutuhkan penyusunan data yang baik agar dapat membantu para pimpinan/pengambil kebijakan



dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil sebuah keputusan. Data yang baik dapat disusun dalam sebuah pangkalan data (*database*). Pangkalan data memiliki arti penting dalam instansi agar dapat mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah dalam rangka pencapaian rencana strategisnya. Dalam mengelola data kebahasaan dan kesastraan, BPP Bahasa memiliki aplikasi DAPOBAS (Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan). DAPOBAS merupakan sistem pengelolaan data kebahasaan dan kesastraan yang terintegrasi, untuk menunjang tata kelola data dan informasi yang terpadu di lingkungan BPP Bahasa. DAPOBAS dibentuk untuk menghimpun data kebahasaan dan kesastraan, terintegrasi dan dapat diakses, serta untuk memvalidasi kebenaran data. Untuk menyusun DAPOBAS yang terintegrasi, BPP Bahasa melakukan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, konversi pangkalan data, integrasi basis data, dan publikasi.

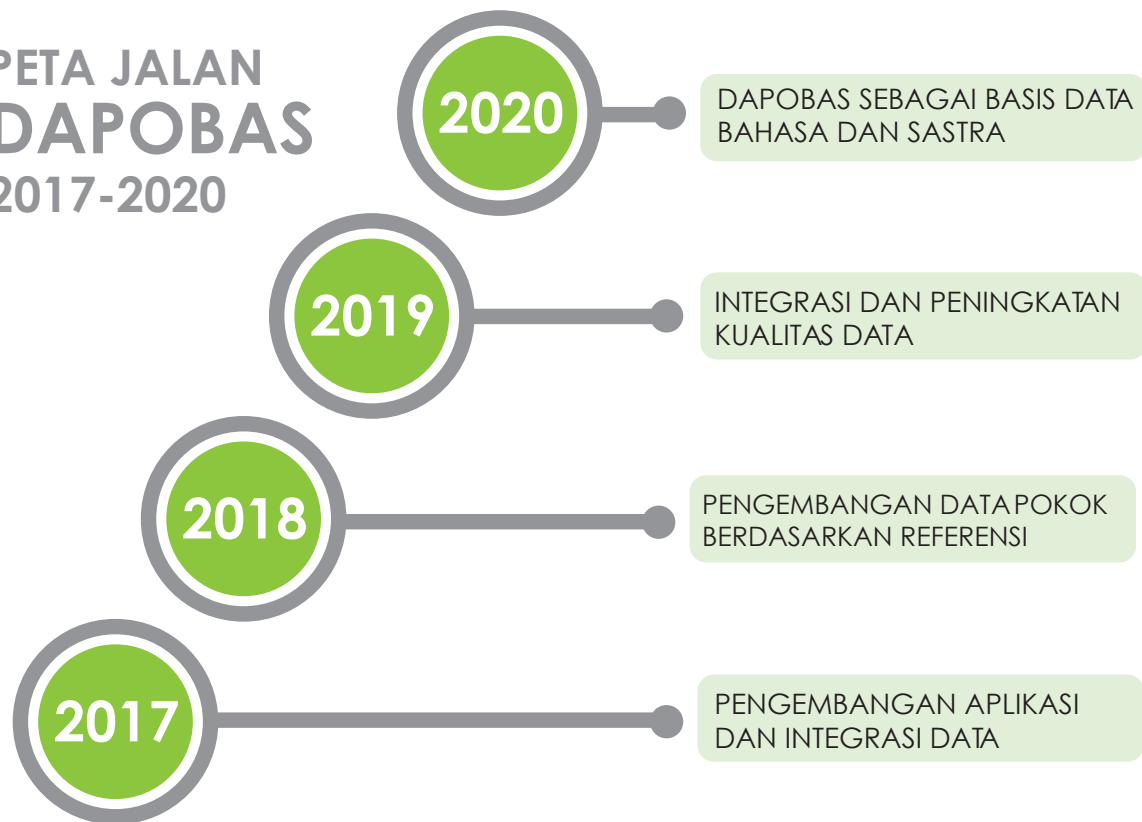


Sosialisasi Aplikasi DAPOBAS dan Publikasi Produk BPP Bahasa pada Acara Pekan Perpustakaan Kemendikbud

TAMPILAN APLIKASI DAPOBAS



PETA JALAN DAPOBAS 2017-2020



Tahun 2019, Komponen Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi di Lingkungan Badan didukung oleh empat subkomponen kegiatan, yaitu.

- 1) Pengembangan Sistem Informasi
- 2) Pengelolaan Data dan Informasi
- 3) Publikasi dan Pameran
- 4) Pengembangan Publikasi Media Digital

Target empat dokumen yang akan dicapai, terealisasi dengan baik di tahun 2019, sehingga persentase capaian 100%.

f. **Komponen Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat**

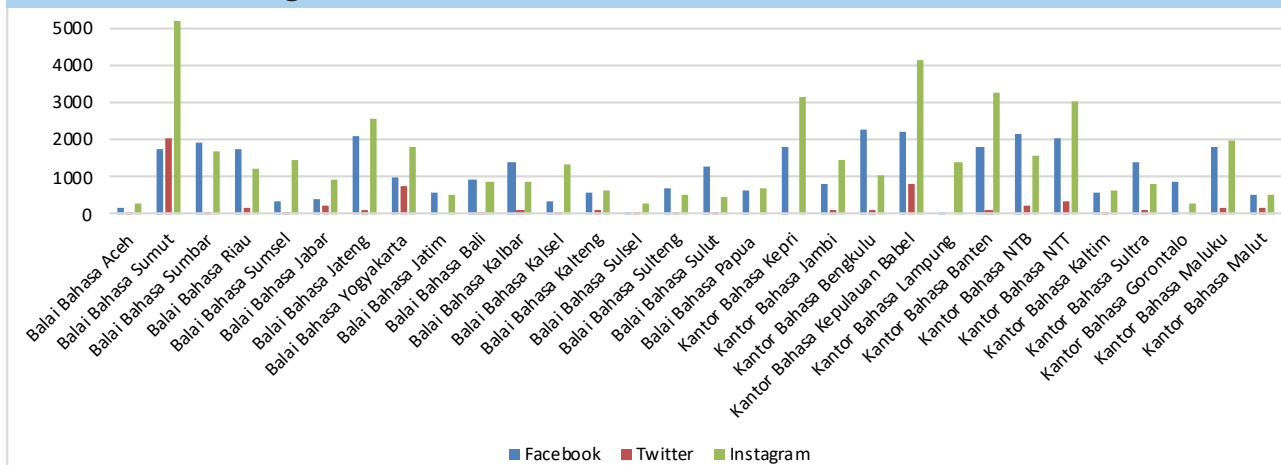
Dalam mewujudkan pencapaian target indikator kinerja, Layanan Dukungan Manajemen Eselon I didukung oleh beberapa komponen kegiatan yang salah satunya adalah komponen Layanan Hubungan Masyarakat. Pada 2019, pada komponen Layanan Hubungan Masyarakat menargetkan lima dokumen kegiatan untuk menjadi dasar pengukuran kinerja. Adapun kelima dokumen tersebut, yaitu:

- 1) dokumen Konsolidasi Kehumasan;
- 2) dokumen promosi BPP Bahasa melalui media massa;
- 3) dokumen Pengumpulan Bahan Kehumasan (Peliputan Kebahasaan dan Kesastraan);
- 4) dokumen publikasi oleh awak media;
- 5) dokumen evaluasi kerja Humas dan peningkatan kompetensi pengelola media sosial.

Sampai dengan Desember 2019, capaian kinerja pada komponen Layanan Hubungan Masyarakat sebesar 97%. Kegiatan-kegiatan yang menjadi komponen masukan pada 2019 adalah sebagai berikut.

- 1) Konsolidasi Kehumasan;
- 2) Promosi melalui Media Luar Ruang;
- 3) Promosi melalui Media Sosial;
- 4) Promosi melalui Media Cetak;
- 5) Promosi melalui Media Elektronik Radio;
- 6) Promosi melalui Media Elektronik Televisi;
- 7) Edaran Pers;
- 8) Penghimpunan Bahan Kehumasan (Peliputan Kebahasaan dan Kesastraan);
- 9) Evaluasi Layanan Kehumasan.

Jumlah Pengikut Akun Media Sosial Balai Bahasa dan Kantor Bahasa Tahun 2019



Upaya membangun relasi dan publikasi BPP Bahasa oleh BPP Bahasa membutuhkan konsistensi dan proses yang panjang. Selain itu, upaya tersebut juga harus mendapat dukungan dari seluruh jajaran pimpinan agar kegiatan kehumasan dapat dianggap sebagai bagian yang penting dalam strategi mencapai tujuan organisasi. Di era digital saat ini, Badan Pengembangan Bahasa tidak dapat menutup diri dari perubahan realitas sosial yang ada di masyarakat. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus terbuka dengan memperkenalkan instansi, produk, kebijakan, dan kegiatannya. Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tanggap dan aktif merespons komunikasi dari masyarakat, khususnya warganet dan awak media. Realitas saat ini lebih dari separuh penduduk Indonesia telah “melek” media sosial (temuan riset dari *We Are Social*, perusahaan media sosial asal Inggris, bersama dengan *Hootsuite*). Dalam laporan “*Digital Around the World 2019*”, terungkap bahwa dari total 268,2 juta penduduk di Indonesia, 150 juta di antaranya telah menggunakan media sosial. Ada peningkatan 20 juta pengguna media sosial di Indonesia dibanding tahun lalu. Generasi milenial mendominasi penggunaan



media sosial (berada pada rentang usia 18—34 tahun). Oleh karena itu, media sosial menjadi media kehumasan yang murah dan efektif pada saat ini.

Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum bagi humas pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Untuk itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara bersama-sama.

Upaya pembangunan relasi dan komunikasi antara BPP Bahasa dengan masyarakat harus mendapat dukung juga oleh UPT Balai/Kantor Bahasa. UPT Balai/Kantor Bahasa menjadi bagian dan perpanjangan tangan BPP Bahasa untuk melaksanakan UU Nomor 24 tahun 2009 dan mengajak masyarakat di daerah untuk mau melaksanakan moto “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing”. Pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Humas sebagai saluran komunikasi dan pembangunan relasi tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai kendala yang dapat memperlambat kerja dan pencapaian target kinerja, kendala atau hambatan, yaitu sebagai berikut.

1. Kehumasan belum dianggap sebagai bagian yang penting dalam strategi mencapai tujuan organisasi.
2. Pengelolaan media sosial belum optimal.
 - a. Kurang aktifnya media sosial balai/kantor bahasa.
 - b. Minimnya dukungan dari pimpinan terkait pengelolaan media sosial di balai/kantor bahasa.
 - c. Kurangnya kompetensi pengelola media sosial balai/kantor bahasa.
 - d. Belum adanya manajemen konten media sosial balai/kantor Bahasa.
3. Kendala dalam peliputan
 - a. Koordinasi dalam menghimpun agenda kegiatan di pusat-pusat dan balai/kantor bahasa belum berjalan efektif.
 - b. Anggaran peliputan minim dan SDM untuk meliput juga terbatas (tidak sebanding dengan jumlah kegiatan pusat-pusat dan balai/kantor bahasa).
4. Belanja iklan semakin mahal setiap tahunnya.
5. Sarana peralatan seperti kamera dan komputer, kurang memadai.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain.

1. Telah dilakukan lokakarya pengelolaan media sosial oleh BPP Bahasa (perlu



keberlanjutan). Dampak yang dapat dirasakan:

- a. Akun media sosial balai/kantor bahasa semakin aktif.
 - b. Pengelolaan media sosial balai/kantor bahasa semakin baik.
 - c. Beberapa balai/kantor bahasa mempunyai manajemen konten yang baik.
2. BPP Bahasa telah menerbitkan surat edaran terkait pembentukan tim media sosial balai/kantor bahasa, tetapi belum semua balai/kantor bahasa melaksanakannya.
 3. Perlu dilakukan koordinasi kehumasan yang dilakukan sejak awal tahun.
 4. Perlu dukungan dari pimpinan pusat-pusat dan balai/kantor bahasa untuk menginformasikan agenda kegiatannya.
 5. Perlu skala prioritas dalam peliputan kegiatan pusat-pusat dan balai/kantor bahasa mengingat anggaran dan SDM peliputan yang terbatas.
 6. Perlu kerja sama dari pusat-pusat dan untuk menjadi kontributor berita melalui lokakarya penulisan berita, fotografi, videografi, dan pemahaman kaidah bahasa Indonesia.
 7. Perlu perencanaan kehumasan sebagai bagian penting dalam strategi pencapaian tujuan organisasi.
 8. Perlu penjajakan kerja sama dengan media massa cetak/elektronik/daring terkait penayangan konten kebahasaan dan kesastraan. (beberapa stasiun tv telah mempunyai program terkait kebahasaan).
 9. Perlu mengajukan anggaran belanja iklan yang lebih proporsional dan mencari strategi pemberitaan yang baik.
 10. Permintaan sarana peralatan pengelolaan kehumasan yang lebih memadai.

LAYANAN INTERNAL

Layanan Internal merupakan pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh lembaga berupa penyediaan fasilitas kerja kepada karyawan yang dapat membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya agar tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Layanan Internal didukung oleh output kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang terdiri atas empat aktivitas kegiatan, yaitu Pengadaan Kendaraan Bermotor, Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi, Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran, dan Gedung Bangunan. Realisasi kinerja pada tahun 2019 per komponen kegiatan, sebagai berikut.

1. Komponen Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor

Pengadaan kendaraan Bermotor sebanyak 12 unit terdiri atas kendaraan roda empat sebanyak 9 unit dan roda dua 3 unit.



2. Komponen Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi

Pengadaan Sistem Informasi: Aplikasi UKBI daring, Acuan Kebahasaan, dan SIPETA (sistem informasi peta).

3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

- a. Inventaris kantor sebanyak 258 unit.
- b. Pengadaan buku perpustakaan sebanyak 311 buku.
- c. Pengadaan Genset dan Instalasi.

4. Komponen Kegiatan Gedung dan Bangunan

Revitalisasi Aula dan Ruang Rapat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, yaitu sebagai berikut.

1. Anggaran pengadaan barang/jasa baru terbuka pada semester dua.
2. Dalam satu paket pengadaan terdapat salah satu barang yang diinginkan (dengan spesifikasi tertentu) tetapi tidak tersedia pada penyedia yang ditunjuk, sehingga PPK harus merancang ulang rencana pengadaan dengan mendaftarkan paket baru pada aplikasi Siren baja (sistem pengadaan barang dan jasa).
3. Barang dengan spesifikasi tertentu tidak dapat disediakan oleh penyedia karena barang tersebut harus dikirim dari luar negeri.
4. Sulitnya melakukan koordinasi antara PPK dengan Pokja Pengadaan maupun antara Pokja Pengadaan internal karena kesibukan masing-masing.
5. Peserta yang mengikuti tender tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pemilihan sehingga tender harus dilakukan dua kali.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan, adalah sebagai berikut.

1. Segera memenuhi data dukung yang diperlukan untuk membuka blokir anggaran.
2. Melakukan pemecahan paket dan mencari penyedia lain yang dapat menyediakan barang tersebut.
3. Meminta penyedia segera memulai proses pengiriman barang pada saat penandatanganan kontrak.
4. Koordinasi yang aktif antara PPK dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa.
5. Pokja Pengadaan Barang/Jasa segera melakukan penunjukan langsung setelah mendapat persetujuan dari KPA dan PPK terhadap tender yang gagal.

LAYANAN PERKANTORAN

Dalam rangka layanan operasional perkantoran, Badan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana yang terpelihara dengan baik. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat



meningkatkan kinerja seluruh SDM, bukan hanya dari kuantitas melainkan juga kualitas kerja agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. BPP Bahasa dalam mencapai target sasaran kegiatan Layanan Perkantoran terdapat dua komponen kegiatan yang dilaksanakan, yaitu Pembayaran Gaji/tunjangan dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan merupakan salah satu bentuk apresiasi bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk perhatian lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada ASN adalah berupa tunjangan uang makan, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras untuk mendukung kesejahteraan keluarga pegawai. Selain itu, untuk menunjang kinerja pemerintah memberikan tunjangan struktural ASN, tunjangan fungsional ASN, tunjangan PPh ASN, belanja tunjangan umum, dan belanja pegawai tunjangan khusus/kegiatan serta belanja pegawai transito. Dengan demikian, diharapkan ASN dapat bekerja optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Komponen kegiatan lainnya yaitu Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menunjang kegiatan operasional pekerjaan sehari-hari di Sekretariat BPP Bahasa yaitu pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telepon, dan internet, penyediaan pakaian kerja pengemudi, satpam, dan tenaga lainnya, jamuan delegasi/tamu, penyelenggaraan poliklinik, pemeliharaan kendaraan dinas kantor, pembayaran langganan daya dan jasa, operasional perkantoran dan pimpinan, dan perawatan gedung kantor. Dari subkomponen-subkomponen itulah diharapkan dapat mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, sehingga kinerja pegawai BPP Bahasa semakin meningkat.

Berikut ini permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target.

1. Kesalahan perhitungan untuk kebutuhan anggaran belanja pegawai.
2. Anggaran pemeliharaan perkantoran tidak berdasarkan analisis kebutuhan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan adalah sebagai berikut.

1. Menentukan besaran pagu anggaran belanja pegawai harus berdasarkan analisis kebutuhan.
2. Menentukan besaran pagu anggaran untuk pemeliharaan perkantoran harus berdasarkan analisis kebutuhan.

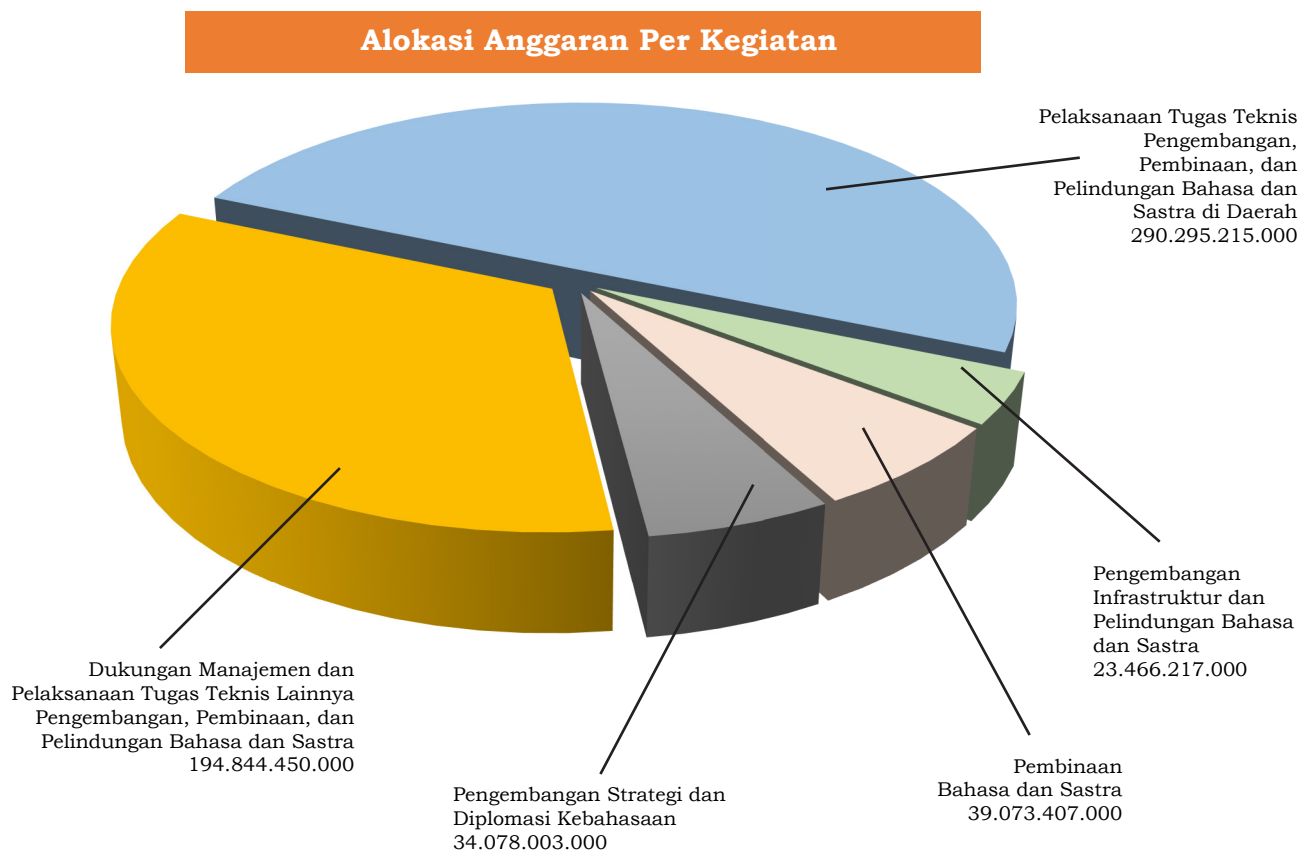
B. REALISASI ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BPP Bahasa pada Tahun Anggaran 2019 memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp581.757.292.000,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima**

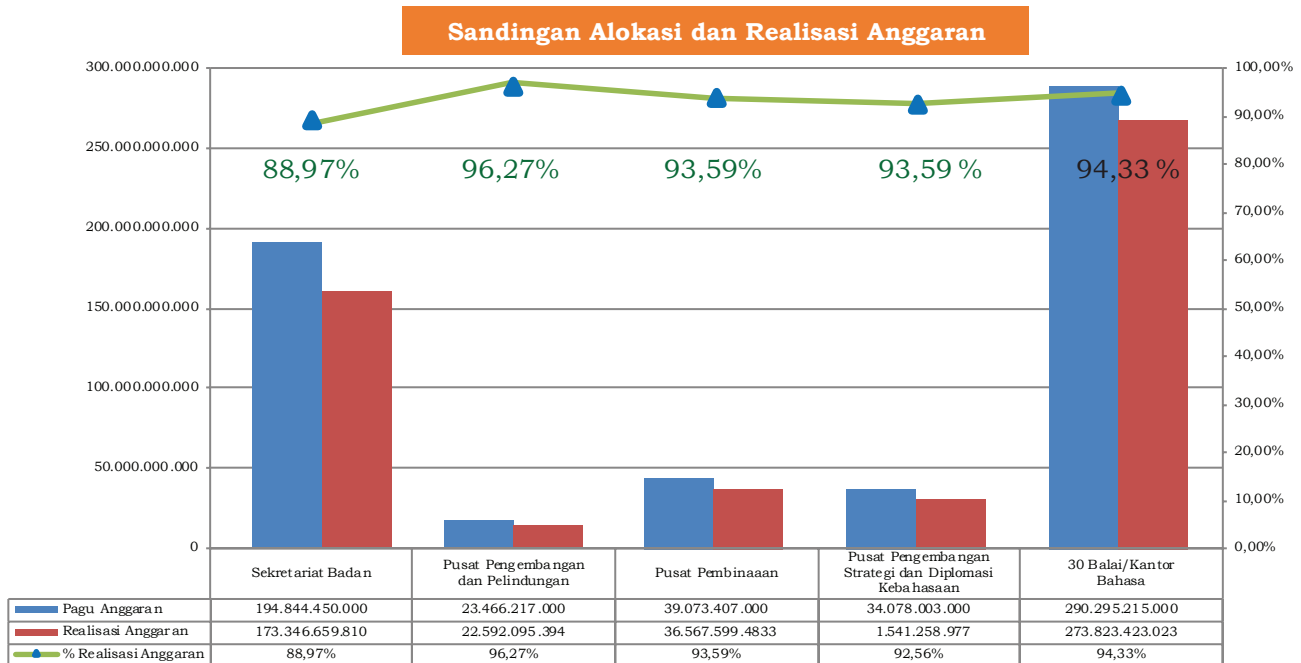


puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut didistribusikan ke lima kegiatan yang ada pada BPP Bahasa. Berikut rincian alokasi anggaran untuk lima kegiatan tersebut.

1. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebesar Rp23.466.217.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
2. Kegiatan Pembinaan Bahasa dan Sastra sebesar Rp39.073.407.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
3. Kegiatan Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan sebesar Rp34.078.003.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh puluh depalan juta tiga ribu rupiah).
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebesar Rp194.844.450.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah sebesar Rp290.295.215.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).



Anggaran terbesar yang terdapat pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp103.991.802.000,00. Berikut ini secara rinci sandingan alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan.

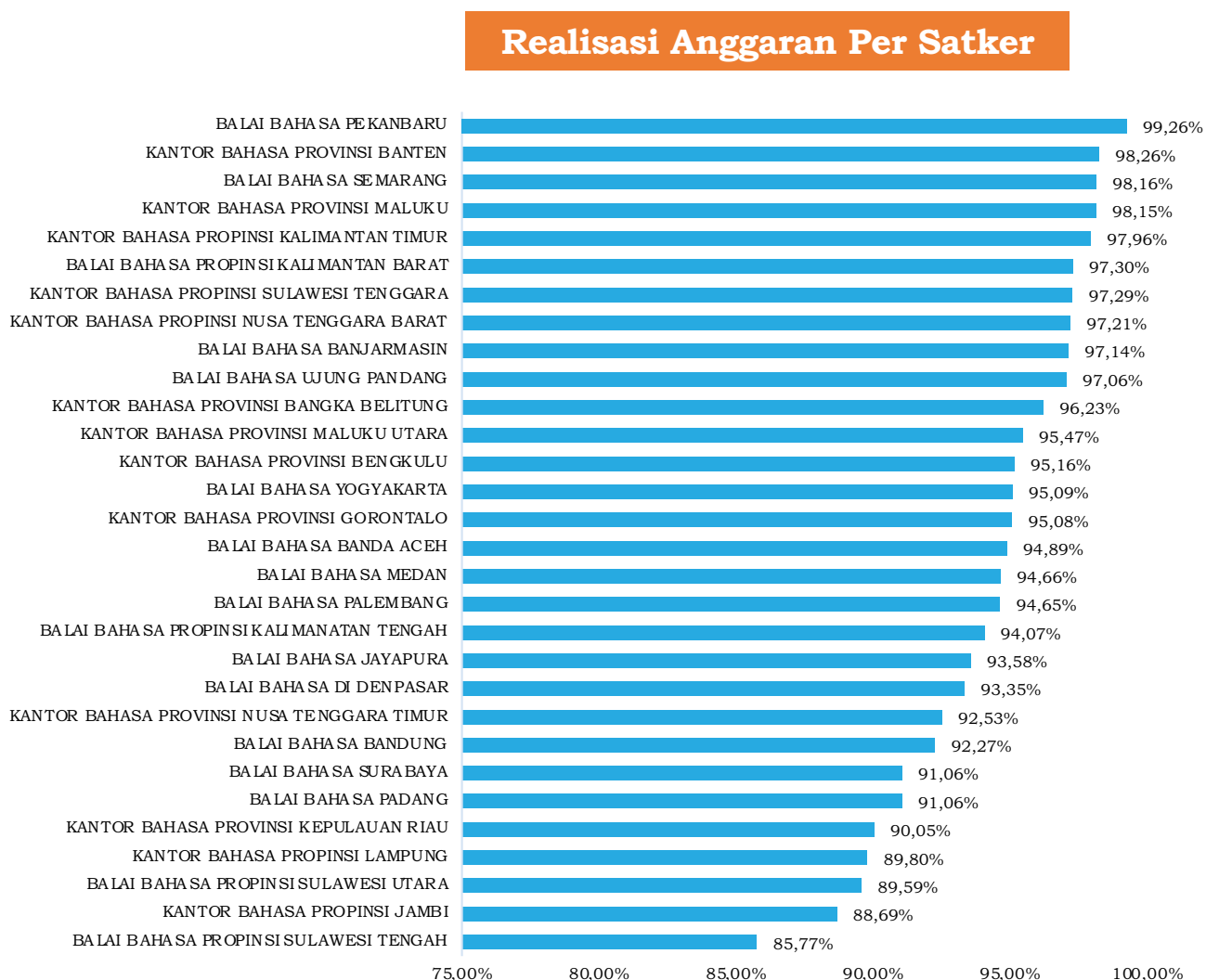


Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2018, BPP Bahasa dapat dikatakan menurun penyerapan anggarannya. Pada tahun 2018, BPP Bahasa dapat merealisasikan anggaran sebesar 92,48% atau sebesar Rp367.107.213.171,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar seratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dari pagu anggaran Rp396.946.190.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat 7,52% anggaran BPP Bahasa tidak terserap. Pada tahun 2019, penyerapan anggaran mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2018. Alokasi anggaran BPP Bahasa sebesar **Rp581.757.292.000,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** dapat terserap hingga 92,46% atau sebesar **Rp537.871.036.687,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah)**, dengan sisa anggaran **Rp43.886.255.313,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah)** atau sebesar 7,54% anggaran yang tidak terserap.

Meskipun Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPP Bahasa yang sebesar 97,50% tidak tercapai, penyerapan



anggaran BPP Bahasa pada tahun 2019 merupakan sebuah prestasi. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh satker yang ada di lingkungan BPP Bahasa. Berikut ini realisasi anggaran per satker BPP Bahasa.

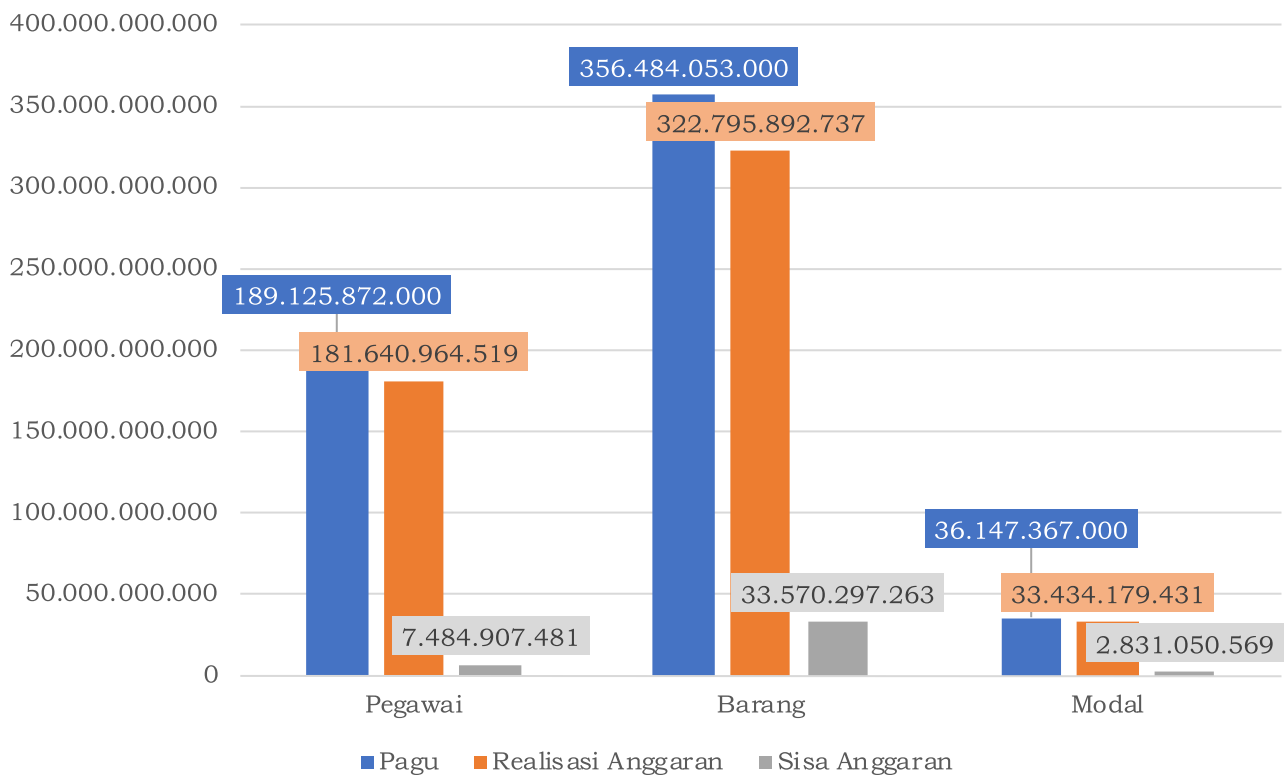


1. Realisasi Per Belanja

Realisasi Belanja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar RP537.871.036.687,00 atau 92,46% dari anggaran belanja sebesar Rp581.757.292.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	%
Pegawai	189.125.872.000	181.640.964.519	7.484.907.481	96,04%
Barang	356.484.053.000	322.795.892.737	33.570.297.263	90,58%
Modal	36.147.367.000	33.434.179.431	2.831.050.569	92,19%
<i>Total</i>	581.757.292.000	537.871.036.687	43.886.255.313	92,46%

Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Belanja



Berikut ini alokasi dan realisasi anggaran satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2019

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa					
		581.757.292.000	537.871.036.687	92,46%	43.886.255.313
Pusat					
1	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	194.844.450.000	173.346.659.810	88,97%	21.497.790.190
2	Pusat Pengembangan dan Pelindungan	23.466.217.000	22.592.095.394	96,27%	874.121.606
3	Pusat Pembinaan	39.073.407.000	36.567.599.483	93,59%	2.505.807.517
4	Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	34.078.003.000	31.541.258.977	92,56%	2.536.744.023
30 UPT (Balai/Kantor Bahasa)					
1	Balai Bahasa Yogyakarta	10.246.170.000	9.743.456.085	95,09%	502.713.915
2	Balai Bahasa Ujung Pandang	13.345.030.000	12.953.163.993	97,06%	391.866.007
3	Balai Bahasa Di Denpasar	11.144.080.000	10.403.262.343	93,35%	740.817.657
4	Balai Bahasa Padang	9.178.660.000	8.358.488.094	91,06%	820.171.906
5	Balai Bahasa Banjarmasin	9.547.948.000	9.275.087.571	97,14%	272.860.429
6	Balai Bahasa Jayapura	15.902.247.000	14.881.035.142	93,58%	1.021.211.858

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
7	Balai Bahasa Surabaya	12.490.755.000	11.374.705.262	91,06%	1.116.049.738
8	Balai Bahasa Bandung	13.899.490.000	12.825.587.396	92,27%	1.073.902.604
9	Balai Bahasa Semarang	11.266.820.000	11.059.378.988	98,16%	207.441.012
10	Balai Bahasa Medan	10.636.438.000	10.068.898.438	94,66%	567.539.562
11	Balai Bahasa Pekanbaru	9.072.000.000	9.005.208.581	99,26%	66.791.419
12	Balai Bahasa Banda Aceh	8.651.214.000	8.209.404.078	94,89%	441.809.922
13	Balai Bahasa Palembang	8.189.037.000	7.750.693.453	94,65%	438.343.547
14	Balai Bahasa Propinsi Kalimantan Barat	9.038.428.000	8.794.114.810	97,30%	244.313.190
15	Balai Bahasa Propinsi Sulawesi Tengah	9.044.866.000	7.757.630.283	85,77%	1.287.235.717
16	Balai Bahasa Propinsi Kalimantan Tengah	10.209.400.000	9.604.202.311	94,07%	605.197.689
17	Balai Bahasa Propinsi Sulawesi Utara	9.554.878.000	8.560.323.341	89,59%	994.554.659
18	Kantor Bahasa Propinsi Lampung	8.928.307.000	8.017.827.145	89,80%	910.479.855
19	Kantor Bahasa Propinsi Jambi	8.748.543.000	7.758.811.859	88,69%	989.731.141
20	Kantor Bahasa Propinsi Kalimantan Timur	9.623.951.000	9.427.238.787	97,96%	196.712.213
21	Kantor Bahasa Propinsi Nusa Tenggara Barat	8.843.964.000	8.597.305.819	97,21%	246.658.181
22	Kantor Bahasa Propinsi Sulawesi Tenggara	9.387.106.000	9.132.725.350	97,29%	254.380.650
23	Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung	6.514.524.000	6.268.646.305	96,23%	245.877.695
24	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	7.794.822.000	7.417.849.352	95,16%	376.972.648
25	Kantor Bahasa Provinsi Banten	7.297.860.000	7.170.977.900	98,26%	126.882.100
26	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	5.918.289.000	5.627.367.216	95,08%	290.921.784
27	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	8.647.157.000	8.255.195.806	95,47%	391.961.194
28	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	10.074.249.000	9.887.655.165	98,15%	186.593.835
29	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	7.427.496.000	6.688.628.192	90,05%	738.867.808
30	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	9.671.486.000	8.948.553.958	92,53%	722.932.042

2. Realisasi Per Output

Pada tahun 2019, Dana DIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebesar Rp581.757.292.000,00. Realisasi anggaran sampai pada akhir tahun anggaran sebesar Rp537.871.036.687,00 dengan sisa Rp43.886.255.313,00 dengan persentase capaian keuangan sebesar 92,46%. Berikut ini alokasi dan realisasi anggaran per *output* Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2019.

No	Nama Output	Total			
		Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	66.338.382.000	52.324.985.736	78,88%	14.013.396.264
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	14.612.519.000	13.178.165.079	90,18%	1.434.353.921
3	Layanan Perkantoran	113.893.549.000	107.843.508.995	94,69%	6.050.040.005
4	Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa	1.178.324.000	1.160.357.731	98,48%	17.966.269
5	Pedoman dan Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	332.523.000	324.222.083	97,50%	8.300.917
6	Kamus dan Pengembangan Istilah	3.560.099.000	3.490.997.856	98,06%	69.101.144
7	Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan dan Pelindungan	4.325.314.000	4.209.589.210	97,32%	115.724.790
8	Bahasa dan Sastra Terlindungi	2.958.053.000	2.909.711.578	98,37%	48.341.422
9	Fasilitasi Pengembangan dan Pelindungan	682.290.000	655.524.799	96,08%	26.765.201
10	Layanan Dukungan Manajemen Satker	2.036.122.000	1.987.458.985	97,61%	48.663.015
11	Layanan Perkantoran	8.393.492.000	7.854.233.152	93,58%	539.258.848
12	Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	2.315.644.000	2.219.097.836	95,83%	96.546.164
13	Bahan Bacaan Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra	391.830.000	309.048.600	78,87%	82.781.400
14	Wilayah Terbina Penggunaan Bahasa di Ruang Publik	1.395.813.000	1.286.460.800	92,17%	109.352.200
15	Badan Publik Terbina Penggunaan Bahasa	2.676.416.000	2.512.964.293	93,89%	163.451.707
16	Gerakan Literasi Nasional (GLN)	13.213.414.000	12.537.794.087	94,89%	675.619.913
17	Media Massa (Cetak, Elektronik, dan Daring) Terbina dalam Penggunaan Bahasa	1.241.048.000	1.038.546.930	83,68%	202.501.070
18	Mitra Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan	8.670.526.000	7.887.855.279	90,97%	782.670.721
19	Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	732.982.000	685.767.910	93,56%	47.214.090
20	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	807.751.000	698.176.395	86,43%	109.574.605
21	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.540.468.000	1.420.645.005	92,22%	119.822.995
22	Layanan Perkantoran	6.087.515.000	5.971.242.348	98,09%	116.272.652
23	Pedoman Diplomasi Kebahasaan	128.813.000	100.953.300	78,37%	27.859.700
24	Bahan Terjemahan	757.000.000	754.617.071	99,69%	2.382.929
25	Bahan Ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	1.000.385.000	673.431.649	67,32%	326.953.351
26	Bahan Ajar Bahasa Asing	568.270.000	526.010.765	92,56%	42.259.235
27	Pemelajar Bahasa Asing	334.275.000	321.676.849	96,23%	12.598.151
28	Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	16.858.625.000	16.225.557.260	96,24%	633.067.740
29	Institusi Penyelenggara BIPA Terfasilitasi	958.275.000	716.754.393	74,80%	241.520.607
30	Bahan Kebijakan Teknis Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	1.642.389.000	1.452.384.186	88,43%	190.004.814
31	Penerjemah Lisan dan Tulis	717.324.000	657.923.200	91,72%	59.400.800
32	Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra	1.215.760.000	1.140.097.683	93,78%	75.662.317
33	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	600.000.000	455.799.650	75,97%	144.200.350

No	Nama Output	Total			
		Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
34	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.373.998.000	1.098.432.399	79,94%	275.565.601
35	Layanan Perkantoran	7.922.889.000	7.417.620.572	93,62%	505.268.428
36	Mitra Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di Daerah	26.535.172.000	25.169.667.719	94,85%	1.365.504.281
37	Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa	12.734.700.000	11.752.744.552	92,29%	981.955.448
38	Media Massa di Daerah (Cetak, Elektronik, dan Daring) yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa	8.343.424.000	7.707.178.632	92,37%	636.245.368
39	Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa	22.523.107.000	20.458.058.490	90,83%	2.065.048.510
40	Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	24.647.474.000	23.122.283.766	93,81%	1.525.190.234
41	Bahan Ajar Bahasa dan Sastra	7.202.232.000	6.336.905.145	87,99%	865.326.855
42	Jejaring Kemitraan Program BIPA	2.472.266.000	2.199.586.064	88,97%	272.679.936
43	Kosakata Bahasa Daerah	10.474.507.000	9.500.814.717	90,70%	973.692.283
44	Rekomendasi Bahan Kebijakan Bahasa dan Sastra di Daerah	9.434.450.000	8.378.816.590	88,81%	1.055.633.410
45	Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Daerah	35.303.063.000	33.618.783.062	95,23%	1.684.279.938
46	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20.285.120.000	19.035.618.826	93,84%	1.249.501.174
47	Layanan Dukungan Manajemen Satker	16.415.788.000	14.987.686.561	91,30%	1.428.101.439
48	Layanan Perkantoran	93.923.912.000	91.555.278.899	97,48%	2.368.633.101
Total		581.757.292.000	537.871.036.687	92,46%	43.886.255.313

3. Realisasi Per Sasaran Program

Berikut ini alokasi dan realisasi anggaran per sasaran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2019.

Sasaran Strategis	Alokasi	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca	20.807.476.000	19.183.747.832	92,20%
Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	99.792.229.000	94.197.898.637	94,39%
Meningkatnya Bahasa dan Sastra Terkembangkan dan Terlindungi	34.142.607.000	31.607.828.929	92,58%
Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik	48.914.508.000	44.755.953.697	91,50%
Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN	24.676.718.000	22.994.931.385	93,18%
Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Kebahasaan	353.423.754.000	325.130.676.207	91,99%

4. Efisiensi Anggaran

Secara umum, capaian sembilan indikator tidak seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Dari sembilan indikator, terdapat tiga indikator yang tidak tercapai, yaitu: Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan, Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan. Dua indikator tercapai 100%, yaitu Jumlah Bahasa yang Berkembangkan dan Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi. Empat indikator lainnya lebih dari 100%, yaitu Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya, Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya, Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan, dan Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dari persentase capaian tersebut disandingkan dengan pagu per indikator untuk melihat efisiensi anggaran yang diperoleh BPP Bahasa. Berikut ini sandingannya.

Indikator Kinerja Program	Capaian	Pagu	Realisasi	Persentase
Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya	134,7%	99.792.229.000	94.197.898.637	94,4%
Jumlah Bahasa yang Berkembangkan	100%	14.035.497.000	12.991.812.573	92,56%
Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	100%	7.283.367.000	7.119.300.788	97,75%
Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	244,2%	48.914.508.000	44.755.953.697	91,50%
Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	300%	2.454.468.000	1.954.059.485	79,61%
Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	101,3%	353.423.754.000	325.130.676.207	91,99%

Beberapa indikator yang capaian kinerjanya lebih dari atau sama dengan 100% dan persentase penggunaan anggarannya di bawah 100% dapat dikatakan bahwa BPP Bahasa telah melakukan efisiensi anggaran.



Perpustakaan Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa dapat diakses secara daring.



**perpustakaanbadanbahasa.
kemdikbud.go.id/slims**

badanbahasa.kemdikbud.go.id | @BadanBahasa | badanbahasakemdikbud

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

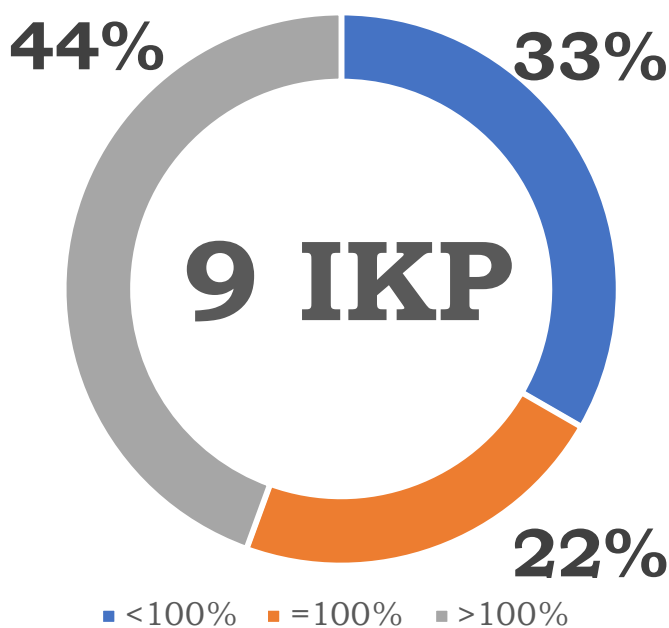
✓ sil dipindai



BAB IV

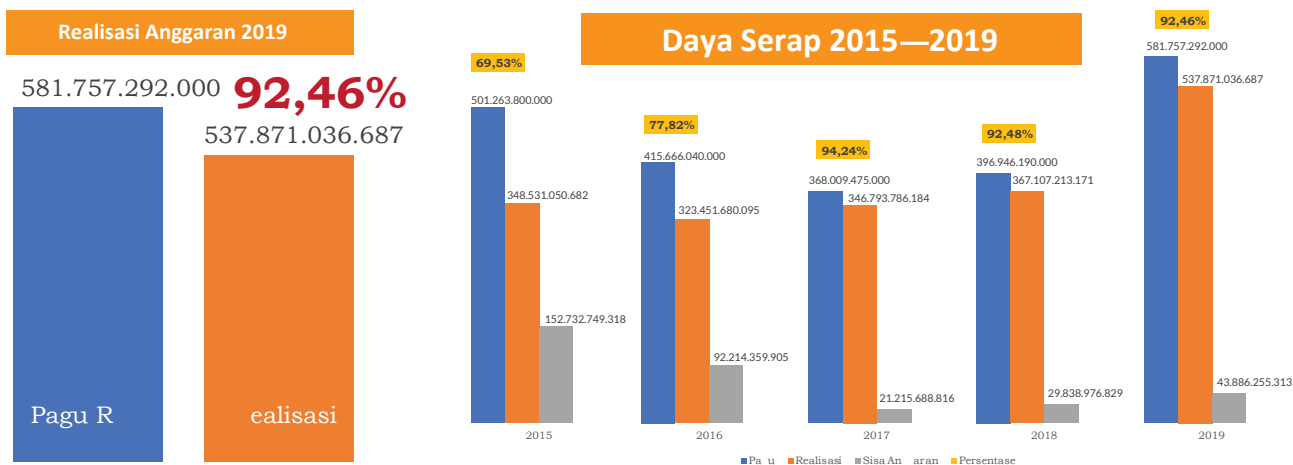
PENUTUP

Selama tahun 2019, BPP Bahasa berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Dari sembilan indikator, terdapat tiga indikator yang tidak mencapai 100% atau sebesar 33% dari sembilan IKP yang ditargetkan, yaitu: Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan, Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan. Dua indikator mencapai 100% atau sebesar 22% dari sembilan IKP yang ditargetkan, yaitu Jumlah Bahasa yang Berkembang dan Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi.

Empat indikator mencapai lebih dari 100% atau sebesar 44% dari sembilan IKP yang ditargetkan, yaitu Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesiannya, Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya, Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan, dan Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



BPP Bahasa terus meningkatkan kinerja untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran. Optimalisasi penyerapan dengan pemantauan dan pengendalian penggunaan anggaran berdampak positif sehingga pada tahun 2019, BPP Bahasa mampu menyerap anggaran lebih dari 92,46%.

Peningkatan pencapaian kinerja BPP Bahasa juga dapat dilihat pada hasil pengukuran aspek dari beberapa implementasi yang diukur dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan.



Selain capaian indikator kinerja dan anggaran, BPP Bahasa juga terus melakukan beberapa langkah terkait dengan upaya peningkatan kinerja lembaga, terutama terkait dengan pelaksanaan program dan keuangan. Dari hasil evaluasi kinerja yang melibatkan Biro PKLN, Biro Keuangan, dan Itjen kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Bappenas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Pelibatan masyarakat/pemangku kepentingan sebagai mitra untuk merumuskan strategi agar program BPP Bahasa tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. BPP Bahasa belum secara maksimal melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan bahasa daerah.
3. Belum ada payung hukum dalam menjalin kemitraan dan melaksanakan tugas di daerah yang terkait dengan instansi pemerintah lain, misalnya: layanan saksi ahli bahasa dan sastra.
4. Belum ada sinkronisasi kegiatan penelitian bahasa dan sastra antara BPP Bahasa dengan pemerintah daerah.
5. UKBI belum menjadi instrumen penjaminan mutu kemampuan berbahasa Indonesia.
6. Berkaitan dengan Gerakan Literasi Nasional, Program Bahasa dan Sastra memiliki peran penting sebagai media mencerdaskan dan perpustakaan merupakan Etalase Bahasa dan Sastra, Pembentuk Karakter Unggul.
7. Peneliti sebagai sumber daya membutuhkan pengelolaan yang lebih baik sebagai penggerak Kantor/Balai, kegiatan penelitian yang dilakukan baik Kantor/Balai/BPP Bahasa masih tumpang tindih, dan bukan merupakan layanan utama karena kegiatan Penelitian berkontribusi menghasilkan *output* pada keseluruhan layanan Kantor/Balai/BPP Bahasa.
8. Layanan Pendampingan bahasa berkaitan dengan saksi ahli di lembaga penegak hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara memiliki tantangan dalam implementasinya di Kantor/Balai, karena dibutuhkan pengakuan atau standarisasi terhadap keahlian sebagai saksi ahli dalam penyelesaian kasus yang membutuhkan ahli bahasa.
9. Program Pengembangan dan Pembinaan telah menjadi fungsi yang rutin dilakukan sehingga dibutuhkan inovasi dan strategi terhadap pencapaian yang lebih baik pada Program Perlindungan Bahasa dan Sastra. Program Perlindungan yang dilakukan Kantor/Balai harus menjaga keragaman bahasa dan sastra yang terancam punah, melakukan penelitian, dan pemetaan serta pelestarian Bahasa dan Sastra.
10. BPP Bahasa harus menemukenali apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia, agar layanan/produk seperti BIPA, UKBI, Kamus dll menjadi tepat sasaran dan bermanfaat sehingga menjadikan layanan/produk tersebut sebuah kebutuhan (*demand*).
11. Menyusun kembali rancangan sasaran strategis, indikator, dan output disesuaikan dengan tugas dan fungsi.
12. Memetakan kembali alat ukur (indikator) yang masih memiliki 2 output untuk 1 indikator.

13. Menyusun Norma, Standar, Kriteria, dan Pedoman (NSPK) yang teregister (validasi Subbagian Hukum Tata Laksana, dan/atau Biro Hukum dan Organisasi) untuk setiap kegiatan yang berada di dalam *output*.
14. Menemukanasi dasar hukum pelaksanaan setiap kegiatan/aktivitas dalam pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra, baik Bahasa Negara maupun Bahasa Daerah.
15. Menyusun rencana kegiatan kerja sama dan fasilitasi Bersama dengan Pemerintah Daerah terkait Pengembangan Bahasa Daerah (fungsi secara vertikal).
16. Revisi anggaran yang diperlukan untuk *output* prioritas, seharusnya lebih diprioritaskan sehingga capaian *output* tetap dapat mendukung capaian indikator, target Renstra.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan adalah sebagai berikut.


1. BPP Bahasa perlu memetakan secara lebih lengkap mitra dan pemangku kepentingan dan merumuskan strategi pelibatan masing-masing mitra.
2. BPP Bahasa perlu melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah terutama dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan bahasa daerah.
3. Perlunya payung hukum di tingkat Pusat yang dapat dirujuk oleh UPT di daerah dalam menjalin kemitraan dan melaksanakan tugas di daerah yang terkait dengan instansi pemerintah lain, misalnya: layanan saksi ahli bahasa dan sastra sehingga ada penguatan hukum bagi utusan saksi ahli bahasa dan sastra.
4. Kantor/Balai harus lebih terbuka dan proaktif melibatkan masyarakat dalam implementasi Program Bahasa karena kelompok sasaran dari Program adalah masyarakat.
5. Mengarahkan kegiatan penelitian yang dilakukan secara mandiri dan kelompok untuk mendukung tugas dan fungsi yang ada dalam layanan Program Bahasa yang disinkronisasi dengan kegiatan penelitian yang dilakukan di Pusat dan Daerah.
6. Perlunya penguatan fungsi UKBI sebagai instrumen penjaminan mutu kemampuan berbahasa Indonesia dan diplomasi. Kewajiban pencapaian kompetensi berbahasa Indonesia perlu didorong secara bertahap pada sektor tertentu (misalnya: pendidikan) dan diperhitungkan konsekuensi pembiayaannya.
7. Dibutuhkan sinkronisasi dan pemetaan *output* Balai/Kantor untuk meningkatkan kualitas layanan Balai/Kantor.
8. Dukungan kebijakan sangat dibutuhkan untuk mengangkat UKBI sebagai standar bahasa yang potensial menjadi sumber PNBPN, baik dalam bidang


pendidikan atau profesi (contoh: persyaratan masuk sekolah ataupun kenaikan pangkat atau golongan)

9. Berkaitan dengan Gerakan Literasi Nasional, Program Bahasa dan Sastra memiliki peran penting sebagai media mencerdaskan dan perpustakaan merupakan Etalase Bahasa dan Sastra, Pembentuk Karakter Unggul.
10. Peneliti sebagai sumber daya membutuhkan pengelolaan yang lebih baik sebagai penggerak Kantor/Balai, kegiatan penelitian yang dilakukan baik Kantor/Balai/BPP Bahasa masih tumpang tindih, dan bukan merupakan layanan utama karena kegiatan Penelitian berkontribusi menghasilkan *output* pada keseluruhan layanan Kantor/Balai/BPP Bahasa.
11. Layanan Pendampingan bahasa berkaitan dengan saksi ahli di lembaga penegak hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumen negara memiliki tantangan dalam implementasinya di Kantor/Balai, karena dibutuhkan pengakuan atau standarisasi terhadap keahlian sebagai saksi ahli dalam penyelesaian kasus yang membutuhkan ahli bahasa.
12. Program Pengembangan dan Pembinaan telah menjadi fungsi yang rutin dilakukan sehingga dibutuhkan inovasi dan strategi terhadap pencapaian yang lebih baik pada Program Perlindungan Bahasa dan Sastra. Program Perlindungan yang dilakukan Kantor/Balai harus menjaga keragaman bahasa dan sastra yang terancam punah, melakukan penelitian, dan pemetaan serta pelestarian Bahasa dan Sastra.
13. BPP Bahasa harus menemukenali apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia, agar layanan/produk seperti BIPA, UKBI, Kamus dll menjadi tepat sasaran dan bermanfaat sehingga menjadikan layanan/produk tersebut sebuah kebutuhan (*demand*).
14. Menyusun kembali rancangan sasaran strategis, indikator, dan output disesuaikan dengan tugas dan fungsi.
15. Memetakan kembali alat ukur (indikator) yang masih memiliki 2 output untuk 1 indikator.
16. Menyusun Norma, Standar, Kriteria, dan Pedoman (NSPK) yang teregister (validasi Subbagian Hukum Tata Laksana, dan/atau Biro Hukum dan Organisasi) untuk setiap kegiatan yang berada di dalam *output*.
17. Menemukenali dasar hukum pelaksanaan setiap kegiatan/aktivitas dalam pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra, baik Bahasa Negara maupun Bahasa Daerah.
18. Menyusun rencana kegiatan kerja sama dan fasilitasi Bersama dengan Pemerintah Daerah terkait Pengembangan Bahasa Daerah (fungsi secara vertikal).
19. Revisi anggaran yang diperlukan untuk *output* prioritas, seharusnya lebih diprioritaskan sehingga capaian *output* tetap dapat mendukung capaian indikator, target Renstra.



 badanbahasa.kemdikbud.go.id

 @BadanBahasa

 [badanbahasakemendikbud](https://www.instagram.com/badanbahasakemendikbud)

 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

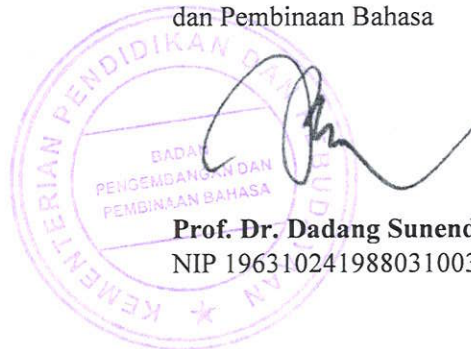
 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
(sesuai dengan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya
3	Meningkatnya Bahasa dan Sastra Terkembangkan dan Terlindungi	Jumlah Bahasa Terkembangkan
		Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi
		Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
4	Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya
5	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN	Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan
		Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan
6	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola	Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kepala Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa



Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.
NIP 196310241988031003

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2019

Unit kerja: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
1	Pelaksanaan Pengembangan, dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	200 bahan ajar	Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	200 bahan ajar	16.905.343.000
		Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang di bina Kemahiran Berbahasa Indonesiannya	1.500 orang	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI		Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang di bina Kemahiran Berbahasa Indonesiannya	1.500 orang	124.208.569.000
		Jumlah Bahasa Berkembangkan	2.000 kosakata	Menguatnya Komitmen Nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia		Jumlah Bahasa Berkembangkan	2.000 kosakata	12.194.830.000
		Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	44 bahasa dan sastra			Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	44 bahasa dan sastra	7.316.858.000
2	Pelaksanaan Administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	346 naskah			Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	346 naskah	22.758.869.000
		Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaannya	226 lembaga	Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik		Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaannya	226 lembaga	78.415.006.000
		Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	2 naskah	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia Melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN		Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	2 naskah	9.016.568.000
		Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	3.300 orang			Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	3.300 orang	
3	Pelaksanaan Administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	80 nilai	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan		Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	80 nilai	298.641.391.000
4	Penyusunan Kebijakan teknis, rencana, program anggaran pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra							
		Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra						

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa





Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

A. TUGAS

Melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra

B. FUNGSI DAN TARGET CAPAIAN 2019

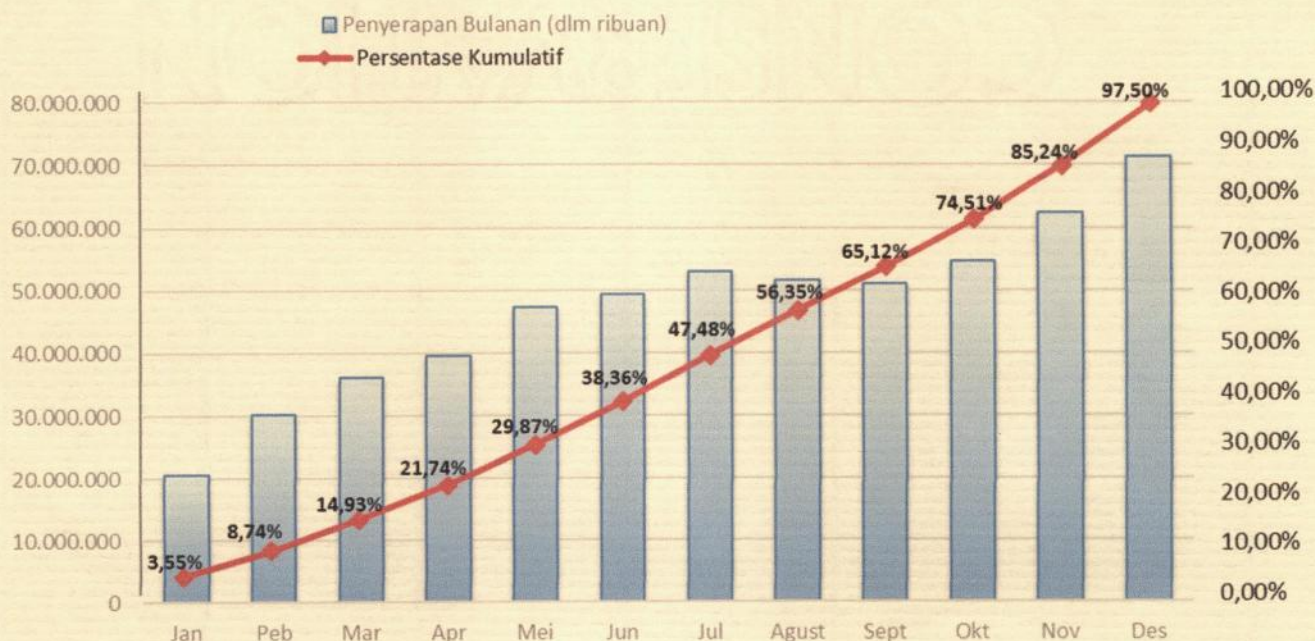
Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

NO	FUNGSI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra	Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	200 bahan ajar	16.905.343.000
		Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang di bina Kemahiran Berbahasa Indonesiannya	1.500 orang	124.208.569.000
		Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia	1. Jumlah Bahasa Terkembangkan	2.000 kosakata	12.194.830.000
			2. Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	44 bahasa dan sastra	7.316.858.000
			3. Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	346 naskah	22.758.869.000
		Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	226 lembaga	78.415.006.000
		Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN	1. Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	2 naskah	9.016.568.000
			2. Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	3.300 orang	

NO	FUNGSI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan	Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	80 nilai	298.641.391.000
3	Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra				
4	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra				

Jumlah alokasi anggaran program Pengembangan, Pelindungan, dan Pembinaan Bahasa dan Sastra, Sebesar **Rp581.986.879.000** (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

C. Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2019 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



No	Komponen	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyerapan Bulanan (dlm ribuan)	20.660.534	30.205.119	36.024.988	39.633.306	47.315.533	49.410.686	53.077.203	51.622.236	51.040.249	54.648.568	62.447.192	71.351.591
2	Penyerapan Kumulatif	20.660.534	50.865.653	86.890.641	126.523.947	173.839.481	223.250.167	276.327.370	327.949.606	378.989.856	433.638.424	496.085.616	567.437.207
3	Persentase Kumulatif	3,55%	8,74%	14,93%	21,74%	29,87%	38,36%	47,48%	56,35%	65,12%	74,51%	85,24%	97,50%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku.


Jakarta, Januari 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

Kepala Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa,



Dadang Sunendar



Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

A. TUGAS

Melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra, dan Perbukuan

B. FUNGSI DAN TARGET CAPAIAN 2019

Program Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan Perbukuan

No	FUNGSI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra	Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	200 Bahan Ajar	20.807.476.000
		Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang di bina Kemahiran Berbahasa Indonesianya	1.500 Orang	99.792.229.000
		Meningkatnya Bahasa dan Sastra Berkembangkan dan Terlindungi	1 Jumlah Bahasa Berkembangkan	2.000 Kosakata	14.034.606.000
			2 Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	44 Bahasa dan Sastra	3.640.343.000
			3 Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	346 Naskah	16.467.658.000
		Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1 Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	226 Lembaga	48.914.508.000
		Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan	1 Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	2 Naskah	3.670.228.000

No	FUNGSI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
		Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Tingkat ASEAN	2 Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	3.300 Orang	21.006.490.000
2	Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan	1 Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	80 Nilai	353.423.754.000
3	Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra				
4	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra				

Jumlah alokasi anggaran program Pengembangan, Pelindungan, dan Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan Perbukuan, Sebesar **Rp581.757.292.000** (*Lima Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Rencana Penyerapan Anggaran Revisi Tahun 2019
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan



Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okto	Nov	Des
Penyerapan bulanan	17.743.597	29.378.743	28.796.986	33.916.450	45.900.650	25.306.442	5.061.288	24.066.457	86.430.023	85.631.215	127.154.832	57.826.675
Penyerapan Kumulatif	17.743.597	47.122.341	75.919.327	109.835.777	155.736.427	181.042.869	186.104.158	210.170.615	296.600.638	382.231.853	509.386.685	567.213.360
Persentase Kumulatif	3,05%	8,10%	13,05%	18,88%	26,77%	31,12%	31,99%	36,13%	50,98%	65,70%	87,56%	97,50%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku.

Jakarta, Desember 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Badan Pengembangan
Bahasa dan Perbukuan,

Muhadjir Effendy


Dadang Sunendar /

REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA ESELON I [update 10 Februari 2020]

05 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA		FISIK			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	%	
SP.6.1	Meningkatnya Jumlah Judul Buku Pengayaan Literasi Baca				
IKP.6.1.1	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan	939	240	25,56%	
	[2022.002] Bahan Bacaan Pengayaan Pelajaran Bahasa Indonesia	20		0,00%	PUSBIN -- PUSBANG
	Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra	919	240	26,12%	UPT
SP.6.2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI				
IKP.6.2.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Dibina Kemahiran Berbahasa Indonesianya	103.514	79.825	77,12%	
	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	1.990	2.021	101,56%	PUSBIN
	Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	5.000	5.012	100,24%	PUSBIN
	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	3.000	2.423	80,77%	PUSBIN
	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	47.313	32.150	67,95%	UPT
	Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	46.211	38.219	82,71%	UPT
SP.6.3	Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa				
IKP.6.3.1	Jumlah Bahasa Berkembangan	59.946	51.503	85,92%	
	Jumlah Kosakata Indonesia	2.000	2.000	100,00%	PUSBANG
	Jumlah Kosakata Indonesia	57.946	49.503	85,43%	UPT
IKP.6.3.2	Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi	126	127	100,79%	
	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Terkonservasi, dan Terevitalisasi	43	42	97,67%	PUSBANG
	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Terkonsevasi, dan Terevitalisasi	83	85	102,41%	UPT
IKP.6.3.3	Jumlah Bahan Penelitian Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	223	196	87,89%	
	Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra	28	28	100,00%	PUSBANG
	Jumlah Kajian Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	10	10	100,00%	PPSDK
	Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra	185	158	85,41%	UPT
SP.6.4	Meningkatnya Pengendalian Bahasa Indonesia di Ruang Publik				
IKP.6.4.1	Jumlah Badan Publik dan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	3.900	3.724	95,49%	
	Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	502	512	101,99%	PUSBIN
	Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	40	40	100,00%	PUSBIN
	Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	1.813	1.672	92,22%	UPT
	Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	1.545	1.500	97,09%	UPT
SP.6.5	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di				
IKP.6.5.1	Jumlah Bahan Pengembangan Strategi Kebahasaan	55	42	76,36%	

05 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA		FISIK			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	%	
	Jumlah Pedoman Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	4	4	100,00%	PPSDK
	Jumlah Bahan Ajar BIPA	14	14	100,00%	PPSDK
	Jumlah Bahan Ajar Bahasa Asing Strategis	9	9	100,00%	PPSDK
	Jumlah bahan ajar BIPA	28	15	53,57%	UPT
IKP.6.5.2	Jumlah Akses Diplomasi Kebahasaan	1.720	1.720	100,00%	
	Jumlah Pemelajar Bahasa Asing Strategis	1.500	1.500	100,00%	PPSDK
	Jumlah Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri	220	220	100,00%	PPSDK
SP.6.6	Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Layanan Tata Kelola Penanganan Kebahasaan				
IKP.6.6.1	Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	80		0,00%	
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I SEKRETARIAT	1	1	100,00%	SEKRETARIAT
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I PUSBANG	1	1	50,00%	PUSBANG
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I PUSBIN	1	1	100,00%	PUSBIN
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I PPSDK	1	1	100,00%	PPSDK
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I UPT	1	1	100,00%	UPT

PENGUKURAN KINERJA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

TAHUN : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA/KOMPONEN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI		
				TARGET	%	ANGGARAN
Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Badan Bahasa	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	66.338.382.000	1	100	52.318.735.734
	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		5.122.995.000			3.996.524.864
	Pemantauan Pelaksanaan Program dan Anggaran		2.570.815.000			2.538.195.422
	Pengelolaan Perbendaharaan		2.007.320.000			1.967.785.340
	Verifikasi, Pengujian, dan Pengesahan Dokumen Keuangan		676.874.000			610.941.125
	Pelayanan Tata Laksana, Hukum, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi		2.553.416.000			2.308.997.821
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian		1.142.689.000			954.099.800
	Peningkatan Kompetensi Pegawai		4.886.012.000			4.514.650.317
	Pelayanan Kerumahtanggaan		745.712.000			694.195.472
	Pelayanan Keprotokolan		2.388.796.000			2.222.013.829
	Pengelolaan Barang Milik Negara		2.180.367.000			2.033.341.950
	Pelayanan Tata Persuratan		646.155.000			566.295.000
	Pengelolaan Perpustakaan		319.483.000			303.479.878
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi di Lingkungan Badan		2.375.880.000			2.318.388.500
	Layanan Hubungan Masyarakat		3.637.338.000			3.457.101.546
	Layanan Kerja Sama Kebahasaan dan Kesastraan		6.071.903.000			4.961.572.032
	Gerakan Literasi Nasional		29.012.627.000			18.871.152.838
	Layanan Internal	1	14.612.519.000	1	100	13.178.165.079
	Layanan Perkantoran	1	113.893.549.000	1	100	107.808.309.886
						78,01
						98,73
						98,03
						90,26
						90,43
						83,50
						92,40
						93,09
						93,02
						93,26
						87,64
						94,99
						97,58
						95,04
						81,71
						65,04
						90,18
						94,66

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

PENGUKURAN KINERJA

Unit Kerja : Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Tahun : 2019

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			
					TARGET	%	ANGGARAN	%
1.	Meningkatnya Kosakata Bahasa Indonesia (SK 6.2021.1)	1. Jumlah Kosakata Indonesia (IKK 6.2021.1.1)	2.000 kosakata	1.027.436.000	2.000 kosakata	100	1.012.349.265	98,53
		2. Jumlah Kamus (IKK 6.2021.1.2)	10 kamus	2.532.663.000	12 kamus	120	2.478.648.591	97,87
2.	Meningkatnya Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terindungi (SK 6.2021.2)	1. Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Terkonsevasi, dan Terevitalisasi (IKK 6.2021.2.1)	43 bahasa atau sastra	4.500.517.000	42 bahasa atau sastra	97,67	4.398.674.907	97,74
3.	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan (SK 6.2021.3)	1. Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan (IKK 6.2021.3.1)	3 buku acuan	332.523.000	3 buku acuan	100	324.222.083	97,50
		2. Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra (IKK 6.2021.3.2)	28 naskah	2.782.850.000	28 naskah	100	2.720.625.881	97,76
		3. Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra (IKK 6.2021.3.3)	4 terbitan	552.581.000	4 terbitan	100	536.347.399	97,06
4.	Meningkatnya Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (SK 6.2021.5)	1. Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (IKK 6.2021.5.1)	4 paket soal	1.178.324.000	4 paket soal	100	1.160.357.731	98,48
5.	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Badan Bahasa	1. Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 layanan	10.559.323.000	1 layanan	100	9.960.869.537	94,33

**PENGUKURAN KINERJA
PUSAT PEMBIAYAAN BAHASA DAN SASTRA**
per 31 Desember 2019
Berdasarkan Renstra Permendikbud 12 tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI			KETERANGAN	
			ANGGARAN	FISIK	SATUAN	ANGGARAN	%	FISIK	%
1	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Tertina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	1.1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Tertina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	10.453.491.000	1.990	Orang	10.051.118.219	96,15	2.021	101,56
		1.2 Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	8.670.526.000	5.000	Orang	7.887.855.279	90,97	5.012	100,24
		2.1 Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Uji Kemahiran Bahasa Indonesia	807.751.000	3.000	Orang	698.176.395	86,43	2.423	80,77
3	Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali	3.1 Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasa-basanya	4.072.229.000	902	Lembaga	3.799.425.093	93,30	512	101,99
		3.2 Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasa-basanya	1.241.048.000	40	Lembaga	1.038.546.930	83,68	40	100,00
4	Terselenggaranya Layanan Dolungan Manajemen Teknis Di Lingkungan Badan Bahasa	4.1 Layanan Dolungan Manajemen Saliur	7.627.983.000	1	Layanan	7.391.887.353	96,90	1	100,00
		1.1 Jumlah Bahan Kejurjaan Teknis Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra	512.448.000	9	Musikah	545.786.910	95,34	9	100,00
		3.1 Jumlah bahan, modal, dan model pembelajaran bahasa dan sastra	5.627.931.000	170	Musikah	5.154.803.304	91,59	170	100,00

Jakarta, 31 Desember 2019
Kepala Pusat Penyelidikan Bahasa dan Sastra,

Dr. Huriy Dardul Ismadi, M.Pd.
NIP 196110051988031002

[illegible]



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor: 0006 /G/KP/2019
TENTANG
PETUGAS PELAPORAN
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN
ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

- Menimbang** : 1. bahwa salah satu fungsi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
2. bahwa untuk meningkatkan dan mengendalikan capaian kinerja Badan Pengembangan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan perlu adanya Petugas Pelaporan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di tiap satuan kerja di bawah lingkungan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Petugas Pelaporan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di satuan kerja masing-masing;
- Kedua :** Petugas Pelaporan bertanggung jawab dan bertugas menjalankan tugas pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di satuan kerja masing-masing serta melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- Ketiga :** Petugas Pelaporan bertugas selama masa pelaksanaan program dan anggaran tahun berjalan;
- Keempat :** Tugas petugas pelaporan tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2019
a.n. Kepala Badan Pengembangan Bahasa
dan Perbukuan,
Sekretaris Badan,

Drs. Muh. Abdul Khak, M.Hum.
NIP 196407271989031002

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
2. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan;
3. Kepala Pusat Pembinaan;
4. Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan;
5. Kepala Pusat Perbukuan;
6. Kepala Balai/Kantor Bahasa di lingkungan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

Nomor : 0006 /G//KP/2019

Tanggal : 27 Maret 2019

Tentang : Petugas Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran dilingkungan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

**PETUGAS PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN**

No.	Satuan Kerja	Nama Petugas	NIP
1.	Sekretariat Badan Bahasa	Uud Suyuhudin, A.Md.	198201012006041005
2.	Pusat Pengembangan dan Pelindungan	Anton Andriana	198308172003121006
3.	Pusat Pembinaan	Ade Kurniawan	197610032003121001
4.	Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	Heru Budi Wijayanto, S.E.	198303282014041001
5.	Pusat Perbukuan	Frandy Yuanda	197807152008121002
6.	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	Budi Harto	196510241985031003
7.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Dewi Pridayanti, S.Sos.,M.Adm., SDA	197909132005012002
8.	Balai Bahasa Provinsi Bali	I Made Mariyatha, S.E.	197602132006041002
9.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Alliati, S.Sos.	197709162002122001
10.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	Mangara Siagian Siregar, S.E.	198102202006041003
11.	Balai Bahasa Provinsi Papua dan Papua Barat	Rinaldo M. Thenu, S.E.	197703172005011004
12.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	M. Iwan Mukaffi, A.Md.	197509112005011002
13.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Sulaeman	197302132002121001
14.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Ngatirah, S.E., M.Si.	197903132006042002
15.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Indah Gustina, MSP	198308162006042003
16.	Balai Bahasa Provinsi Riau	Michal Denis, A.Md.	197505312005011003
17.	Balai Bahasa Provinsi Aceh	Zulfan, A.Md.	197809282005011002
18.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Supris Yudianto, S.E.	197311302005011002
19.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Gulana Hadi Prayitno, S.E.	198207142006041001
20.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	Sudirman	197512312003121004
21.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Kusmara Jiwantara, S.T.	197805232003121002
22.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Stevanus F.M. Pangemanan, S.S., M.Hum	198310072006041003
23.	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Tika Wulandari, S.E.	198204272006042001
24.	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.	198203302006041003

No.	Satuan Kerja	Nama Petugas	NIP
25.	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Retno Damayanti, S.E.	198510232014042002
26.	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Killep Mariani, S.E.	198212312006042002
27.	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Dwidayanto, S.E.	197812082005011003
28.	Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung	Feri Priatiawan, S.S.	198702062010021004
29.	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	Ikhwan Nisopa, S.H.	198204292006041001
30.	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Sehabudi, S.E.	197809202010121002
31.	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Zuhriati A. Tahaku, S.Sos.	198405252014042003
32.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	Abdul Rahim Husin, S.Kom.	198206112014041003
33.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	Yulian Amalia, S.Kom.	199101112014042001
34.	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Novianti, S.Pd.	197911052006042001
35.	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Irwan Alfreed Pellondou, S.Kom.	198805042014042001

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 22 Maret 2019
 a.n. Kepala Badan Pengembangan Bahasa
 dan Perbukuan,
 Sekretaris Badan,
 BADAN PENGEMBANGAN BAHASA
 DAN PERBUKUAN
 Drs. Mub. Abdul Khak, M.Hum.
 NIP. 196407271989031002 A2

Lampiran 2

Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

Nomor : 0006 /G//KP/2019

Tanggal : 27 Maret 2019

Tentang : Tugas Petugas Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

TUGAS PETUGAS PELAPORAN	
Pertama	Menyampaikan rencana kinerja tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja (PK) satkernya masing-masing
Kedua	Menyampaikan rencana penyerapan anggaran (RPA) satkernya masing-masing setiap awal tahun sebelum pelaksanaan program dan anggaran setelah pagu anggaran disusun.
Ketiga	Menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran satkernya masing-masing di awal tahun pelaksanaan program dan anggaran.
Keempat	Mengkoordinasikan RPA dan jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dengan penanggung jawab/pelaksana kegiatan satkernya masing-masing.
Kelima	Menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan menggunakan Format B-19 Plus dikirim melalui pos elektronik <i>dayaserapsetban@kemdikbud.go.id</i> setiap tanggal 25 akhir bulan pelaksanaan program dan anggaran.
Keenam	Melakukan pengisian capaian output (fisik) pada aplikasi SMART melalui <i>money.anggaran.depkeu.go.id</i> setiap akhir bulan pelaksanaan program dan anggaran.
Ketujuh	Melakukan pengisian terhadap aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan melalui: <i>e-money.bappenas.go.id</i> setiap akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Kedelapan	Melakukan pengisian dokumen Sistem Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja pada aplikasi <i>e-performance</i> .
Kesembilan	Mengumpulkan laporan triwulan dalam bentuk pengukuran kinerja per akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Kesepuluh	Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setelah berakhirnya tahun anggaran.
Kesebelas	Berkoordinasi dengan para penanggung jawab/pelaksana kegiatan atau pimpinan pada satkernya masing-masing dalam pelaksanaan pelaporan.
Keduabelas	Berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk menyinkronkan aplikasi SAS dengan aplikasi <i>molk.kemdikbud.go.id</i> dalam rangka memantau capaian anggaran dan kinerja satker masing-masing.
Ketigabelas	Melaporkan hasil tugas-tugas pelaporan kepada Kepala Satker masing-masing.
Keempat belas	Seluruh laporan divalidasi dan ditandatangani oleh Kepala Satker masing-masing dan disampaikan ke Bagian Perencanaan dan Kerja Sama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2019
a.n. Kepala Badan Pengembangan Bahasa
dan Perbukuan
Sekretaris Badan
BADAN
PENGEMBANGAN BAHASA
DAN PERBUKUAN
Drs. Muh. Abdul Khak, M.Hum.
NIP. 198407271989031002



KEPUTUSAN
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 72/1 / 71.1/KP/2019
TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SEKRETARIAT BADAN
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

- Menimbang : 1. bahwa Sekretariat Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sebagai salah satu satuan kerja Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan salah satu tugas fungsinya adalah mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
2. Bahwa untuk meningkatkan dan mengendalikan capaian kinerja Sekretariat Badan perlu adanya Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
8. Program Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- Kedua : Tim Penyusun bertugas menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 2019 dan menyampaikannya kepada Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan serta Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Oktober 2019
Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa
dan Perbukuan,

/ Drs. Muh. Abdul Khak, M.Hum.
NIP 196407271989031002

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 (LAKIP) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan	Struktur dalam Tim
1.	Drs. Muh. Abdul Khak	Sekretaris Badan	Penanggung Jawab
2.	H.M. Nasir	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama	Koordinator
3.	Agung Indra Dewa	Kepala Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	Ketua
4.	Ratna Perwitosari	Analisis Pelaksanaan Program dan Anggaran	Penganalisis Data LAKIP
5.	Dinar Kartika A.W.	Pengelola Data Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	Pengolah Data LAKIP
6.	Uud Suyuhudin	Pengelola Data Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	Penyusun LAKIP
7.	Eko Jatmiko Harimuda	Verifikator Keuangan	Pengolah Data Subbagian Perbendaharaan
8.	Dede Saputra	Penyusun Laporan Keuangan	Pengolah Data Subbagian APK
9.	Akhmad Susanto	Analisis BMN	Pengolah Data Subbagian BMN
10.	Oka Wahyu Setiya Adi	Analisis Jabatan	Pengolah Data Subbagian Hukum dan Tata Laksana
11.	Suryadi	Pengadministrasi Kepegawaian	Pengolah Data Subbagian Keuangan
12.	Princes Alberta	Pengolah Data Humas	Pengolah Data Subbagian Humas
13.	Ihfan Nur Sahid Faroan	Pengadministrasi Persuratan	Pengolah Data Subbagian Tatat Usaha
14.	Nurjaman	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Pengolah Data Subbagian Informasi dan Publikasi
15.	Muhammad Rhevie Zaradin	PPNPN Badan Bahasa	Pengolah Data LAKIP Sekretariat Badan

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 31 Oktober 2019
 Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa
 dan Perbukuan,



Drs. Muh. Abdul Khak, M.Hum.
 NIP 196407271989031002 2